Profil Kabupaten Tangerang

CAPAIAN RPJMD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020
DAN PENANGANAN COVID-19

Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkantoran Tigaraksa PUSPEM Kabupaten Tangerang
Alamat: Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten 15119

Profil Kabupaten Tangerang

CAPAIAN RPJMD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 DAN PENANGANAN COVID-19

Sekapur Sirih : **ABDUL MUNIR, SP, M.Si**
Kabid IKP Kominfo

Kata Pengantar : **Tini Wartini**
Kadis Kominfo

Sambutan I : **A. Zaki Iskandar**
Bupati Tangerang

Sambutan II : **Kholid Ismail, S.Ag**
Ketua DPRD Kab. Tangerang

Halaman : **xxii + 314 Halaman**

Cetakan : **Desember 2020**

Diterbitkan oleh : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang**

Percetakan : **PT. Komunika Rakyat Indonesia**

Daftar isi

SEKAPUR SIRIH KABID INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK ix
KATA PENGANTAR KADISKOMINFO xiv
SAMBUTAN BUPATI TANGERANG xvii
SAMBUTAN KETUA DPRD
KABUPATEN TANGERANG xx

BAB I

SEKILAS KABUPATEN TANGERANG 1
Sejarah Tangerang 2
- Asal - Usu Nama Tangerang 4
- Terbentuknya Kabupaten Tangerang 6
- Perubahan Hari Jadi Kabupaten Tangerang 7
- Pelaksanaan Hari Jadi Ke-388 8

Lambang Daerah 9
Topografi 11
- Geografis 12
- Iklim dan Curah Hujan 13
- Penduduk dan Mata Pencaharian. 13

Kondisi Wilayah Kabupaten Tangerang 15
- Wilayah Administasi 15
- Kondisi Demografi 17
- Kependudukan 12
- Persebaran dan Kepadatan Penduduk 22

Hari Jadi Kabupaten Tangerang 24
- Perda Hari Jadi Kabupaten Tangerang 25
- Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang 27
- Arti Logo Hari Jadi Kabupaten Tangerang 28

BAB II

VISI MISI DAN PROGRAM STRATEGIS 31
Visi Misi Kabupaten Tangerang 31
RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 32
Rencana Strategis
Pembangunan 2019-2023 37
- Penataan Ruang 41
- Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem jaringan prasarana wilayah 54
- Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat Terpadu 68
- Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan 70
- Rencana Pelabuhan Barang di Kecamatan Teluknaga 70
- Sistem Jaringan Energi 73
- Sistem Jaringan Telekomunikasi 75
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air 77
- Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 83
- Sistem Jaringan Persampahan Wilayah 85
- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana 86
- Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 88
- Kawasan Cagar Budaya 93

- Kawasan Peruntukan Budi Daya 95
- Kawasan Peruntukan Pertanian 96
- Kawasan Peruntukan Perikanan 98
- Kawasan Peruntukan Industri 100
- Kawasan Peruntukan Pariwisata 101
- Kawasan Peruntukan Permukiman 103
- Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara 114
- Kawasan Reklamasi 104
- Kawasan Pusat rehabilitasi/ lembaga pemasyarakatan 104
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 105
- Komplek Sekolah Pelayaran 105
- Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 105
- Pembangunan Stadion Olahraga 106
- Kawasan Rencana Pengembangan Rumah Sakit 106
- Kawasan Pengembangan Kawasan P usat Pemerintahan 106
- Kawasan Pengembangan Kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta 107
- Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar 107
- Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 107

BAB III

ROGRAM UNGGULAN DAN PENCAPAIAN TAHUN 2020 109

RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 109

Prioritas Pembangunan 2020 112
15 Program Unggulan dan Capaian 117
- Tangerang Religi 118
- Sanitasi Pesantren (Sanitren) 120
- Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) 121
- Gerakan Tangerang Sehat 124
- Masyarakat Bugar 127
- Sayang Barudak 129
- Tangerang Mantab 132
- Gerbang Mapan 134
- Pengembangan Bantuan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro (Kembangku) 138
- Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Asset (Optima) 140
- Gerakan BERSAMA Berantas Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) Plus 143
- Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah) 145
- Pengelolaan dan Pemantauan Sumber Daya Air (Lestari) 148
- Pengendalian Kemacetan Lalulintas (Pekat Lantas) 150
- Produk Inovatif dan Kreatif (Proaktif) 152

BAB IV

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 163
- Penanganan dan Pengendalian 187
- Penanggulangan Dampak Covid 203

- Penanganan Dampak Ekonomi 211
- Penanganan Pendidikan 217
- Pelayanan Publik 220
- Program Unggulan di Masa Pandemi 224

BAB V

PRESTASI KABUPATEN TANGERANG 2020 227

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Tangerang 15
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 2019 18
Tabel 3. Jumlah Penduduk 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin 19
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2016 21
Tabel 5. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 23
Tabel 6. Tema Pembangunan Tahun 2019-2023 38
Tabel 7. Arah Kebijakan Pembangunan 2019-2023 42
Tabel 8. Capaian 15 Program Unggulan tahun 2020 155
Tabel 9. Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang 160
Tabel 10. Trend Mingguan Kasus Konfirmasi Positif/Indikator 1 188
Tabel 11: Trend Mingguan Kasus ODP Dan PDP/Indikator 2 189
Tabel 12. Trend Kematian Kasus Positif/Indikator 3 189

Tabel 13. Trend Kematian Kasus ODP Dan PDP/Indikator 4 190
Tabel 14. Trend Mingguan Kasus Positif Yang Masih Dirawat di Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang/ Indikator 5 190
Tabel 15. Trend Mingguan Kasus ODP dan PDP Yang Masih Dirawat di RS di Kabupaten Tangerang/ Indikator 6 191
Tabel 16. Trend Mingguan Kesembuhan Kasus Covid-19 Di Kabupaten Tangerang/Indikator 7. 191
Tabel 17. Trend Mingguan Kasus ODP dan PDP Selesai Dipantau dan Diawasi di Kabupaten Tangerang/ Indikator 8. 192
Tabel 18: Laju Insidensi Kasus Positif Per 100.000 Penduduk/Indikator 9. 192
Tabel 19. Laju Kematian Kasus Covid-19 Per 100.000 Penduduk/Indikator 10 193
Tabel 20. Angka Reproduksi Efektif 193
Tabel 21. Persentase Positif Rate Kasus Covid-19/ Indikator 12 194

SEKAPUR SIRIH

KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Assalamu'alaikum Wr.WB

PUJA dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Pemerintah Kabupaten Tangerang merayakan Hari Jadi-nya yang ke-388. Di tahun yang istimewa ini, kami mempersembahkan sebuah buku profil Kabupaten Tangerang; "Profil Kabupaten Tangerang Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan Penanganan Covid-19."

Di tengah pandemi Covid-19, tim penyusun penerbitan buku yang dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang terus bekerja untuk menyelesaikan penerbitan buku, dari mulai penetapan tema, judul, mengumpulkan data untuk materi tulisan, wawancara sejumlah tokoh serta melakukan liputan selama beberapa bulan sebelum hari H perayaan HUT Kabupaten Tangerang.

Waktu yang sempit dan jadwal kegiatan yang padat menjadi kendala tersendiri. Apalagi, di tengah pandemi, hampir seluruh kegiatan lebih banyak diarahkan pada persoalan penanganan dan pengendalian Covid-19. Sejumlah rencana pun tak jarang berubah mendadak atau molor lantaran diberlakukannya sisten Work From Home (WFH) kepada tim maupun nara sumber, hingga schedule yang telah ditetapkan tak jarang meleset. Namun berkat kerja keras seluruh tim, buku ini pun dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Buku ini sendiri terbagi dalam lima bab. Kelima bab itu yakni Sekilas Kabupaten Tangerang, Visi Misi dan Program Strategis, Program Unggulan dan Capain Tahun 2020, Penaganan dan Pencegahan Covid-19, dan Prestasi dan pembangunan Kabupaten Tangerang 2020. Selain dilengkapi foto dan ilustrasi, buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan grafis, sebagai kelengkapan data.

Dalam buku ini sejarah Kabupaten Tangerang diulas, mulai dari asal-usul nama Kabupaten Tangerang, lambang daerah, topografi ,kondisi wilayah dan lain sebagainya. Yang spesial dari bab I ini, kami juga mengulas hari jadi Kabupaten Tangerang serta alasan perubahan tanggal dan bulan hari jadi yang biasa dirayakan tanggal 27 Desember menjadi 13 Oktober. Dalam ulasannya, kami paparkan sejarah hingga proses legalitas jadi ke 388, yang ditetapkan lewat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang. Lewat Perda ini juga --mulai tahun 2020-- HUT Kabupaten Tangerang akan dirayakan setiap tanggal 13 Oktober.

Selain sejarah Kabupaten Tangerang, buku ini juga memaparkan visi misi pasangan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli selama lima tahun ke depan. Visi misi ini sendiri tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019-2023. Dalam bab ini, kami juga mengulas Rencana Strategis Pembangunan 2019-2023, dimana di dalamnya memuat rencana pembangunan dan dasar hukum yang digunakan. Banyaknya data-data serta cakupannya yang luas, membuat bab ini membutuhkan halaman yang cukup banyak.

Bab III kami menguraikan 15 program unggulan dan pencapaian hingga tahun 2020. Ke 15 program unggulan itu yakni Tangerang Religi; Sanitasi Pesantren (Sanitren); Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM); Gerakan Tangerang Sehat; Masyarakat Bugar; Sayang Barudak; Tangerang Mantab; Gerbang Mapan; Pengembangan Bantuan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro (Kembangku); Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajement Asset (Optima); Gerakan Bersama Berantas Kawasan Padat; Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) Plus; Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah); Pengelolaan dan Pemantauan Sumber Daya Air (Lestari); Pengendalian Kemacetan Lalulintas (Pekat Lantas); Produk Inovatif dan Kreatif (Proaktif).

Dalam bab ini--sesuai data yang kami peroleh dari Bappeda Kabupaten Tangerang--terlihat jelas, bahwa pencapaian program unggulan menunjukan tren positif. Tren ini dapat dilihat dari pencapaian sejumlah program unggulan yang sudah mencapai 100 persen. Kendati demikian, ada beberapa program yang tidak sesuai farget tang sudah ditentukan lantaran sejumlah kendala, terutama di masa pendemi yang mengharuskan penghentian sementara kegiatan yang sifatnya tidak penting dan dapat ditunda.

Yang paling menarik dalam buku ini adalah terkait dengan penanganan dan pengedalian Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Dari bab IV ini kita dapat melihat, bagaimana Pemerintah

Kabupaten Tangerang bahu-membahu dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten, dalam mengendalian pandemi Corona. Hasilnya, hingga bulan November 2020, Kabupaten Tangerang sudah berubah warna, dari zona merah menjadi zona kuning.

Perubahan warna ini menggambarkan bagaimana Pemkab Tangerang telah 'berjibaku' melawan pandemi. Mulai dari melakukan tes swab secara massal dan massif keseluruh lapisan masyarakat, menyiapkan rumah singgah penderita Covid, membagian masker keseluruh lapisan masyarakat, hingga penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Kerja keras selama berbulan-bulan ini tentu tidak akan berhasil apa-apa jika tidak ditopang kerja keras, semangat dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat, membuat penanganan dan pengendalian pandemi di Kabupaten Tangerang jauh lebih mudah hingga relative berhasil.

Kendati disibukkan dengan urusan penanganan dan pengendalian Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak melupakan pembanguan fisik. Meski dengan dana yang terbatas--lantaran pandemi Covidi-19 mengharuskan dilakukan refocusing APBD--sejumlah pembangunan terus dilakukan. Pembangunan fisik yang dikerjakan ini karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat Covid dapat kembali bangkit.

Pada bagian akhir buku ini, kami mengetengahkan prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Diperolehnya prestasi ini tak lepas kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat, OPD dan BUMD, dalam memberikan yang terbaik. Lewat kerja keras tampa pamrih

ini, apa yang dilakukan mendapatkan hasil baik, dan diganjar sejumlah penghargaan. Penghargaan-penghargaan ini sendiri seperti memberikan kesejukan kepada kita dalam merayakan HUT Kabupaten Tangerang ke 388, sert memberikan semangat untuk bangkit dari pandemi.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Tim yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Berkat kerja keras dan tanggung jawab, buku ini bisa diterbitkan dengan segala kekurangan. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemerintah daerah--teruma Bupati A Zaki Iskandar, Wakil Bupati H Mad Romli, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesal Rasyied dan Kadiskominfo Tini Wartini--atas dukungannya kepada tim penyusun hingga pembuatan buku ini lebih mudah dan dapat diterbitkan sesuai jadwal.

Terlalu muluk kiranya jika buku ini dibuat sebagai kado hari Jadi Kabupaten Tangerang ke 388. Kendati demikian, kami berharap, buku ini dapat memberikan sumbangsih dalam memberikan informasi positif tentang pencapaian pembangunan Kabupaten Tangerang menuju Tangerang lebih gemilang...

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Kabid IKP Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Tangerang



ABDUL MUNIR, SP, M.Si

KATA PENGANTAR
KADISKOMINFO



Assalamu'alaikum Wr.WB

TAHUN 2020 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama warga dan pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada tahun ini, bangsa ini dilanda pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang hampir melumpuhkan seluruh sendi perekonomian dan sosial. Namun di balik suasana yang memprihatinkan ini, pada tahun 2020 ini juga, masyarakat Kabupaten Tangerang merayakan Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke 388 tahun.

Peringatan hari jadi ke 388 ini tentu amat spesial. Selain baru pertama kali dirayakan pada tahun 2020, HUT Kabupaten Tangerang ke 388 menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang sudah cukup tua, yang berarti sudah cukup matang dalam menjalankan program-program pembangunan guna mensejahterakan warganya. Berbagai pengalaman dan peristiwa, baik politik, sosial, keamanan dan lain sebagainya, sudah dilalui bersama oleh warga dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kedewasaan para pemimpin

dan warganya dalam interaksi sosial, diyakini mampu melawan Covid-19 dengan saling bahu-membahu dalam pemulihan ekonomi hingga kita dapat menuju Tangerang lebih gemilang.

Kendati pandemi Covid-19 belum berakhir, Pemerintahan Kabupaten Tangerang dibawah pimpinan Bupati Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati H. Mad Romli, terus menggerakan roda pembangunan di setiap sektor. Untuk periode ini, ada 15 program unggulan yang menjadi fokus lima tahun kedepan. Ke lima belas program unggulan ini merupakan pengejawantahan visi-misi pasangan bupati dan wakil bupati yang dilantik 20 September 2018 lalu.

Selain membangun infrastruktur, ke 15 program unggulan yang digulirkan ini sangat bersentuhan sekali dengan kepentingan masyarakat dan dampaknya sangat dirasakan oleh warga Kabupaten Tangerang. Terutama bidang pemberdayaan ekonomi dan sektor pelayanan masyarakat.

Pembangunan yang dijalankan tidak hanya membangun fisik semata tetapi sesuai visi " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera". Visi ini sendiri diwujudkan kedalam enam misi yakni Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius; Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel; Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

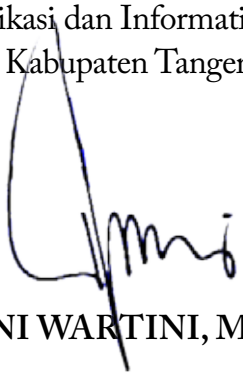
Sejumlah prestasi pun diukir oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Ini karena Pemkab Tangerang terus melakukan

pembangunan dan pembenahan diberbagai sektor. Tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga membenahan dibidang pelayanan.

Saya berharap buku Profil Kabupaten Tangerang 2020 yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tangerang, hingga daerah ini bisa menjadi daerah yang maju dan patut dibanggakan oleh masyarakatnya.

Wassalamu'alaikum Wr.WB

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan
Kabupaten Tangerang



Dra. TINI WARTINI, M.,Si

SAMBUTAN

BUPATI TANGERANG



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PUJA dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya.

Setiap tahun kita memperingati hari jadi Kabupaten Tangerang. Peringatan Hari Jadi ini harus kita syukuri sebagai sebuah anugrah Allah kepada kita sekalian, atas apa yang telah kita raih dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang ini harus kita jadikan sebagai momentum mengevalasi atas apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita kerjakan. Evaluasi ini nantinya akan kita jadikan penyemangat dalam upaya memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa. Selain untuk pertama

kalinya kita memperingati Hari Jadi Kabupaten Tangerang pada tanggal 13 Oktober, dimana usia Kabupaten Tangerang juga resmi dinyatakan sudah mencapai 388 tahun, peringatan Hari Jadi ini juga kita peringati secara sederhana di tengah pandemi Covid-19. Kendati demikian, di tengah pandemi ini, kita tidak boleh berputus asa dan harus terus bergerak maju untuk menjadikan Kabupaten Tangeran makin gemilang.

Sejarah Baru, Semangat Baru, Lawan Covid-19, menjadi tema Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke 388 tahun. Hal ini menggabarkan semangat kita untuk tetap menjalankan 15 program unggulan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Ke 15 program unggulan yaitu Tangerang Religius, Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren), Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Gerakan Tangerang Sehat, Sayang Barudak (Sabar), Masyarakat Bugar, Tangerang Mandiri Pangan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), Aksesibilitas bantuan permodalan bagi koprasi dan usaha mikro, OPTIMA (optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Manajemen Aset), Gebrak Pakumis Plus, Kita peduli permasalahan Sampah (KIPPRAH), Tangerang bebas macet, Pengelilaan sumber air baku dan pengendalian Banjir, dan Produk Inovatif dan kreatif (PROAKTIF).

Perlu digaris bawahi, pembangunan yang kita lakukan dan kita rencanakan adalah demi kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan program-program yang kita luncurkan, semua bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang guna 'Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera'.

Buku Profil Pemerintah Kabupaten Tangerang yang saat ini kita baca, merupakan gambaran dan potensi wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam buku ini juga, dipaparkan capaian program

unggulan selama 2019 sampai dengan Tahun 2020.

Dalam buku ini juga kita dapat melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi dan pengendalian pandemi Covid-19 di masyarakat. Baik dibidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini semua dilakukan semata-mata demi menekan dampak sosial ekonomi masyarakat, agar masyarakat memiliki semangat baru untuk bangkit melawan Covid-19.

Terbitnya buku ini mengiringi peringatan Hari Jadi ke-388 Kabupaten Tangerang. Dihari yang bahagia ini saya beserta keluarga mengucapkan Dirgahayu Pemerintah Kabupaten Tangerang ke-76 tahun 2019. Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama ikut berperan aktif dalam pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kabupaten Tangerang yang kita cintai ini.

Mari kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang 'Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera'. Sehingga pada akhirnya daerah kita mampu bersaing dan menjadi Gemilang dimasa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

BUPATI TANGERANG



A. ZAKI ISKANDAR

SAMBUTAN

KETUA DPRD KABUPATEN TANGERANG



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PUJI dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas karunia dan kehendaknya-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang ke-388, yang jatuh pada tanggal 13 Oktober 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama kita memperingati Hari Jadi Kabupaten Tangerang, yang akan diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Hal ini setelah menempuh proses yang cukup panjang melalui kajian berdasarkan sumber-sumber valid, dan pada Rabu 31 Juli 2019, rapat paripurna DPRD Kabapaten Tangerang telah menetapkan hari lahirnya Kabupaten Tangerang menjadi tanggal 13 Oktober.

Ini artinya, dengan ditetapkannya tanggal 13 Oktober sebagai Hari Jadi Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, berarti usia Kabupaten Tangerang menjadi 388 tahun. Kita berharap, dengan usia Kabupaten Tangerang yang sudah mencapai 388 tahun,

pembangunan yang sudah dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seyogyanya demi kejahteraan masyarakat.

Di tengah pandemi yang melanda nusantara, dimana di dalamnya juga dirasakan oleh warga Kabupaten Tangerang, kita patut bersyukur masih dapat merayakannya dengan sederhana namun khidmat. Peringatan Hari Jadi ini juga memberikan dorongan semangat bagi kita untuk tetap menatap matahari dengan semangat baru.

Selain itu, pada usia yang sudah cukup tua ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak lagi dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan kesenjangan social serta kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Sebaliknya, diusia yang hampir menyamai Kabupaten Bogor dan Jakarta, Pemerintah Kabupaten Tangerang harus sudah mampu tinggal landas menjadi pemerintahan yang maju dan modern di setiap bidang, serta mampu meningkatkan kesejahteraaan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai Wakil Rakyat, kami terus berupaya untuk menjadi mitra kerja yang saling mendorong kearah pembangunan yang lebih baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai mitra yang baik juga, kami akan selalu memberikan kritik dan saran yang membangun agar arah pembangunan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dengan target-target yang sudah ditentukan.

Apa yang kami lakukan ini tak lain, guna tercapainya cita-cita kita bersama menjadikan Kabupaten Tangerang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera' menuju Tangerang lebih Gemilang.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang telah memimpin Kabupaten Tangerang pada periode kedua ini. Banyak kemajuan pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Semoga kerja kerasnya yang telah membangun daerah ini akan terus Gemilang masa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TANGERANG



H. KHOLID ISMAIL, S.Ag.

BAB I

SEKILAS KABUPATEN TANGERANG

KABUPATEN Tangerang terletak di bagian timur Provinsi Banten. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Kabupaten Tangerang terbagi atas 29 kecamatan, yang terdiri dari 246 Desa dan 28 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 3.050.929 jiwa pada tahun 2012. Pusat pemerintahan Kabupaten TangErang berada di Kecamatan Tigaraksa.

Secara umum, Kabupaten Tangerang dikelompokkan menjadi tujuh kawasan strategis, yaitu Kawasan Pusat Pertumbuhan Utama, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Strategis Dryport, Kawasan Bandara Soekarno Hatta, Kawasan Perbatasan DKI Jakarta, Kawasan PLTU Lontar dan Kawasan Rencana Reklamasi Pantai.



PAD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 sebesar Rp 882 miliar. Tahun 2018 ditargetkan mencapai 2,2 triliun. Dengan terus meningkatnya pendapatan daerah, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan.

I. Sejarah Tangerang

Kabupaten Tangerang yang dijuluki Kota Seribu Industri memiliki sejarah yang amat panjang. Pada abad ke-5 Masehi, misalnya, Tangerang pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanagara.

Ikhwal riwayat Kerajaan Tarumanagara tersebut, dapat ditelusuri dari tujuh prasasti yang masing-masing ditemukan di daerah Bogor, Bekasi, Pandeglang, dan Lebak. Ketujuh Prasasti itu ialah : Prasasti Cianteun, Prasati Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianteun, Prasasti Lebak dan Prasasti Tugu. Dari ketujuh Prasasti itu, diketahui bahwa Tangerang adalah bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat.

Sejak Kesultanan Banten berdiri dan Jayakarta digabungkan dengan wilayah Kesultanan Banten, daerah Tangerang menjadi bagian dari Wilayah Kesultanan Banten. Daerah Tangerang yang dimaksudkan di sini adalah, daerah yang berada di sebelah barat dan timur aliran Sungai Cisadane bagian hilir. Ketika itu kedudukan daerah Tangerang dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten belum begitu jelas.

Dari sumber tradisi setempat menyebutkan, sekitar tahun 1670-an antara Banten, Sumedan, dan Cirebon telah melakukan hubungan Politik dan perdagangan. Sejalan dengan itu, akhir tahun 1680 terjadi pertemuan antara Sultan Banten dengan Wakil Penguasa Sumedang dan Cirebon di sebuah tempat yang bernama Pasanggrahan, yaitu kota pertama di daerah Tangerang Pedalaman. Dalam pertemuan itu, disepakati kedudukan Tangerang dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten adalah Kemaulanaan, dengan Ibukotanya Pasanggarahan.

Kekuasaan Kemaulanaan Tangerang itu, mencakup wilayah Tangerang, Jasinga, dan Lebak. Kemaulanaan Tangerang ini dipimpin oleh tiga orang Tumenggung yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat.Mereka adalah ; Aria Yudanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Santika, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Tigaraksa – yang artinya Tiga Pemimpin.

Meskipun telah terjadi perjanjian antara Sultan Haji dengan Kompeni Belanda pada 17 April 1684, namun ketiga Tumenggung itu masih tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sayang usaha meraka gagal. Secara berturut-turut meraka gugur dalam pertempuran. Tumenggung Aria Santika gugur dalam sebuah pertempuran di Kebon Besar pada tahun 1717, jasadnya dimakamkan di Batuceper, Tangerang. Tahun 1718 Tumenggung Aria Yudanegara gugur dalam pertempuran di Cikokol, jasadnya dimakamkan di Desa Sangiang, Tangerang.



Selanjutnya tahun 1720 Tumenggung Arya Wangsakara gugur dalam pertempuran di Ciledug, jasadnya dimakamkan di Desa Lengkong, Tangerang. Dengan gugurnya ketiga Tumenggung yang dikenal dengan sebutan Tigaraksa itu, maka pada tahun 1720 riwayat Kemaulanaan Tangerang pun berakhir sudah.

I.a. Asal–Usul Nama Tangerang

Sejarah Kabupaten Tangerang, tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten yang mengirim 3 (tiga) Maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membangun perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai Kawasan Tigaraksa yang sekarang menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Jika merunut kepada legenda rakyat dapat

disimpulkan bahwa cikal bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi 3 (tiga) pimpinan ketika itu.

Penyebutan kata Tangerang sendiri berawal dari Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Sebutan "Tangeran" yang berarti "tanda" itu lama kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.

Namun sumber lain dari Paririmbon Ke-Aria-an Parahijang menyebutkan, tahun 1632 masehi, Sultan Banten memberikan perintah kepada tiga bangsawan. Ketiga bangsawan itu masing-masing Raden Aria Maulana Yudha Negara, Raden Aria Jayasentika dan Raden Aria Wangsakara, untuk membuka perkampungan baru di wilayah antara Cisadane dan Cidurian. Wilayah tersebut belakangan dikenal sebagai wilayah Lengkong Sumedang. Wilayah Lengkong Sumendang di bawah pimpinan Aria Wangsakara inipun berkembang pesat dan memiliki struktur pemerintah sendiri. Kelak, wilayah Lengkong Sumedang ini dikenal sebagai wilayah Keariaan Tanggeran. Lama kelamaan, Keariaan Tanggeran berubah lafal menjadi Tangerang.

Namun versi legenda masyarakat setempat menuturkan, nama daerah Tangerang berasal dari dua kosa kata bahasa setempat, Tetengger dan Perang. Tetengger dalam Bahasa setempat berarti lokasi atau tempat, yang berbentuk tugu dari kayu bamboo atau tembok. Perang berarti perang, peperangan, pertempuran. Jadi Tangerang mempunyai arti tugu, batas pertempuran.

Tugu tersebut lazimnya oleh masyarakat disebut benteng atau batas daerah, wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten di sebelah sungai. Wilayah yang dikuasai Kompeni Belanda di sebelah timur Sungai Cisadane.

Sesungguhnya penduduk Tangerang dan Jakarta dahulu lebih mengenal Tangerang dengan sebutan Benteng dari pada istilah Tangerang untuk nama daerah Tangerang sekarang ini, walaupun berdasarkan sumber yang tidak otentik. Sedangkan istilah Tangerang sebagai nama daerah baru dikenal masyarakat luas sekitar tahun 1712 (Thohirruddin, 1971:22)

I.b. Terbentuknya Kabupaten Tangerang

Tanggal 18 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda secara de facto telah berakhir. Selanjutnya, Indonesia memiliki babak baru yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Pemerintah Pendudukan Militer Jepang ini, membagi wilayah Indonesia menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu :

Wilayah Sumatera berada di bawah kekuasaan tentara ke-25 Angkatan Darat, yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wilayah Jawa, Madura dan Bali berada di bawah kekuasaan tentara ke 16 Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Sedangkan wilayah Indonesia Bagian Timur yang meliputi, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku berada di bawah kekuasaan Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut.

Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, pengelolaan pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Selanjutnya, undang-undang tersebut menjadi pedoman pokok dari peraturan tata negara di masa lalu. Karena azas pemerintahannya adalah pemerintahan militer, maka Letnan Jendral Hitoshi Imamura yang menjabat Panglima Tentara ke-16 Angkatan

Darat, menjadi pucuk pimpinan pemerintahan.

Ia diserahi tugas membentuk pemerintahan militer di Jawa, kemudian diangkat sebagai Guinseikanbu. Staf pemerintahan ini selanjutnya menjadi Gunseikanbu, yang dalam menjalankan tugasnya membawahi sekitar lima departemen. Dalam lingkungan Kepresidenan Batavia, Pemerintah Militer Jepang membentuk dua kabupaten (ken), masing-masing Kabupaten Jakarta, dan Kabupaten Karawang, serta sebuah tokubetusi (kotapraja) Jakarta.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Tangerang yang tidak mengalami peruhana apa-apa, maka status Tangerang pada masa Pemerintahan Militer Jepang masih tetap menjadi Kawedanaan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1943, barulah status Tangerang ditetapkan menjadi Kabupaten.

Ketetapan tersebut berdasarkan keputusan Syuutyookan Jakarta yang dimuat dalam berita Kempo (berita pemerintah) tentang kepindahan Jakarta ken kakuso ke Tangerang. Maka Jakarta pun ditetapkan sebagai Takubetsusi (Kotapraja Istimewa). Pembentukan status Tangerang sebagai Kabupaten pada 27 Desember 1943, adalah semata-mata untuk kelancaran urusan pemerintahan, karena Pemerintah Kabupaten Jakarta dianggap tidak efektif untuk membawahi Tangerang yang wilayahnya cukup luas.

I.c. Perubahan Hari Jadi Kabupaten Tangerang

Berdasarkan kronologis sejarah di atas, maka hari jadi Kabupaten Tangerang diperingati setiap 27 Desember. Hal ini berdasarkan pada Perda Nomor 18 Tahun 1984, yang menetapkan hari lahir Tangerang jatuh pada tanggal 27 Desember 1943, yang didasarkan pada pemberian kekuasaan Pemerintah Pendudukan Jepang kepada Bupati Tangerang saat itu.

Namun berdasarkan fakta sejarah serta hasil diskusi yang dilakukan sejumlah budayawan, akademi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang, diyakini Kabupaten Tangerang telah jauh berdiri sebelum Republik Indonesia lahir.

Tidak hanya diteliti, dilakukan juga perbandingan dan kolaborasi data dengan berbagai data sejarah dari Banten, Sumedang, dan Belanda, sebagai bukti otentik lainnya yang mana isi data saling sinkron, menguatkan, dan saling melengkapi.

Bukti sejarah yang ada di dalam negeri yang digunakan sebagai pegangan adalah naskah tulisan tangan atau manuskrip yang dimiliki keluarga keturunan salah satu pendiri Tangerang, Raden Aria Wangsakara. Manuskrip itu terhimpun dalam buku Paririmbon Ka-Aria-an Parahyang tahun 1830 Masehi yang disusun oleh Bale Adat Kaum Parahyang, semacam Dinas Arsip di masa pemerintahan terdahulu.

Berdasarkan fakta ini, Pemkab Tangerang menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang, yang menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tangerang jatuh pada 13 Oktober 1632, bertepatan saat Sultan Banten memberikan perintah kepada tiga bangsawan untuk membuka wilayah baru tersebut. Dengan demikian, usia Kabupaten Tangerang dipastikan sudah berusia 388 tahun. Dengan di gantinya Hari jadi Kabupaten Tangerang ini akan memberikan kepastian hukum, keterbukaan publik, kejelasan, dan informasi yang akurat.

I.d. Pelaksanaan Hari Jadi Ke-388

Tahun 2020 adalah tahun pertama Pemerintah Kabupaten Tangerang merayakan hari jadi-nya yang ke-388. Ini setelah pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-388 Kabupaten Tangerang dirayakan berbeda dari tahun sebelumnya. Di tengah pandemi Covid-19 ini dirayakan cukup sederhana di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

Berbagai kegiatan besar dilakukan secara virtual. Sehingga, masyarakat Kabupaten Tangerang dapat mengikutinya dari rumah sesuai protokol kesehatan Covid-19. HUT Kabupaten Tangerang ke-388 Tahun ini bertemakan 'Sejarah Baru, Semangat Baru Lawan Covid-19. Masyarakat dapat menyaksikan dari rumah melalui Channel YouTube https://s.id/Youtube-ikp-diskominfo-tgr.

Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar didampingi Wakil Bupati Mad Romli secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemberian bantuan ini dalam uapaya penanganan dampak ekonomi bagi wirausaha dan karyawan korban PHK.

Dalam kesempatan ini, Bupati Zaki bersama Waki Bupati Mad Romli dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang menucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kabupaten Tangerang selama ini. Tentunya, dukungan masyarakat Kabupaten menjadi motivasi untuk terus membangun Kabupaten Tangerang. Terutama ditengah pandemi Covid-19.

II. Lambang Daerah

Lambang Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan peraturan daerah No.19 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984, yang kemudian disempurnakan dengan peraturan daerah No. 10 Tahun 1987 tanggal 21 Mei 1987. Motto daerah yang terkandung dalam lambang daerah adalah "SATYA KARYA KERTA RAHARJA", artinya " Dengan dasar kesetiaan dan ketaatan



kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai do'a dan kerja keras kita wujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dari segi fisik, material, dan mental sepiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Arti Gambar Lambang Daerah adalah :

a. Bagian atas

- Pucuk perisai 5 buah melambangkan pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Susunan batu merupakan lambang benteng pertahanan yang mengingatkan kita kepada pahlawan rakyat Kabupaten Tangerang.
- Jumlah bata melambangkan Tanggal, Bulan, dan Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945.

b. Bagian Tengah

- Jumlah Butir Padi, Bunga Kapas dan Ruas Bambu melambangkan Tanggal, Bulan, dan Tahun Hari jadi Kabupaten Tangerang.
- Dua puluh tujuh butir padi melambangkan tanggal 27
- Dua belas Bunga Kapas melambangkan Bulan 12
- Empat puluh tiga Ruas Bambu melambangkan Tahun 43

- Topi Bambu melambangkan hasil kerajinan dan hasil Industri dari Kabupaten Tangerang.

c. Bagian Bawah

- Garis putih berombak melambangkan bahwa Kabupaten Tangerang dilintasi oleh sungai-sungai besar.

- Garis Biru Putih berombah melambangkan Laut yang bermakna bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai.

III. Topografi

Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% dengan ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut.

Dataran rendah di Bagian Utara dengan ketinggian berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasarkemis, dan Sepatan. Dataran tinggi dari bagian tengah kearah selatan dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara. Ketinggian wilayah berkisar antara 25 - 85 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan keadaan goelogis, menurut jenis batuannya, Kabupaten Tangerang terdiri dari wilayah dengan jenis batuan Aluvial, Pleistocen Vulcanic Facies, Pliocen sedimentary dan Niocens sedimentary. Sedangkan menurut jenis tanahnya terdiri dari aluvial kelabu tua, asosiasi glei humus rendah dan aluvial kelabu, asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, podsolik kuning, aluvial kelabu, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf

kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan glei humus rendah, serta asosiasi hidromorf kelabu dan paluosol.

III.a. Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Banten berada antara 6 00 – 6 20 Lintang Selatan dan 106 20- 106 43 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta hanya sekitar 30 kilometer, yang bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih satu jam. Kedua wilayah tersebut (Tangerang dan DKI Jakarta), dihubungkan dengan jalur lalu lintas darat bebas hambatan, yaitu Jalan Tol Jakarta – Merak yang merupakan jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang setelah terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang No.51 Tahun 2008, Tanggal 26 November 2008, menjadi 992,28 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 2,84 juta jiwa, yang terdiri atas 29 kecamatan, 246 desa dan 28 kelurahan dengan luas terbesar berada di wilayah Kecamatan Rajeg, yaitu 53,70 kilometer persegi atau sekitar 5,60 persen dari luas wilayah Kabupaten Tangerang.

Sedangkan luas wilayah kecamatan paling kecil adalah Keca-

matan Sepatan, hanya 17,32 kilometer persegi atau sekitar 1,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 3 per-sen dan ketinggian antara 0 – 85 meter diatas permukaan laut.

Di Tangerang, terdapat sejumlah sungai besar dan kecil yang mengalir dari selatan ke arah utara sesuai arah penurunan permukaan tanah. Sungai-sungai yang terdapat di Tangerang ialah; Cisadane, Cidurian Cimanceuri, Cirarab, Kali Angke, dan Pesanggarahan. Selain itu, terdapat sejumlah situ atau danau kecil, yaitu; Situ Cipondoh, Situ Kelapa Dua, Situ Pamulang, Situ Gintung, Situ Garukgak, dan Situ Patrasana.

III.b. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dan kelembaban yang tinggi. Selama tahun 2010, temperatur udara rata-rata mencapai 27,70 Drajat Celcius. Suhu tertinggi pada bulan September, yaitu 34,50 Drajat Celcius dan suhu terendah pada bulan Juli yaitu 23,00 Drajat Celcius. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,0 %.

III.c. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Tangerang bersifat Heterogen, terdiri dari empat etnis, Sunda, Jawa, Betawi, Cina. Dua etnis Sunda dan Jawa merupakan penduduk Mayoritas.

- Kelompok etnis Sunda asal muasalnya berasal dari Sumedang, mereka datang ke Tangerang sekitar tahun 1630-an pada pasca pengempuran kota Batavia oleh pasukan Mataram. Kelompok ini mencapai wilayah Tangerang yang meliputi daerah Cikupa, Pasar Kemis, Curug, Tigaraksa, Legok dan Pagadangan sehingga mereka menetap di daerah tersebut, dengan membawa dan mengembangkan Seni dan Budaya

yang mereka bawa dari daerah priangan.

- Kelompok etnis Jawa mereka datang ke Tangerang sebagai pengikut Fatahilah dari Demak pada tahun 1526 serta kelompok kecil yang gagal mengepung kota Batavia pada tahun 1628. Kelompok ini menetap di wilayah Barat Laut utara menyusuri Pantai Utara Pulau Jawa meliputi tiga kecamatan, yaitu : Mauk, Kresek, dan Rajeg. Dilihat dari segi bahasa dan budaya diperkirakan sebagai keturunan dari sisa-sisa prajurit Mataram, mereka menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Jawa, Kelompok ini pada umumnya hidup sebagai petani dan nelayan.

- Kelompok etnis Betawi diduga mereka masuk dan menetap di Tangerang sejak daerah Tangerang di kuasai konpeni tahun 1659 dan pada waktu itu Belanda masuk ke Batavia. Kelompok ini sebagian besar menempati sepanjang perbatasan Batavia yaitu : wilayah kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, dan Pakuhaji, pada umumnya mereka hidup sebagai petani yang sekaligus sebagai pedagang, mereka merupakan petani buah-buahan karena wilayah mereka relative dekat dengan Batavia, memungkinkan merek menjual hasil peratanian itu ke Batavia. Jati diri budaya mereka tetap dibawa dan dipelihara, baik kesenia maupun budaya serta adat perkawinan mereka yang tetap di pertahankan.

- Kelompok etnis Cina, adanya larangan dari kompeni Belanda untuk orang-orang Cina tinggal di Batavia dan diarahkan ke pesisir, mereka harus berkelompok dalam sebuah kampong, hal ini dimaksudkan agar kompeni mudah mengawasi kegiatan mereka. Orang Cina datang ke Tangerang sukar diketahui dengan pasti setelah Belanda menduduki dan membangun Kota Batavia. Masyarakat cina dapatdigolongkan atas Cinaperanakan dan Cina toto, golongan Cina pernakanorentasi kebudayaan mengarah dan sudah bercampur dengan kebudayaan setempat, seperti pada pemakaian bahasa, makanan

dan lainnya tidak berbeda dengan pribumi tetapi kesenian dan kebudayaannya masih tetap dikembangkan sesuai adat leluhur, seperti Cokek, Barongsai, dan Dayung yang diikuti oleh pribumi. Etnis Cina banyak menempati daerah utara seperti Teluk Naga dan daerah Kosambi.

- Dalam kehidupan sehari-hari orang Sunda berbicara bahasa Sunda dan orang Jawa berbicara bahas Jawa Serang, namun antara kedua etnis ini saling mengerti pergaulan mereka, orang Cina yang menempati daerah Kabupaten Tangerang sangat banyak jumlahnya dan cukup luas penyebarannya, terutama pada jaman colonial dan pola hidup mereka berbaur dengan masyarakat setempat, seperti bertani, berekreasi, seni, budaya, dan perekonomian, khususnya perniagaan.

Dari tahun ke tahun penduduk Cina semakin bertambah. Hasil sensus penduduk pada tahun 1930 menunjukan penduduk Tangerang berjumlah 196.933 jiwa terdiri dari 108.345 jiwa orang Sunda, 86.921 jiwa orang Melayu Batavia, dan 1667 jiwa campuran dari berbagai etnis, termasuk etnis Cina yang cukup banyak jumlahnya.

VI. Kondisi Wilayah Kabupaten Tangerang

1. Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km^2 atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer. Secara adminstratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Banten, wilayah pemerintahan kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan) kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Tangerang

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	PERSENTASE (Km2)(%)
1	Cisoka	26,98	2,81
2	Solear	29,01	3,02
3	Tigaraksa	48,74	5,08
4	Jambe	26,02	2,71
5	Cikupa	42,68	4,45
6	Panongan	34,93	3,64
7	Curug	27,41	2,86
8	Kelapa Dua	24,38	2,54
9	Legok	35,13	3,66
10	Pagedangan	45,69	4,76
11	Cisauk	27,77	2,89
12	Pasar Kemis	25,92	2,7
13	Sindang Jaya	37,15	3,87
14	Balaraja	33,56	3,5
15	Jayanti	23,89	2,49
16	Sukamulya	26,94	2,81
17	Kresek	25,97	2,71
18	Gunung Kaler	29,63	3,09
19	Kronjo	44,23	4,61
20	Mekar Baru	23,82	2,48
21	Mauk	51,42	5,36
22	Kemiri	32,7	3,41
23	Sukadiri	24,14	2,52
24	Rajeg	53,7	5,6
25	Sepatan	17,32	1,81
26	Sepatan Timur	18,27	1,9
27	Pakuhaji	51,87	5,41
28	Teluk Naga	40,58	4,23
29	Kosambi	29,76	3,1
Kabupaten Tangerang		959,61	100

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2020



Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-85 meter diatas permukaan laut, terletak pada 6˚00'-6˚20' Lintang Selatan dan antara 106˚20'-106˚43' Bujur Timur. Berdasarkan posisi Kabupaten Tangerang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor.

Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Lebak

A. Kondisi Demografi

a.1. Kependudukan

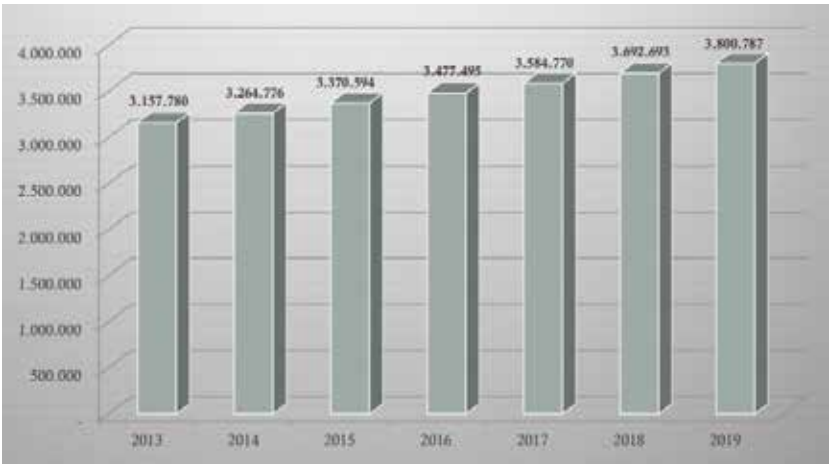
a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2020, Jumlah penduduk

Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 adalah 3.800.787 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2,93 persen bila dibandingkan tahun 2018. (Tabel 2).

Pertumbuhan penduduk ini sekitar 65 persen didominasi oleh kelahiran alami, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor migrasi penduduk ke Kabupaten Tangerang. Ini karena Kabupaten Tangerang merupakan salah satu tujuan para pencari kerja.

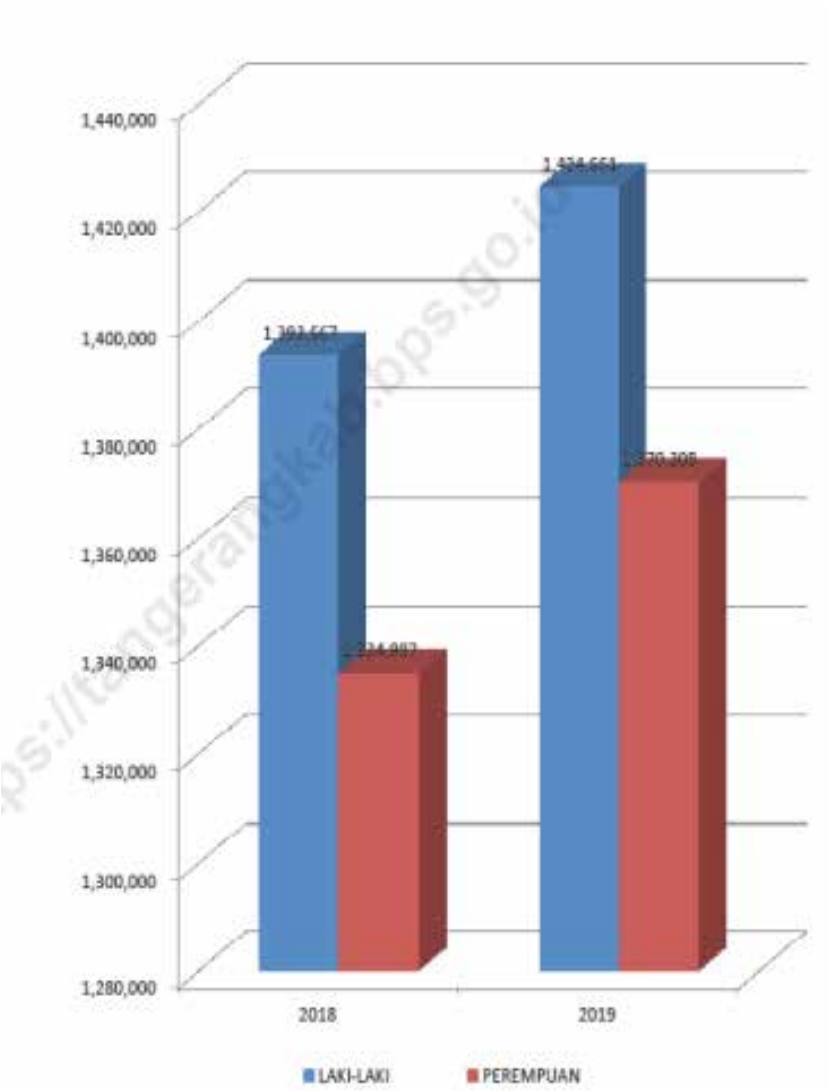
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 2019



Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2020

Dari jumlah itu, populasi penduduk masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Ini terlihat dari angka yang dipaparkan BPS yakni penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.370.308, dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.424.661 jiwa.(Tabel 3)

Tabel 3.Jumlah Penduduk 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2020

Setiap tahunnya jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus meningkat. Kondisi ini sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan data Biro Pusat Statstik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang mencapai



3,01 persen atau 107.000 jiwa. Pada tahun 2018, penduduk berjumlah 3.692.693 jiwa (data BPS). Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,01 persen, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang menjadi 4 juta jiwa.

Dalam periode 2018-2019 Kabupaten Tangerang mengalami Pertumbuhan penduduk sebesar 2,43 persen. Angka laju Pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Mekar Baru sebesar 8,27 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Curug sebesar 0,27 persen. tabel 4.

Tabel.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2019

KECAMATAN	PENDUDUK	LAJUPERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2018-2019
CISOKA	79. 765	3,92
SOLEAR	79. 600	6,05
TIGARAKSA	138. 130	3,87
JAMBE	44. 965	3,77
CIKUPA	189. 643	0,51
PANONGAN	108. 371	4,11
CURUG	152. 411	0,27
KELAPA DUA	151. 513	1,81
LEGOK	106. 060	4,70
PAGEDANGAN	88. 649	2,17
CISAUK	74. 250	3,13
PASAR KEMIS	233. 810	(0,62)
SINDANG JAYA	80. 991	4,19
BALARAJA	109. 842	0,83
JAYANTI	60. 135	1,97
SUKAMULYA	61. 840	1,42
KRESEK	61. 594	3,61
GUNUNG KALER	45. 659	5,62
KRONJO	51. 811	1,90
MEKAR BARU	34. 908	8,27
MAUK	79. 511	0,84
KEMIRI	42. 809	5,19
SUKADIRI	57. 055	2,64
RAJEG	141. 480	3,07
SEPATAN	93. 337	2,84
SEPATAN TIMUR	86. 987	4,33
PAKUHAJI	104. 860	3,46
TELUKNAGA	135. 682	5,13
KOSAMBI	99. 301	(2,89)
KABUPATEN TANGERANG		
HASIL REGISTRASI	2.794.969	2,43
HASIL PROYEKSI	3.800.787	2,93

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2020



b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang terpusat di Kecamatan Pasar Kemis. Pada Tahun 2019 sekitar 8,37 persen penduduk Kabupaten Tangerang bertempat tinggal di kecamatan tersebut, dengan kepadatan penduduk dalam kilometer persegi sebanyak 9.020,45 jiwa.

Sedangkan Kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk terendah adalah Kecamatan Mekar Baru persentase 1,25 persen dengan kepadatan penduduk 1.465,49 per kilometer persegi. Kendati demikian, dalam tingkat sebaran penduduk setiap kilometernya, wilayah yang kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Tangerang adalah Kecamatan Kemiri dengan 1.309,14 per kilometer persegi. (Tabel 5).

Tabel.5.Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN	PERSEBARAN PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK /KM2
Cisoka	2,85	2.956,45
Solear	2,85	2.743,88
Tigaraksa	4,94	2.834,02
Jambe	1,61	1.728,09
Cikupa	6,79	4.443,37
Panongan	3,88	3.102,52
Curug	5,45	5.560,42
Kelapa Dua	5,42	6.214,64
Legok	3,79	3.019,07
Pagedangan	3,17	1.940,23
Cisauk	2,66	2.673,75
Pasar Kemis	8,37	9.020,45
Sindang Jaya	2,90	2.180,11
Balaraja	3,93	3.273,00
Jayanti	2,15	2.517,16
Sukamulya	2,21	2.295,47
Kresek	2,20	2.371,74
Gunung Kaler	1,63	1.540,97
Kronjo	1,85	1.171,40
Mekar Baru	1,25	1.465,49
Mauk	2,84	1.546,30
Kemiri	1,53	1.309,14
Sukadiri	2,04	2.363,50
Rajeg	5,06	2.634,64
Sepatan	3,34	5.388,97
Sepatan Timur	3,11	4.761,19
Pakuhaji	3,75	2.021,59
Teluknaga	4,85	3.343,57
Kosambi	3,55	3.336,73
Kabupaten Tangerang		
Hasil Registrasi	100,00	2.912,61
Hasil Proyeksi	100,00	3.960,76

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2020

c. Hari Jadi Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang berdiri 27 Desember 1943 berdasarkan keputusan Syuutyookan (Pemerintah Pendudukan Militer Jepang) di Jakarta, yang dimuat dalam berita Kempo (berita pemerintah) tentang kepindahan Jakarta ken kakuso ke Tangerang. Pembentukan status Tangerang sebagai Kabupaten pada 27 Desember 1943 adalah semata-mata untuk kelancaran urusan pemerintahan, karena Pemerintah Kabupaten Jakarta dianggap tidak efektif untuk membawahi.

Sebelum menjadi kabupaten, Tangerang berada di bawah pemerintahan militer Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu : Wilayah Sumatera berada di bawah kekuasaan tentara ke-25 Angkatan Darat, yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wilayah Jawa, Madura dan Bali berada di bawah kekuasaan tentara ke 16 Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Sedangkan wilayah Indonesia Bagian Timur yang meliputi, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku berada di bawah kekuasaan Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut.

Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, pengelolaan pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Selanjutnya, undang-undang tersebut menjadi pedoman pokok dari peraturan tata negara di masa lalu. Pada akhir tahun 1943, barulah status Tangerang ditetapkan menjadi Kabupaten.

Sedangkan Lambang Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan peraturan daerah No.19 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984, yang kemudian disempurnakan dengan peraturan daerah No. 10 Tahun 1987 tanggal 21 Mei 1987. Motto daerah yang terkandung dalam lambang daerah adalah “SATYA KARYA KERTA RAHARJA”, artinya “ Dengan dasar kesetiaan dan

ketaatan kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai do'a dan kerja keras kita wujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dari segi fisik, material, dan mental sepiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".paten Tangerang

c.1. Perda Hari Jadi Kabupaten Tangerang

Pada Rabu 31 Juli 2019, rapat paripurna DPRD Kabapaten Tangerang menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang berubah dari tanggal 27 Desember menjadi tanggal 13 Oktober. Dengan ditetapkannya tanggal 13 Oktober sebagai hari jadi Kabupaten Tangerang pada tahun 2019, berarti usia Kabupaten Tangerang menjadi 387 tahun. Penetapan hari Jadi Kabupaten Tangerang ini ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang.

Sebelumnya, Hari Jadi Kabupaten Tangerang jatuh pada tanggal 27 Desember 1943. Penetapan tanggal ini berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 1984. Dasar yang digunakan dalam Perda ini adalah pemberian kekuasaan Pemerintah Pendudukan Jepang kepada Bupati Tangerang saat itu. Namun berdasarkan fakta sejarah serta hasil diskusi yang dilakukan sejumlah budayawan, akademi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang, di yakini Kabupaten Tangerang telah jauh berdiri sebelum Republik Indonesia lahir.

Perubahan hari jadi ini sendiri didasarkan dari hasil kajian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang yang melihat ketidakwajaran perbedaan usia Balaraja yang lebih tua dari pada usia Kabupaten Tangerang. Selain itu, Disporabudpar bersama sejumlah ahli telah membuat naskah kajian akademik tentang perubahan Hari Jadi ini yang bersumber dari penelitian pakar sejarah dari Universitas Padjajaran (Unpad). Penelitian sendiri dilakukan

tidak saja pada manuskrip yang ada di dalam negeri, tetapi juga bukti lain berupa manuskrip dan sejumlah catatatan sejarah yang kini tersimpan di meseum Belanda.

Pemkab Tangerang selama proses penelitian Hari Jadi, menggandeng sejarawan dari Universitas Padjajaran Bandung dan sejarawan Banten untuk mengkaji keaslian buku tersebut.

Tidak hanya diteliti, dilakukan juga perbandingan dan kolaborasi data dengan berbagai data sejarah dari Banten, Sumedang, dan Belanda, sebagai bukti otentik lainnya yang mana isi data saling sinkron, menguatkan, dan saling melengkapi.

Bukti sejarah yang ada di dalam negeri yang digunakan sebagai pegangan adalah naskah tulisan tangan atau manuskrip yang dimiliki keluarga keturunan salah satu pendiri Tangerang, Raden Aria Wangsakara. Manuskrip itu terhimpun dalam buku Paririmbon Ka-Aria-an Parahyang tahun 1830 Masehi yang disusun oleh Bale Adat Kaum Parahyang, semacam Dinas Arsip di masa pemerintahan terdahulu.

Paririmbon Ke-Aria-an Parahijang menyebutkan, pada Rebo Pon ba'da Mulud 1042 atau 13 Oktober 1632 masehi, Sultan Banten memberikan perintah kepada tiga bangsawan. Ketiga bangsawan itu masing-masing Raden Aria Maulana Yudha Negara, Raden Aria Jayasentika dan Raden Aria Wangsakara, untuk membuka perkampungan baru di wilayah antara Cisadane dan Cidurian. Wilayah tersebut belakangan dikenal sebagai wilayah Lengkong Sumedang. Wilayah Lengkong Sumendang di bawah pimpinan Aria Wangsakara inipun berkembang pesat dan memiliki struktur pemerintah sendiri. Kelak, wilayah Lengkong Sumedang ini dikenal sebagai wilayah Keariaan Tanggerang. Lama kelamaan, Keariaan Tanggeran berubah lafal menjadi Tangerang.

Berdasarkan fakta ini, Pemkab Tangerang menerbitkan Perda

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tangerang, yang menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tangerang jatuh pada 13 Oktober, bertepatan saat Sultan Banten memberikan perintah kepada tiga bangsawan untuk membuka wilayah baru tersebut.

c.2. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang Ke-388

Peringatan Hari Jadi ke-388 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada hari Selasa 13 Oktober 2020 ditengah pandemi COVID-19 dilakukan secara sederhana di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dengan di ikuti seluruh OPD, Kecamatan dan Masyarakat melalui Virtual.

Rangkaian acara ini yakni pembaca naskah sejarah Kabupaten Tangerang di bacakan oleh Pemuda Prestasi Kab Tangerang Dede Zulhaj dan Dwi Saleha kemudia Sambutan Tokoh Masyarakat di bacakan oleh Dr.H. Mas Imam Kusnandar, MH. M.Si.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Sejarah Baru Semangat Baru Melawan COVID-19 menjadi Tema dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang Ke-388 Tahun.

Perayaan kali ini tidak seperti biasanya dilakukan secara sederhana mengingat kondisi sedang pandemi virus corona yang melanda Negeri ini termasuk Kabupaten Tangerang.

Bupati Zaki juga mengucapkan, Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat yang sudah bekerjasama dalam pembangunan, tentu ini menjadi semangat dan motivasi bagi kita dalam membangun Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang.

Dengan semangat kita bersama yakni One Team, One Spirit, One Goal, saya merasa yakin Kabupaten Tangerang akan terus mampu untuk membuktikan komitmen nyata, berbagai prestasi

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tangerang saat ini patut untuk disyukuri masih bisa kami pertahankan dan berhasil dicapai ditahun ini.

" Semoga diusia ke-388 visi Tangerang yang RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA ini diwujudkan secara bersama-sama dengan semangat one team, one spirit, one goal,"ucapnya.

c.3. Arti Logo Hari Jadi Kabupaten Tangerang Ke-388

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-388 sungguh sangat spesial. Selain Tahun 2020 merupakan peringatan pertama yang diselenggarakan pada 13 Oktober, peringatan HUT kali ini juga dilaksanakan sederhana lantaran adanya pandemi Covid-19. Kendati demikian, Desainer Grafis Pelaksana dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Ahmad Taufiq Jamaludin, dengan dibawah bimbingan Ketua panitia HUT yang diketuai H. Achmad Suryawijaya, membuat logo yang sangat menarik dan syarat makna.

Logo yang dibuat Ahmad Taufiq Jamaludin ini sudah sesuai dengan ketentuan dan estetika yang dipadukan dengan sejarah dan icon Kabupaten Tangerang. Mulai dari aspek sejarah dan estetika disesuaikan dengan tema kondisi saat ini.

Berikut makna warna dan simbol Logo Hari Jadi Ke-388 Kabupaten Tangerang

Makna Warna sebagai berikut:

- Hijau : Melambangkan pertanian dan ketahanan pangan.
- Biru : Melambangkan ketahanan kesehatan dan cita-cita luhur.

- Orange : Melambangkan semangat dan kreativitas.
- Kuning : Melambangkan gemilang dan kesejahteraan.
- Ungu : Melambangkan kedewasaan dan khas Kabupaten Tangerang.
- Merah : Melambangkan ketegasan dan perjuangan.
- Coklat : Melambangkan kesederhanaan dan kesuburan.
- Abu-abu : Melambangkan keseriusan, kestabilan, kemandi rian, dan
- Hitam : Melambangkan persatuan dan kesolidan.

Adapun makna simbol-simbol sebagai berikut:

- Angka 388 : Terbentuk dari jenis huruf tipe handwriting yang bergelombang, tersusun dari beberapa objek kurva, melambangkan dinamisasi pembangunan dan proses perjalanan sejarah. Pada angka 3 terdiri dari warna hijau dan biru dengan kurva membentuk gelombang, melambangkan Kabupaten Tangerang memiliki sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai modal ketahanan pangan. Pada setiap angka 8, terbentuk dari kurva dan gelombang simbol tak terhingga (infinity) melambangkan harapan perjalanan panjang dan keabadian.
- Tugu 3 Aria : Sebagai landmark iconic Kabupaten Tangerang yang melambang Tiga Aria sebagai Tokoh Sejarah Pendiri Kabupaten Tangerang.
- Garis Benteng : Benteng sebagai lambang pertahanan yang mengingatkan kita kepada perjuangan rakyat Kabupaten Tangerang. Benteng juga menjadi icon Tangerang yang tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Tangerang.

- Slogan : "Sejarah Baru, Semangat Baru Lawan COVID-19" mengandung makna bahwa Hari Jadi Ke-388 tahun (13 Oktober 1632) merupakan hasil kajian sebagai pencatatan Sejarah baru Kabupaten Tangerang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini menjadikan momen sebagai Semangat Baru serta semangat perjuangan melawan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sedang melanda negeri ini.



BAB II

VISI MISI DAN PROGRAM STRATEGIS

A. Visi Misi Kabupaten Tangerang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025, visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kabupaten Tangerang sebagai berikut : " Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani ". Adapun yang dimaksud dengan :

Daya Saing (Competitive Forces)

Daya Saing adalah Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Daya Saing Daerah; kemampuan perekonomian

daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan perkembangan perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam serta potensi daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, kinerja pemerintahan dan kebijakan pemerintah, manajemen dan ekonomi makro.

Masyarakat Madani (Civil Society)

Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan mahluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaran/kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

B. RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan tahun pertama perencanaan 2018, merupakan tahap III (ketiga) RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan satukesatuan dalam sistem perencanaan pemba-

ngunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Bupati dan Wakil Bupati Tangerang masa bakti periode Tahun 2018-2023 telah dilantik pada tanggal 7 September 2018. Maka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-5896 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten, Nomor 131-36-5897 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tangerang Provinsi Banten dan Nomor 131.36- 5898 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tangerang Provinsi Banten, maka melekatlah kewajiban untuk menyusun RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode Tahun 2018-2023, A Zaki Iskandar-H Mad Romli, memiliki visi dan misi yang tentunya semua ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu : " Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera".

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa:

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut.

2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi. Enam misi pembangunan daerah itu yakni;

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW).

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Di samping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahan



pangan, dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data base yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan RTRW.

Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah,

meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster UKM, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

C. Rencana Strategis Pembangunan 2019-2023

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan tahapan keempat RPJPD, yaitu tahap usaha peningkatan berkelanjutan. Tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Strategi yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

- Meningkatkan kualitas SDM.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

- Mengendalikan rencana tata ruang wilayah.

- Mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

Tabel.6. Tema Pembangunan Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera" dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan, dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dilakukan dalam lima tahap, mulai tahun 2019 hingga tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019, difokuskan pada pemantapan infrastruktur, penguatan daya saing serta peningkatan sistem tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam sebilan kebijakan yakni (1) Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemi-

traan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial; (2) Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat; (3) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha; (5) Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman; (7) Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan; (8) Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah dan ; (9) Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi.

Tahun 2020, pembangunan diarahkan dengan mengembangkan inovasi daerah dan ekonomi kreatif serta membangun ketahanan pangan berbasis kewilayahan. Ada sembilan arah kebijakan pembangunan tahun ini. Kesembilah arah kebijakan itu yakni (1) Menerapkan ekstrakulikuler keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal; (2) Mengoptimakan Puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK); (3) Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan; (4) Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur; (5) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis masyarakat; (6) Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak; (7) Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya ;(8) Meningkatkan sarana dan prasarana

lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan; dan (9) Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi.

Tahun 2021 kebijakan pembangunan diarahkan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ada sembilan arah kebijakan untuk tahun ini. Kesembilan kebijakan itu yakni (1) Meningkatkan pembinaan masyarakat akan nilai luhur kebangsaan dan Kerukunan antar umat beragama; (2) Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi difasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta pembangunan rumah sakit; (3) Menegakkan Perda dan/atau Perkada dengan cara Preemtif, Preventif dan Represif; (4) Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknologi tepat guna; (5) Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (6) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri; (7) Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan; (8) Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes; dan (9) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar dan penunjang arus ekonomi.

Kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan pada peningkatan produktivitas usaha ekonomi produktif dan penguatan daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Ada sembilan kebijakan yang dibuat. Ke sembilan kebijakan itu yakni (1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan serta jaminan kesehatan; (2) Meningkatkan imple-

mentasi inovasi OPD; (3) Meningkatkan pengembangan produk lokal dan unggulan daerah; (4) Meningkatkan peran BUMD dan BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi daerah. (5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga; (6) Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang terintegrasi; (7) Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro; (8) Penguatan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dan berbasis teknologi; dan (9) Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan perlengkapan jalan serta manajemen rekayasa lalu lintas.

Kebijakan pembangunan tahun 2023 akan diarahkan pada peningkatan fungsionalisasi dan integrasi infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini, hanya ada enam rincian arah kebijakan, yakni (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan fungsionalisasi Puskesmas DTP dan rumah sakit; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dalam menciptakan sekolah yang ramah anak dan berkarakter spiritulitas; (3) Meningkatkan produk lokal yang berdaya saing dan unggulan daerah yang mendukung peningkatan usaha mikro; (4) Pemantapan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dengan sistem yang terintegrasi; (5) Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya; dan (6) Berfungsinya infrastruktur pendukung kepariwisataan. (Lihat: Tabel 7)

1. Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan visi Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing

Tabel.7. Arah Kebijakan Pembangunan 2019-2023

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2019-2023

2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan social.	1.Menerapkan Ekstra kulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP- dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal.	1. Meningkatkan pembinaan masyarakat akan nilai luhur kebangsaan dan Kerukunan antar umat beragama.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan serta Jaminan Kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan fungsionalisasi Puskesmas DTP dan Rumah Sakit.
2.Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat.	2. Mengoptimakan Puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK).	2. Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta pembangunan Rumah Sakit.	2. Meningkatkan implementasi inovasi OPD.	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dalam menciptakan sekolah yang ramah Anak dan berkarakter spiritulitas.
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan.	3. Menegakkan Perda dan/ atau Perkada dengan cara Preemtif, Preventif dan Represif.	3. Meningkatkan Pengembangan Produk Lokal dan Unggulan Daerah.	3. Meningkatkan produk lokal yang berdaya saing dan unggulan daerah yang mendukung peningkatan usaha mikro.
4. Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha.	4. Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur.	4. Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna.	4. Meningkatkan peran BUMD dan BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi daerah.	4. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dengan system yang terintegrasi.
			5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga.	5. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya.
			6. Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang terintegrasi.	

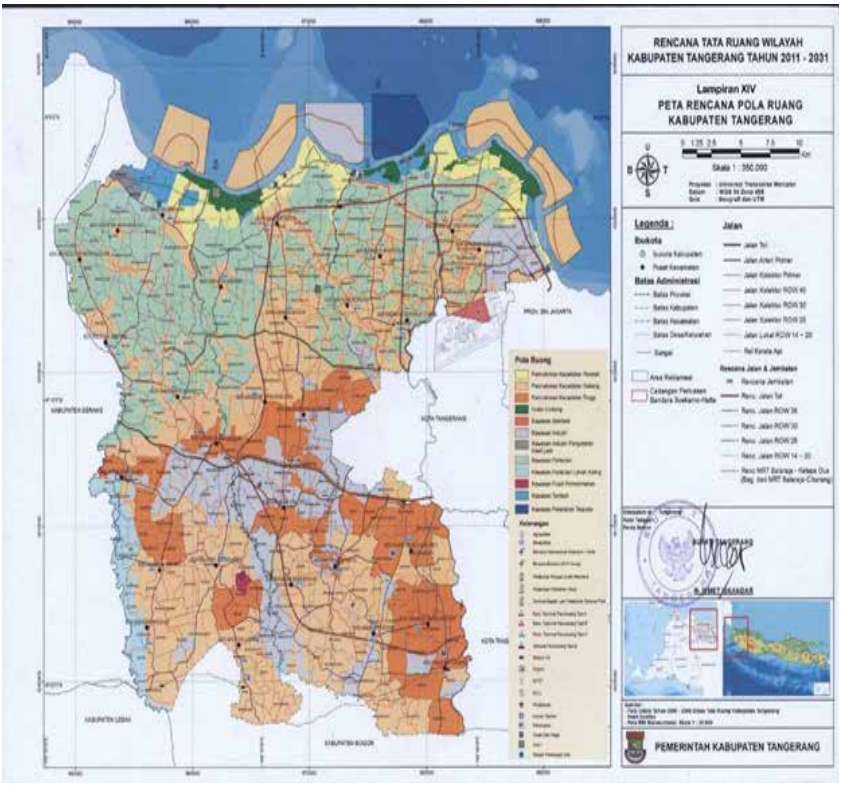
2019	2020	2021	2022	2023
5. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman.	5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat.	5. Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	7. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro.	6. Berfungsinya infrastruktur pendukung kepariwisataan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.	6. Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak.	6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri.	8. Penguatan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dan berbasis teknologi.	
7. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.	7.Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya.	7. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.	9.Meningkatkan Kapasitas infrastruktur jalan dan Perlengkapan Jalan serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	
8.Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah.	8.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan.	8.Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes.		
9.Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi.	9.Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi.	9.Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar dan penunjang arus ekonomi		

Sumber:Bappeda Kabupaten Tangerang

menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang secara geografis terletak pada koordinat 106˚20'–106˚44' Bujur Timur dan 5˚58'–6˚21' Lintang Selatan, dengan luas daratan kurang lebih 103.012 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas kurang lebih 9.000 hektar, dengan garis pantai kurang lebih 51 kilometer.

Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani, didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Maka kebijakan penataan ruang yang dimaksud ialah:



a. Pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional.

b. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanankawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

c. Pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan.

d. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan,

e. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

1.1. Strategi Penataan Ruang

Tujuan strategi penataan ruang ialah untuk mewujudkan Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun strategi penataan ruang sebagai berikut :

a. Strategi pengembangan kawasan industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah meliputi :

    1. Mempersiapkan ruang kawasan industri Kabupaten Tangerang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.

    2. Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung kawasan industri dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.

b. Strategi pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian.

2. Mewujudkan pusat–pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tangerang.

3. Mengembangkan fungsi pusat–pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya.

4. Meningkatkan intensitas pembangunan permukiman ditiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.

5. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Tangerang dan

6. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.

c. Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura meliputi:

   1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan reklamasi sepanjang pantai Utara Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.

   2. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai Utara dengan wilayah daratan Kabupaten Tangerang.

d. Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan, kawasan minapolitan dan kawasan agropolitan di bagian Utara wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:

1. Menetapkan kawasan pertanian yang berkelanjutan untuk menunjang keberadaan kawasan permukiman dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tangerang.

2. Menetapkan kawasan minapolitan di wilayah bagian utara Kabupaten Tangerang.

3. Menetapkan kawasan agropolitan di wilayah bagian tengah Kabupaten Tangerang dan

4. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.

e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara meliputi:

1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan dan keamanan negara.

2. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara.

3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan kemanan negara dengan kawasan budi daya terbangun.

4. Membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

2.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

a. Kebijakan sistem perkotaan Kabupaten Tangerang meliputi:

1. PKN meliputi kawasan Jabodetabek-Punjur.

2. PKN dalam RTRW Provinsi Banten meliputi kawasan perkotaan di Kabupaten Tangerang.

b. Kawasan perkotaan meliputi:

1. Kawasan perkotaan Tigaraksa

2. Kawasan perkotaan Teluknaga

3. Kawasan perkotaan Balaraja

c. Kawasan perkotaan Teluknaga, meliputi Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Mauk.

d. Kawasan perkotaan Balaraja, meliputi Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Jambe.

e. Kawasan perkotaan Tigaraksa, meliputi Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Curug.

f. PKL dalam RTRW Provinsi meliputi :

1. PKL perkotaan Kecamatan Kronjo meliputi kawasan perkotaan Kemiri, kawasan perkotaan Kresek, kawasan perkotaan Mekar Baru dan kawasan perkotaan Gunung Kaler;

2. PKL perkotaan Kecamatan Tigaraksa meliputi kawasan perkotaan Jayanti, kawasan perkotaan Cisoka, kawasan perkotaan Solear dan kawasan perkotaan Jambe; dan

3. PKL perkotaan Kecamatan Pagedangan meliputi kawasan perkotaan Curug, kawasan perkotaan Panongan, kawasan perkotaan Cikupa, kawasan perkotaan Legok, kawasan

perkotaan Kelapa Dua dan Kawasan perkotaan Cisauk.

2.2. Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai PPK, meliputi :

1. PPK kawasan perkotaan Tigaraksa;
2. PPK kawasan perkotaan Panongan;
3. PPK kawasan perkotaan Pasar Kemis;
4. PPK kawasan perkotaan Cikupa;
5. PPK kawasan perkotaan Curug;
6. PPK kawasan perkotaan Kelapa Dua;
7. PPK kawasan perkotaan Pagedangan;
8. PPK kawasan perkotaan Rajeg;
9. PPK kawasan perkotaan Pakuhaji;
10. PPK kawasan perkotaan Teluknaga;
11. PPK kawasan perkotaan Kosambi;
12. PPK kawasan perkotaan Cisoka;
13. PPK kawasan perkotaan Cisauk;
14. PPK kawasan perkotaan Balaraja
15. PPK kawasan perkotaan Sepatan Timur;
16. PPK kawasan perkotaan Legok;
17. PPK kawasan perkotaan Kresek;

18. PPK kawasan perkotaan Mauk;

19. PPK kawasan perkotaan Solear;

20. PPK kawasan perkotaan Sindang Jaya;

21. PPK kawasan perkotaan Sukamulya;

22. PPK kawasan perkotaan Sepatan;

23. PPK kawasan perkotaan Jambe;

24. PPK kawasan perkotaan Jayanti;

25. PPK kawasan perkotaan Gunung Kaler;

26. PPK kawasan perkotaan Kronjo;

27. PPK kawasan perkotaan Mekar Baru;

28. PPK kawasan perkotaan Kemiri;

29. PPK kawasan perkotaan Sukadiri.

2.2.1. Fungsi dari setiap sistem perkotaan meliputi:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Teluknaga berfungsi sebagai pusat pengembangan pemukiman, industri, pariwisata, perdagangan jasa, dan agropolitan;

b. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Balaraja berfungsi sebagai pusat pengembangan industri, pemukiman, perdagangan jasa, kesehatan dan pendidikan;

c. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tigaraksa berfungsi sebagai pusat pengembangan pemukiman perkotaan, pendidikan, olahraga, perdagangan jasa;

d. PKL Perkotaan Kronjo berfungsi sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil laut, pusat kegiatan perikanan dan peternakan;

e. PKL Perkotaan Tigaraksa berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan jasa, industri, permukiman, kesehatan dan pendidikan;

f. PKL Perkotaan Pagedangan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman kepadatan tinggi, pendidikan dan peruntukan industri;

g. Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai PPK, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kecamatan:

   1) Pelayanan pemerintahan

   2) Pelayanan pemukiman

   3) Pelayanan IKM dan UMKM

   4) Pelayanan kesehatan

   5) Pelayanan pendidikan

   6) Pelayanan hasil pertanian

   7) Pelayanan perdagangan jasa

2.2.2. PPL yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi:

   a. PPL Desa Caringin di Kecamatan Cisoka

   b. PPL Desa Cisoka di Kecamatan Cisoka

   c. PPL Desa Pesanggrahan di Kecamatan Solear

d. PPL Desa Solear do Kecamatan Solear

e. PPL Desa Pasir Nangka di Kecamatan Tigaraksa

f. PPL Desa Sodong di Kecamatan Tigaraksa

g. PPL Desa Taban di Kecamatan Jambe

h. PPL Desa Taparraya di Kecamatan Jambe

i. PPL Desa Daru di Kecamatan Jambe

j. PPL Desa Sukadamai di Kecamatan Cikupa

k. PPL Desa Cikupa di Kecamatan Cikupa

l. PPL Desa Bojong di Kecamatan Cikupa

m. PPL Desa Ciakar di Kecamatan Panongan

n. PPL Desa Ranca Iyuh di Kecamatan Panongan

o. PPL Desa Kadu di Kecamatan Curug

p. PPL Desa Curug Wetan di Kecamatan Curug

q. PPL Desa Legok di Kecamatan Legok

r. PPL Desa Serdang Wetan di Kecamatan Legok

s. PPL Desa Medang di Kecamatan Pagedangan

t. PPL Desa Lengkong Kulon di Kecamatan Pagedangan

u. PPL Desa Suradita di Kecamatan Cisauk

v. PPL Desa Cibogo di Kecamatan Cisauk

w. PPL Desa Gelam Jaya di Kecamatan Pasar Kemis

x. PPL Desa Sukamantri di Kecamatan Pasar Kemis

y. PPL Desa Wana Kerta di Kecamatan Sindang Jaya

z. PPL Desa Sindang Sono di Kecamatan Sindang Jaya

aa. PPL Desa Saga di Kecamatan Balaraja

bb. PPL Desa Telagasari di Kecamatan Balaraja

cc. PPL Desa Cikande di Kecamatan Jayanti

dd. PPL Desa Jayanti di Kecamatan Jayanti

ee. PPL Desa Kaliasin di Kecamatan Sukamulya

ff. PPL Desa Sukamulya di Kecamatan Sukamulya

gg. PPL Desa Kresek di Kecamatan Kresek

hh. PPL Desa Kemuning di Kecamatan Kresek

ii. PPL Desa Ranca Gede di Kecamatan Gunung Kaler

jj. PPL Desa Gunung Kaler di Kecamatan Gunung Kaler

kk. PPL Desa Kronjo di Kecamatan Kronjo

ll. PPL Desa PAsilian di Kecamatan Kronjo

mm. PPL Desa Pasir di Kecamatan Kronjo

nn. PPL Desa Kosambi Dalam di Kecamatan Mekar Baru

oo. PPL Desa Gandaria di Kecamatan Mekar Baru

pp. PPL Desa Kedung Dalem di Kecamatan Mauk

qq. PPL Desa Marga Mulya di Kecamatan Mauk

rr. PPL Desa Kemiri di Kecamatan Kemiri

ss. PPL Desa Kelebet di Kecamatan Mauk

tt. PPL Desa Kedung Dalem di Kecamatan Mauk

uu. PPL Desa Kosambi di Kecamatan Sukadiri

vv. PPL Desa Gintung di Kecamatan Sukadiri

ww. PPL Desa Mekarsari di Kecamatan Rajeg

xx. PPL Desa Sukamanah di Kecamatan Rajeg

yy. PPL Desa Lembangsari di Kecamatan Rajeg

zz. PPL Desa Karet di Kecamatan Sepatan

aaa. PPL Desa Pisangan Jaya di Kecamatan Sepatan

bbb. PPL Desa Kedaung Barat di Kecamatan Sepatan Timur

ccc. PPL Desa Lebak Wangi di Kecamatan Sepatan Timur

ddd. PPL Desa Kramat di Kecamatan Pakuhaji

eee. PPL Desa Kiarapayung di Kecamatan Pakuhaji

fff. PPL Desa Pengkalan di Kecamatan Teluknaga

ggg. PPL Desa Teluknaga di Kecamatan Teluknaga

hhh. PPL Desa Babakan Asem di Kecamatan Teluknaga

iii. PPL Desa Rawa Burung di Kecamatan Kosambi

jjj. PPL Desa Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi

2. Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana wilayah

Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya.

2.1. Sistem Jaringan Transportasi.

Sistem jaringan transportasi meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

2.2. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

2.3. Sistem Jaringan Jalan

a. Jaringan jalan nasional;

b. Jaringan jalan provinsi;

c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;

d. Terminal penumpang;

e. Terminal barang; dan

f. jembatan jembatan timbang.

2.5. Jaringan jalan nasional, meliputi :

a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi :

a.1. Peningkatan ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 kilometer.

a.2. Peningkatan ruas Jalan Pamulang–Maja yang melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear.

b. Jaringan jalan tol meliputi :

b.1. Peningkatan jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;

b.2. Rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi– Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;

b.3. Rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;

b.4. Rencana ruas jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Balaraja.



b.5. Rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk kearah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja;

b.6. Rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar kearah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa;

b.7. Rencana ruas jalan tol Semanan – Rajeg – Balaraja;

b.8. Rencana ruas jalan tol prospektif yang terhubung ke Jalan Tol Serpong-Balaraja; dan

b.9. Rencana simpang susun jalan tol.

2.4. Jaringan Jalan Provinsi

Jaringan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer yang meliputi:

a. Rencana peningkatan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi,

Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.

b. Rencana peningkatan ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;

c. Rencana peningkatan ruas jalan Malang Nengah–Ranca Kelapa–Kutruk– Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 kilometer;

d. Rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 kilometer; dan

e. Rencana peningkatan ruas jalan Bitung–Curug–Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan Panjang kurang lebih 18 kilometer;

f. Rencana pengembangan angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)

2.5. Peningkatan jaringan jalan kolektor (Kewenangan Kabupaten). Rencana jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

a. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

1. Ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 30 meter.

2. Ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 meter.

3. Ruas Jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 meter.

4. Ruas Jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 meter.

5. Ruas Jalan Kronjo–Ceplak-Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo,Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter.

6. Ruas Jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 meter.

7. Ruas Jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 20 meter.

8. Ruas Jalan Kresek–Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 20 meter.

9. Ruas Jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekar Baru dengan ROW 20 meter.

10. Ruas Jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 meter.

11. Ruas Jalan Dangdeur–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 13 meter.

12. Ruas Jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 meter dan;

13. Ruas Jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 meter.

14. Ruas Jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 meter.

15. Ruas Jalan Cikuya–Cikasungka (Bts. Bogor) berada di Kecamatan Solear dengan ROW 20 meter.

16. Ruas Jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 20 meter.

17. Ruas Jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 20 meter.

18. Ruas Jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 20 meter.

19. Ruas Jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 20 meter.

20. Ruas Jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 meter.

21. Ruas Jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 20 meter.

22. Ruas Jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 20 meter.

23. Ruas Jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 11 meter.

24. Ruas Jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 meter.

25. Ruas Jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 meter.

26. Ruas Jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 meter.

27. Ruas Jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 meter.

28. Ruas Jalan Legok-Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 meter.

29. Ruas Jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 meter.

30. Ruas Jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 meter.

31. Ruas Jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 20 meter.

32. Ruas Jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 20 meter.

33. Ruas Jalan Jati Gintung-Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 20 meter.

34. Ruas Jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 meter.

35. Ruas Jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 meter.

36. Ruas Jalan Bayur Sangego–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 meter.

37. Ruas Jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 20 meter.

38. Ruas Jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 meter.

39. Ruas Jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 meter.

40. Ruas Jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 20 meter.

41. Ruas Jalan Bojongrenged–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 meter.

42. Ruas Jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 meter.

43. Ruas Jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 20 meter.



44. Ruas Jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 meter.

45. Ruas Jalan Kukun–Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 meter.

46. Ruas Jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, KecamatanPasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 meter.

47. Ruas Jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 meter

48. Ruas Jalan Karawaci–Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 meter.

49. Ruas Jalan yang melewati Bojong-Peusar-Budimulya di Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 26.

50. Rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah Perumahan Villa Permata di Kecamatan Kelapa Dua.

51. Rencana pengembangan angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT).

52. Rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk.

b. Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Jembatan (Kewenangan Kabupaten) Rencana pembangunan jaringan jalan lokal dan jembatan meliputi :

1. Ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir– Muara–Lemo–Salembaran Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 20 meter.

2. Ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir– Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur– Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 20 meter.

3. Ruas Jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 2 meter.

4. Ruas Jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 20 meter.

5. Ruas Jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 meter.

6. Ruas Jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 meter dan panjang kurang lebih 4 kilometer;

7. Ruas Jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 meter.

8. Ruas Jalan Sampora–Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 meter

9. Ruas Jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 meter;

10. Ruas jalan Ruas jalan Balaraja–Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja–Cikarang melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;

11. Ruas Jalan Kantor Pos - Pasar Gudang di Kecamatan Tigaraksa.

12. Ruas Jalan Ciatuy–Al-Amjad di Kecamatan Tigaraksa.

13. Ruas alan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan.

14. Ruas jalan yang memanfaatkan daerah sempadan sungai.

15. Ruas jalan akses diperluasan Perimeter Utara bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1 yang

melewati Desa Rawa Rengas dan Desa Bojongrenged Kecamatan Teluknaga, Desa Rawa Burung dan Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi.

16. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (AshShobirin) (Kota Tangerang Selatan).

17. Jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 meter;

18. Jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 meter;

19. jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 meter;

20. Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 meter; dan

21. Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 meter.

22. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 meter.

23. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Bitung Jalan Raya Serang di Kecamatan Curug.

24. Pembangunan jembatan layang/flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa.



25. Pembangunan jembatan layang/flyover Stasiun Kereta Api Cisauk di kecamatan Cisauk

26. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua.

27. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Bugel di Kecamatan Tigaraksa.

28. Pembangunan jembatan layang/flyover Balaraja Timur di Kecamatan Balaraja.

29. Pembangunan jembatan layang/flyover Balaraja Barat di Kecamatan Balaraja.

30. Pembangunan jembatan layang/flyover di Kecamatan Tigaraksa.

31. Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja di Kecamatan Balaraja.

32. Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau di Kecamatan Kosambi.

3. Rencana Pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Angkutan Massal Cepat Terpadu Berbasis Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang

3.1. Terminal

a. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kelapa Dua;

b. Peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja;

c. Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cisauk;

d. Optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka dan terminal sentiong di Kecamatan Balaraja menjadi terminal tipe C;

e. Pembangunan terminal penumpang terpadu tipe C di Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Kronjo.

3.2. Terminal Barang

Pembangunan terminal barang meliputi pembangunan terminal barang di Kecamatan Pasar Kemis, pembangunan terminal barang dry port di Kecamatan Jambe.

3.3. Jembatan Timbang

Jembatan timbang berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi.

3.2.Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

a. Pengembangan sistem rel ganda (double track) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok–Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka;

b. Pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe;

c. Pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;

d. Pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekarbaru;

e. Pembangunan MRT dan/atau LRT Balaraja-Cikarang yang melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja;

f. Pembangunan LRT lingkar antara Bandara Soekarno-Hatta-Alam Sutera-BSD City-Sumarecon/Paramount Lippo Karawaci-Citra Raya-Suvarna Padi Cikupa-Kawasan Pantura Teluknaga/Kosambi Bandara Soekarno Hatta;

g. Pengembangan Stasiun Kereta Api Cikuya di Kecamatan Solear, Stasiun Kereta Api Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa dan Stasiun Kereta Api Cicayurdan Stasiun Kereta Api Cisauk di Kecamatan Cisauk menjadi stasiun TOD (Transit Oriented Development); dan

h. Pembangunan Stasiun Kereta Api Balaraja dan Stasiun Kereta Api Tigaraksa sebagai stasiun TOD.



4. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

1. Pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu.
2. Dermaga tambatan kapal nelayan dan penyeberangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu.
3. Dermaga tambatan kapal nelayan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.
4. Rencana Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagai Pelabuhan Pengumpan di Kecamatan Sepatan

5. Rencana Pelabuhan Barang di Kecamatan Teluknaga

5.1. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.



a. Rencana Pembangunan Pelabuhan laut

- Rencana pelabuhan orang dan barang di Kecamatan Teluknaga;
- Rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
- Rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo.
- Rencana lokasi pelabuhan pengumpan lokal Muara Dadap di Kecamatan Kosambi;

b. Alur Pelayaran

Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

1. Bandar Udara

Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai

penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.

- Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga, dan Bandar Udara Soekarno Hatta II yang terletak di pulau reklamasi.
- Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto Curug di Kecamatan Legok.

2. Ruang Udara

Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

a. KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan;Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sindangjaya; dan Kecamatan Cikupa.



b. KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua.

6. Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi terbagi menjadi:

1. **Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Rencana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:**

   a. Pengembangan jaringan pipa gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga melintasi Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka.

   b. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum meliputi:

      - Ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta
      - Ruas jalan Malangnengah–Ranca Kelapa–Kutruk–Tigaraksa
      - Ruas jalan Cisauk–Jaha
      - Ruas jalan Cisauk–Kranggan
      - Ruas jalan Cikupa–Mauk
      - Ruas jalan Karawaci–Legok–Parung panjang
      - Ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol
      - Ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka.

c. Pengembangan jaringan gas Serpong–Merak melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti.

d. Rencana pembangunan jalur pipa transmisi gas melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti.

e. Pengembangan jaringan gas Avtur dari pantai Utara melintasi Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi ke Bandara Soekarno-Hatta.

2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa : pengembangan PLTU Lontar dengan kapasitas 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) megawatt di Kecamatan Kemiri;

b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi :

1. Pengembangan jaringan baru dan/atau SUTET 500 kilovolt yang melintasi Kecamatan Balaraja, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kresek, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan jayanti, Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Sindangjaya.

2. Pengembangan jaringan baru dan/atau pengembangan jaringan SUTT 150 kilovolt yang melintasi Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;

3. Penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan wilayah dan kegiatan.

- Rencana pembangunan PLTU dengan kapasitas 500 megawatt dan pembangunan gardu induk dan/atau pengembangan gardu induk atau instalasi sejenis dengan kapasitas 150 kilovolt dan/atau 500 kilovolt yang berada di Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kemeri, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Mauk, kecamatan Kosambi, Kecamatan Curug, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Kresek.

7. Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Tetap

Rencana jaringan telekomunikasi tetap merupakan jaringan kabel berjenis tembaga atau fiber optik yang dikelola oleh provider/swasta.

a. Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan.

b. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat–pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.

◆ Jaringan Bergerak

Jaringan Bergerak jaringan seluler yang dikelola oleh provider/ swasta.

a. Pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan.

b. Pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) yang tersebar di wilayah kabupaten Tangerang

c. Penetapan zona, jumlah dan lokasi menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan Bupati.

7.1. Rencana pengembangan jaringan tetap meliputi:

a. Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan; dan

b. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat–pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.

7.2. Rencana pengembangan jaringan bergerak meliputi:

a. Pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan; dan

b. Pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) yang tersebar di wilayah kabupaten.

c. Penetapan zona, jumlah dan lokasi menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan Bupati.

8. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1. Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten

a. Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Ciapus; Sungai Ciasin; Sungai Cibarebeg; Sungai Cibiuk/Cilaku; Sungai Cibolang; Sungai Cibugel; Sungai Cicalengka; Sungai Ciconteng; Sungai Cigarukgak; Sungai Cimauk; Sungai Cijantra; Sungai Cikakalen; Sungai Cikolear; Sungai Cileuleus; Sungai Cilongo; Sungai Cilongok; Sungai Cilowong; Sungai Cimaneuh; Sungai Cimanceuri; Sungai Cimatuk; Sungai Ciodeng; Sungai Cipasilian; Sungai Cipayaeun; Sungai Cirajeun; Sungai Cirangon; Sungai Cirumpak; Sungai Cisauk; Sungai Ciselatip; Sungai Cisoge; Sungai Cituis; Kali Ketapang; Kali Kramat; Kali Apung; Kali Asin; dan Sungai Tahang.

8.1. Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten meliputi Sungai Cisadane; dan Sungai Cidurian;

8.2. Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten meliputi Sungai Cicayur; Sungai Cirarab; Sungai Cisabi; dan Kali Perancis.

8.2.1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten

a. Sumber Air

- Wilayah Sungai yang meliputi : Sungai Ciapus, Sungai Ciasin, Sungai Cibarebeg, Sungai Cibiuk/Cilaku; Sungai Cibolang; Sungai Cibugel; Sungai Cicalengka; Sungai Ciconteng; Sungai Cigarukgak; Sungai Cimauk; Sungai Cijantra; Sungai Cikakalen; Sungai Cikolear; Sungai Cileuleus; Sungai Cil-



ongo; Sungai Cilongok, Sungai Cilowong, Sungai Cimaneuh, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimatuk; Sungai Ciodeng; Sungai Cipasilian; Sungai Cipayaeun; Sungai Cirajeun; Sungai Cirangon; Sungai Cirumpak; Sungai Cisauk; Sungai Ciselatip; Sungai Cisoge; Sungai Cituis; Kali Ketapang; Kali Kramat; Kali Apung; Kali Asin; dan Sungai Tahang.

b. Prasarana Sumber Daya Air

◆ Jaringan irigasi, meliputi:

1. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi Daerah Irigasi Cisadane, Daerah Irigasi Cidurian. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi:

   a. Cisadane: Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan mauk, kecamatan kronjo, kecamatan sepatan timur.

   b. Cidurian: kecamatan kemiri, kecamatan kronjo, Kecamatan mekar baru, kecamatan gunung kaler, kecamatan sukamulya, kecamatan kresek.

2. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten yaitu Daerah Irigasi Susukan yang meliputi Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Mekar Baru dan Kecamatan Gunung Kaler.

3. Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui:

   a. Optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian

   b. Perbaikan saluran irigasi

   c. Perbaikan bangunan air.

◆ Sistem pengendalian banjir, meliputi:

1. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase;

2. Normalisasi Sungai Cisadane, Sungai Cirumpak, Sungai Cirarab, Sungai Ciranggon, Sungai Cipayeun, Sungai Cimauk, Sungai Cileuleus, Sungai Cikapadilan, Sungai Ciasin, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai,

3. Pengembangan fungsi dan penataan bantaran Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri

4. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;

5. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir;

6. Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola; dan

7. Pembangunan kolam tandon air direncanakan di wilayah kecamatan rawan banjir meliputi : Kecamatan Kemiri; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Jambe; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Kresek; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Solear; dan Kecamatan Jayanti. Kecamatan Cikupa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Legok; Kecamatan Sukamulya; dan Kecamatan Gunung Kaler;

8.2.2. Sistem jaringan air baku

Sistem jaringan air baku untuk air minum berupa sumber–sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain–lain meliputi:

1. Sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Sungai kecil lainnya.

2. Air tanah dangkal dan air tanah dalam

3. Saluran irigasi

4. Air baku yang berasal dari Waduk Karian di Kabupaten Lebak;

5. Sumber air baku lainnya.

6. Rencana pengembangan Jaringan air baku, meliputi :

a. Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum;

b. Pengendalian penggunaan air tanah dangkal; dan

c. Pembangunan bendungan atau waduk penampung air baku di Kecamatan Pakuhaji dan hulu sungai Cimanceuri diKecamatan Jambe.

8.2.3. Sistem Jaringan Air

Sistem jaringan air ke kelompok pengguna, meliputi:

a. Kelompok Bina Tani Maju

b. Kelompok Rakomas

c. Kelompok Paku Jajar

d. Kelompok Mekar Tani Murni

e. Kelompok Karisma

f. Kelompok Kadu Sarima

g. Kelompok Sri Asih dan

h. Kelompok Cikambunda.

i. Rencana pengembangan system jaringan air ke kelompok pengguna melalui pengembangan dan pemeliharaan jaringan air ke kelompok pengguna dan alih teknologi penggunaan air.

8.2.4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi:

a. Sistem penyediaan air minum (SPAM),

b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)

c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

d. Sistem jaringan persampahan wilayah; dan

e. Sistem jaringan mitigasi dan evakuasi bencana

8.2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

a. SPAM Zona A, melayani sebagian Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Legok, Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;

b. SPAM Zona B, melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;

c. SPAM Zona C, melayani Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Rajeg, Sukamulya, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kemiri dan Sukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; Sungai Cidurian, dan sumber air baku lainnya;

d. SPAM Zona D, melayani kecamatan Cisauk, Pagedangan, Panongan sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;

e. SPAM Zona E, melayani Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Solear, Cisoka, Sukamulya dan Jambe, sumbernya diambil dari Sungai Cidurian; dan Karian Dam serta sumber air baku lainnya.

8.2.4.2. Pengembangan Unit Produksi air minum meliputi:

a. IPA Bojong Renged di Kecamatan Teluknaga

b. IPA Cihuni di kecamatan Pagedangan

c. IPA Cisauk di Kecamatan Cisauk

d. IPA Pakuhaji di Kecamatan Pakuhaji

e. IPA Sepatan di Kecamatan Sepatan

f. IPA Solear dan IPA Swasta di Kecamatan Solear.

8.2.4.3. Pengembangan perpipaan jaringan air minum meliputi: Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Jambe, Kecamatan Sindangjaya.

8.2.4.4. Pengembangan air minum yang dikelola oleh swasta dan atau Badan Pengelola air minum lainnyameliputi Kecamatan Balaraja; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sindang Jaya; dan Kecamatan Sukamulya.

Pengembangan sistem air minum meliputi:

a. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem air minum.

b. Peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya.

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

a. Sistem SPAL meliputi Sistem pengolahan air limbah industri; dan Sistem pengolahan air limbah rumah tanggga (domestik).

b. Sistem pengolahan air limbah industri dilakukan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara individual dan/atau komunal yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan dan pada kawasan industri.

c. Sistem pengolahan air limbah rumah tanggga (domestik) dilakukan baik indiviual maupun komunal.

d. Sistem pengolahan air limbah rumah tanggga (domestik) komunal meliputi Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lebak Wangi di Kecamatan Sepatan Timur; pembangunan IPLT baru di Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Balaraja; pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan perumahan skala besar.



9.1. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Sistem penyimpanan sementara Limbah Berbahaya Beracun (B3) untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh pihak lain yang memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3.

2. Sistem pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.

3. Sistem Penyimpanan sementara Limbah B3 dan sistem pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan.

4. Penghasil limbah B3 yang tidak melakukan penyimpanan limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 tersebut pada pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3nya digunakan sebagai Depo pemindahan limbah B3.

5. Sistem pengumpulan limbah B3 skala kabupaten mencakup pengumpulan limbah B3 yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Tangerang kecuali limbah B3 medis (infeksius) yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Limbah B3 medis (infeksius) yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan harus diserahkan pengelolaannya ke pihak lain berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dimusnahkan melalui fasilitas incenerator.

10. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

1. Pemilahan sampah dimulai dari sumber;

2. Menyiapkan pengelolaan dan pengumpulan sampah yang terhierarki dengan baik;

3. Pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah;
4. Menyiapkan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah perkotaan;
5. Penataan dan peningkatan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk dan Kecamatan Rajeg;
6. Pembangunan TPST secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan;
7. Mewajibkan setiap pengelola kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan industri untuk menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah;
8. Kawasan permukiman, perdagangan dan jasa dan industri sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah kawasan dengan luas lahan lebih dari 50 Ha;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem persampahan;
10. Setiap kawasan permukiman, perdagangan dan jasa dan industri diwajibkan menyediakan fasilitas TPS
11. Peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan.

11. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana berupa jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdiri dari:

1. Kawasan rawan bencana banjir.
2. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim.

3. Kawasan rawan bencana kebakaran.

4. Kawasan rawan bencana gempa bumi.

5. Kawasan rawan bencana kegagalan teknologi.

6. Kawasan rawan bencana kekeringan.

7. Kawasan rawan bencana tsunami.

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana banjir, rawan bencana cuaca ekstrim dan rawan bencana gempa bumi berupa escape way (jalur keluar) dan meeting point (titik kumpul) meliputi jalan kolektor dan jalan lokal di masing-masing kecamatan yang menuju titik kumpul yaitu di tiap kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan lapangan.

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana kebakaran berupa escape way (jalur keluar) dan meeting point (titik kumpul) meliputi jalan kolektor dan jalan lokal di Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, dan Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sepatan yang menuju titik kumpul yaitu di kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan lapangan.

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana kegagalan teknologi berupa escape way (jalur keluar) dan meeting point (titik kumpul) meliputi jalan kolektor dan jalan lokal di Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan

Sindangjaya, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Pagedangan yang menuju titik kumpul yaitu di kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan lapangan.

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana kekeringan berupa jalur distribusi bantuan dan meeting point (titik kumpul) meliputi jalan kolektor dan jalan lokal di tiap Kecamatan yang menuju titik kumpul yaitu di tiap kantor kecamatan.

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana tsunami berupa escape way (jalur keluar) dan meeting point (titik kumpul) meliputi jalan kolektor dan jalan lokal di Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi yang menuju titik kumpul yaitu di kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan lapangan.

12. Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung, meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

b. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung merupakan hutan bakau di wilayah pantai Utara Kabupaten, seluas kurang lebih 1.335,45 (seribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk,



Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.

c. Kawasan resapan air

Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Legok, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Cisauk.

d. Kawasan perlindungan setempat

1. Sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai terdapat di pesisir pantai Utara Kabupaten sepanjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) kilometer mencakup luas areal kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektar meliputi Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo.

2. Sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai meliputi:

a. Sungai besar yang meliputi: Sungai Cisadan, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri.

b. Sungai kecil yang meliputi : Sungai Ciapus, Sungai Ciasin, Sungai Cibarebeg, Sungai Cibiuk/Cilaku, Sungai Cibolang, Sungai Cibugel, Sungai Cicalengka, Sungai Cicayur, Sungai Ciconteng, Sungai Cigarukgak, Sungai Cimauk, Sungai Cijantra, Sungai Cikakalen, Sungai Cikolear, Sungai Cileuleus, Sungai Cilongo, Sungai Cilongok, Sungai Cilowong, Sungai Cimaneuh, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimatuk, Sungai Cipasilian, Sungai Cipayaeun, Sungai Cirajeun, Sungai Cirangon, Sungai Cirarab, Sungai Cirumpak Sungai Cisauk, Sungai Cisabi, Sungai Ciselatip, Sungai Cisoge, Sungai Cituis, Kali Ketapang, Kali Perancis, Kali Kramat, Kali Apung, Kali Asin, Sungai Tahang.

e.1. Kawasan sekitar danau atau situ

Kawasan sekitar danau atau situ meliputi kawasan sempadan danau atau situ dengan luas lebih kurang 880 (delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi:

a. Situ Pondok di Kecamatan Sindangjaya

b. Situ Cilongok di Kecamatan Pasarkemis

c. Situ Pasirgadung di Kecamatan Cikupa

d. Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua

e. Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan

f. Situ Jengkol di Kecamatan Solear

g. Situ Ranca Sumur di Kecamatan Kronjo

h. Rawa Ranca Ilat di Kecamatan Kresek

h. Rawa Waluh di Kecamatan Gunung Kaler

i. Rawa Garukgak di Kecamatan Kresek

j. Rawa Patrasana di Kecamatan Kresek

k. Rawa Gabus di Kecamatan Kresek

l. Rawa Genggong di Kecamatan Kresek

m. Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri

n. Rawa Gede di Kecamatan Sukadiri

o. Rawa Kepuh di Kecamatan Sepatan

p. Rawa Gelam di Kecamatan Pasar Kemis

q. Rawa Warung Rebo di Kecamatan Sindang Jaya

r. Rawa Jambu di Kecamatan Kemiri

e.2. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir;

b. Kawasan rawan cuaca ekstrim;

c. Kawasan rawan kebakaran;

d. Kawasan rawan gempa bumi;

e. Kawasan rawan gagal teknologi;

f. Kawasan rawan kekeringan; dan

g. Kawasan rawan tsunami.

Kawasan rawan banjir meliputi : Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pasarkemis, Kecamatan Mauk, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kronjo.

Kawasan rawan cuaca ekstrim meliputi: Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Solear; Kecamatan Cisoka.

Kawasan rawan kebakaran meliputi: Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Curug.

Kawasan rawan gempa bumi meliputi: Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Legok; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Jambe; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Solear; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sindang Jaya. Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo;m Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.

Kawasan rawan kegagalan teknologi meliputi: Kecamatan Jayanti; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Curug; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Legok; Kecamatan Panongan; Kecamatan Sindangjaya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Cisauk; dan Kecamatan Pagedangan.

Kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cisauk; Kecamatan Legok; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Jambe; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Solear; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sindang Jaya. Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Sukadiri.

Kawasan rawan tsunami meliputi: Kecamatan Mekar Baru: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Mauk; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Kosambi.

13. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya berupa situs-situs sejarah meliputi:

1. Situs Makam Gajah Barong, Situs Makam Nyi Mas Gamparan, Situs Makam Buyut Siyam, Situs Makam Syech Mubarak, Situs Makam Buyut Sandi, Situs Makam Buyut Mali, Situs Makam Nyi Saritinem, Situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan Situs Makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa.

2. Sisa fosil-fosil Elephant Maximus, Situs Bangunan Pekong Soekong, dan Situs Makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk.

3. Situs Sumur Tujuh dan Situs Makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa.

4. Situs Sumur Tua dan Situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri.

5. Situs Makam Panjang Syech Daud dan Situs Makam Wali Riman di Kecamatan Pakuhaji.

6. Situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga.

7. Situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo.

8. Situs Makam Solear di Kecamatan Solear.

9. Situs Makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi.

10. Situs Makam Buyut Mijah, Situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), Situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan

11. Situs Makam Mede, Situs Makam Tubagus Taram, Situs Makam Ki Buyut Golokgog di Kecamatan Cisauk.

12. Klenteng di Kecamatan Sukamulya.



14. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan peruntukan Budi Daya meliputi :

a. Kawasan peruntukan pertanian;

b. Kawasan peruntukan perikanan;

c. Kawasan peruntukan industri;

d. Kawasan peruntukan pariwisata;

e. Kawasan peruntukan permukiman; dan

f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

g. Kawasan reklamasi

h. Kawasan pusat rehabilitasi/lembaga pemasyarakatan;

i. Kawasan ekonomi khusus (KEK);

j. Kompleks sekolah pelayaran

k. Pengembangan tempat pemakaman umum;

l. Pembangunan stadion olahraga;

m. Pembangunan rumah sakit tipe;

n. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan;

o. Kawasan Bandar Udara Soekarno Hatta dan pengembangannya;

p. Kawasan Bandar Udara Budiarto Curug; dan

q. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar.

r. Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) Jatiwaringin



15. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: Kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan peternakan; kawasan agropolitan.

Kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura dengan luas kurang lebih 13.685,41 hektar meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.

Kawasan tanaman pangan dan holtikultura termasuk lahan penangkaran benih yang dikelola oleh kelompok tani, meliputi: Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Kresek; Kecamatan Sukamulya; dan Kecamatan Mekar Baru.

Kawasan peternakan terdiri dari: perusahaan peternakan dan peternakan rakyat. Perusahaan peternakan meliputi: Kecamatan



Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Jambe; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Kresek; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Legok; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Panongan; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Solear; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Mauk; dan Kecamatan Gunung Kaler.

Perusahaan peternakan meliputi: Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Jambe; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Kresek; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Legok; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Panongan; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Solear; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Mauk; dan Kecamatan Gunung Kaler.

Perusahaan peternakan yang berada di kawasan peruntukan pertanian memiliki luas kurang lebih 103,81 hektar. Peternakan

rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Untuk luasan lahan peternakan eksisting tetap dipertahankan dan terhadap rencana pengembangan lahan peternakan dialokasikan pada kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.

Kawasan agropolitan terletak di Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur seluas kurang lebih 100 hektar. Kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.685,41 hektar, yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LPC2B). Ketentuan lebih lanjut tentang KP2B diatur dengan peraturan tersendiri.

16. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi: kawasan perikanan tangkap; kawasan perikanan budi daya; pengolahan dan pe-





masaran hasil perikanan; dan kawasan minapolitan.

Kawasan perikanan tangkap meliputi prasarana dan sarana perikanan tangkap yang terdiri atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi: PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji; PPI Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga.

Kawasan perikanan budi daya meliputi: perikanan budi daya air payau berupa tambak, meliputi: Kecamatan Mekar Baru terletak di Desa Jenggot; Kecamatan Kronjo terletak di Desa Kronjo dan Desa Muncung; Kecamatan Kemiri terletak di Desa Lontar dan Desa Karanganyar; Kecamatan Mauk terletak di Desa Mauk Barat dan Desa Ketapang; Kecamatan Teluknaga terletak di Desa Tanjung Pasir.

Perikanan budi daya air tawar berupa kolam yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Balai benih ikan Air Tawar di Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya. Pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan meliputi: pengolahan komoditas ikan asin di Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji; dan, pemasaran berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji; Desa Ketapang Kecamatan Mauk; Desa Lontar Kecamatan Kemiri; dan Desa Kronjo Kecamatan Kronjo, kawasan minapolitan berada di Kecamatan Kronjo.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan perikanan diatur dalam peraturan bupati.

17. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang 15.245,21 hektar, meliputi: kawasan industri; dan sentra industri kecil dan menengah.

Kawasan industri meliputi: Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Cikupa, Kecamatan





Kosambi; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Panongan; dan Kecamatan Kronjo. Sentra industri kecil dan menengah meliputi : Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Legok; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Panongan; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sukadiri.

18. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk; kawasan pariwisata Bahari Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi; kawasan pariwisata Bahari Pulau

Cangkir di Kecamatan Kronjo; kawasan pariwisata Bahari Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri; kawasan pariwisata alam Solear di Kecamatan Solear.

Kawasan pariwisata situ di Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua; kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis; kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata Situ Patrasana di Kecamatan Kresek; dan kawasan pariwisata Situ Cilongok di Kecamatan Pasar Kemis. Kawasan pariwisata Tangerang Mangrove Center di Kecamatan Teluknaga.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi: rumah asli peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs makam Raden Aria Wangsakara, situs makam Buyut Onang, situs makam Ki Muttaqin, situs makam Ki Yunus, dan situs makam Ki Musa di Kecamatan Pagedangan; rumah kebaya tempo dulu, situs makam Nyi Mas Melati, dan situs makam Pangeran Jayakarta di Kecamatan Sukamulya; situs makam Gajah Barong, situs makam Nyi Mas Gamparan, situs makam Buyut Siyam, situs makam Syech Mubarak, situs makam Buyut Sandi, situs makam Buyut Mali, situs makam Nyi Saritinem, situs makam Ki Mas Laeng, situs makam Raden Mas Kuncung, dan situs makam Wali Ahmad di Kecamatan Tigaraksa; sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng di Kecamatan Mauk; situs Sumur Tujuh dan situs makam Nyi Mas Aulia di Kecamatan Cikupa; situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang di Kecamatan Sukadiri; situs makam Panjang Syech Daud dan situs makam Wali Riman di Kecamatan Pakuhaji; situs Penggilingan Tebu di Kecamatan Teluknaga; situs makam Jaga Laut di Kecamatan Kronjo; situs makam Solear di Kecamatan Solear; situs makam Panjang Dadap di Kecamatan Kosambi; situs makam Buyut Mijah, situs makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs makam Kepuh, dan situs makam Buyut Resem di Kecamatan Sepatan; dan situs makam Mede,

situs makam Tubagus Taram, situs makam Ki Buyut Golokgog dan situs makam Ki Buyut Demang di Desa Sampora Kecamatan Cisauk. wihara tjoe soe kong bio di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk, situs makam Kepuh Keramat Buyut Jago di Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi wisata Edukasi terletak di Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Cisoka, Wisata penangkaran buaya di Kecamatan Teluknaga; Wisata Bumi Perkemahan Kitri Bhakti di Desa Sukabakti Kecamatan Curug; wisata olahraga berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang; Wisata Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka; Wisata Rekreasi World of Wonders (WOW) di Citra Raya Kecamatan Cikupa; Wisata Teluknaga Mas di Kecamatan Teluknaga; Wisata Mancing Muara Ujung di Kecamatan Teluknaga; Wisata Religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; Wisata Belanja dan Kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi,Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Balaraja, Wisata Akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Mauk; wisata danau pusat pemerintahan di Desa Kayu Agung Kecamatan Tigaraksa; wisata telaga tebing koja/Godzilla di Kecamatan Cisoka, wisata taman edukasi lalu lintas di Kecamatan Balaraja.

19. Kawasan Peruntukan Permukiman

Permukiman perkotaan lebih 67.202,17 hektar meliputi: Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Legok; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Jambe; Kecamatan Cisoka; Kecamatan

Solear; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi; dan Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Permukiman perdesaan dengan dengan luas kurang lebih 2.859,65 hektar, meliputi: Kecamatan Mauk, Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri

20. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi: Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 Falatehan berada di Kecamatan Cikupa; Makorem 052 berada di Kecamatan Kelapa Dua; Radar TNI AU berada di Kecamatan Mauk; Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; Pos Angkatan Laut tipe C di Kecamatan Kronjo; Polsek tersebar di seluruh kecamatan; dan Koramil tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

21. Kawasan Reklamasi

Kawasan reklamasi diperuntukan sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan bandara soekarno-hatta II dan kawasan industri di bagian perairan laut wilayah Utara, dengan luas kurang lebih 9.000 hektar, berjarak kurang lebih 200 meter dari garis pantai ke arah laut, meliputi : Kecamatan Kosambi; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Kronjo.

22. Kawasan Pusat Rehabilitasi/Lembaga Pemasyarakatan

Kawasan permukiman pemasyarakatan dengan luas kurang lebih 100 hektar berada di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Legok.

23. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan ekonomi khusus (KEK) terdiri dari: pendidikan tinggi, pariwisata, dan perdagangan dan jasa kawasan ekonomi khusus (KEK) pendidikan tinggi berada di Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Kosambi, kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata berada di Kecamatan Kosambi, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) perdagangan dan jasa berada di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga.

24. Komplek Sekolah Pelayaran

Kompleks sekolah pelayaran berada di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri.

25. Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pengembangan TPU terdiri atas: Zona TPU tersebar diseluruh wilayah kabupaten; TPU zona swasta berada di Kecamatan Tigaraksa; dan Kecamatan Jambe.





26. Pembangunan Stadion Olahraga

Pembangunan stadion olahraga berada di Sport center Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Cisoka; Stadion mini di seluruh Kecamatan

27. Kawasan Rencana Pengembangan Rumah Sakit

Rencana pengembangan rumah sakit meliputi:

a. Pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Tigaraksa dan Teluknaga;

b. Optimalisasi rumah sakit tipe B di Kecamatan Balaraja;

c. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi tipe B di Kecamatan Pakuhaji.

28. Kawasan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan dengan luas kurang lebih 45 hektar yang berada di Kecamatan Tigaraksa.



29. Kawasan Pengembangan Kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta

Pengembangan Kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta dengan luas kurang lebih 481,57 hektar yang berada di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga.

30. Kawasan Bandar Udara Budiarto Curug

Pengembangan kawasan Bandar Udara Budiarto Curug dengan luas kurang lebih 384,79 hektar yang berada di Kecamatan Legok.

31. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar

Pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar di Kecamatan Kemeri.

32. Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Kawasan TPA Jatiwaringin dengan luas kurang lebih 58,32 hektar yang berada di Kecamatan Mauk dan Rajeg.



Gedung Poliklinik Rawat Jalan
RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang

BAB III

PROGRAM UNGGULAN DAN PENCAPAIAN TAHUN 2020

A. RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMD tahun 2019-2023 ini, pemerintah Kabupaten Tangerang lebih menitik beratkan pada pembangunan pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping pembangunan infrastruktur.

Bagi pemerintah daerah RPJMD sangat penting dalam menentukan arah pembangunan. Karena RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam RPJMD 2019-2023 ditetapkan enam isu strategis pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam misi pasangan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli. Keenam isu strategis itu yakni; Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious; Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat; Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel; Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW); Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Isu strategis terkait penerapan kehidupan masyarakat yang religius di antaranya dijabarkan dalam program Tangerang Religi dan sanitasi berbasis pondok pesantren atau sanitren. Program Tangerang Religi ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Tangerang memahami religi dalam sikap kehidupan sehari-hari dan menjaga keutuhan antar umat beragama.

Program Tangerang Religi diantaranya Muatan Lokal (Mulok) baca tulis Alquran, isbat nikah, pendidikan karakter, pembi-

naan bagi pondok pesantrean salafiah, pembinaan peningkatan mutu bacaan dan praktek sholat imam masjid, gerakan sholat subuh berjamaah bagi masyarakat dan instensif guru ngaji, imam masjid dan MUI kabupaten/kecamatan.

Program peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat, dijabarkan dalam program Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), program Gerakan Tangerang Sehat, program Sayang Barudak (SABAR) dan program Masyarakat Bugar.

Gerakan Sayang Barudak misalnya, pemerintah daerah menetapkan program ini dengan tujuan agar terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai indikator dan standar yang ditetapkan. Sementara program Masyarakat Bugar ditujukan untuk meningkatkan keolahragaan di Kabupaten Tangerang.

Isu keempat menyangkut peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Program ini meliputi program OPTIMA (Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Manajemen Asset) yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan.

Isu kelima meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan RTRW. Dalam isu ini setidaknya ada empat program besar yang akan dilaksanakan yakni Gebrak Pakumis Plus, Kita Peduli Permasalahan Sampah (KIPRAH), Tangerang Bebas Macet dan Pengelolaan Sumber Air Baku dan Pengendalian Banjir.

Program Gebrak Pakumis Plus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

serta meningkatkan kualitas derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/halaman rumah.

Program Kita Peduli Sampah atau KIPRAH ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang mulai dari sumber sampai ke TPA dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder. Program Tangerang Bebas Macet ditujukan untuk mengurangi jumlah titik-titik kemacetan di Kabupaten Tangerang, dan program pengelolaan sumber air baku dan pengendalian banjir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang bersih, sehat, dan mencukupi bagi masyarakat serta mengurangi jumlah titik-titik banjir di Kabupaten Tangerang.

Isu keenam yaitu mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang dijabarkan dalam program Produk Inovatif dan Kreatif (PROAKTIF). Program ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan mengembangkan inovasi masyarakat dan pemda.

Isu strategis yang merupakan hasil 'perkawinan' dari persoalan-persoalan masyarakat Kabupaten Tangerang dengan visi dan misi pembangunan kepala daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD pada prosesnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

B. Prioritas Pembangunan 2020

Tahun 2020 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2019-2023. Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan social; (2) Penanganan kemiskinan dan pengangguran; (3) Pemerataan



infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan; (4) Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan; (5) Pengelolaan persampahan dan lingkungan; dan (6) Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance).

Enam focus pembangunan 2020 itu dapat dijabarkan, yakni;

a. Fokus Prioritas Pembangunan 1

Fokus Prioritas Pembangunan 1 diarahkan kepada peningkatan dan pemerataan pelayanan pendididkan, kesehatan dan sosial. Adapun penjabarannya yakni; Pengembangan budaya lokal dan festival seni Tangerang; Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menulat, khususnya TBC dan HIV; Pemberdayaan dan pengendalian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan kesehahatan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender; Pembangunan Sanitasi Pesantren (Sanitren); Penyediaan bea siswa bagi siswa SD dan SMP; Penerapan baca tulis Al Quran untuk siswa SD dan SMP; Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit terakreditasi; Peningkatan kepesertaan JKN-KIS; Persiapan pembangunan RSUD Tigaraksa. Saat ini



kabupaten Tangerang sudah punya tiga RSUD yakni RSUD Tangerang, RSUD Balaraja dan RSUD Pakuhaji; Peningfkatan dan jenis layanan perpustakaan.

b. Fokus Prioritas Pembangunan 2

Fokus prioritas pembangunan 2 diarahkan kepada penanganan kemiskinan dan pengangguran. Penjabaran dari fokus prioritas pembangunan 2 ini, yakni Penanganan kemiskinan dan pengangguran; Pembangunan kampung kratif; Pembangunan program unggulan satu desa satu; Optimalisasi BLK; Peningkatan kopetensi calon tenaga kerja dan wirausaha baru; Pendampingan UKM dan optimalisasi gerai UMKM; Peningkatan akses pasar modal untuk koperasi, UMK dan ekonomi kreatif; Pembentukan dan pengembangan ekonomi daerah; Penguatan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pengembangan destinasi wisata; Peningkatan intensifikasi dan pemasaran hasil pertanian; Pembangunan rumah pangan lestari; Intensif dan pemberdayaan petani lokal; Penguatan balai pendidikan dan pembibitan pertanian.



c. Fokus Prioritas Pembangunan 3

Fokus prioritas pembangunan 3 diarahkan kepada pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Penjabarannya akan direalisasikan dalam program pembangunan ruang kelas baru dan rehab sekolah; Optimalisasi Puskesmas; Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan; Normalisasi sungai, danau, situ dan embung; Pembangunan dan pemelihaaan sarana olahraga; Peningkatan perasaranan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan; Pembangunan pusat holtikultura; Persiapan pembangunan budidaya perikanan; Penataan pedestrian koridor Bojong-Pemda; Penataan daerah perbatasan; Pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan; Penataan pusat pemerintahan Tigaraksa.

d. Fokus Prioritas Pembangunan 4

Fokus prioritas pembangunan 4 diarahkan kepada penataan perumahan dan pemukiman berbasis kawasan. Adapun penjabarannya yakni gerakan bersama atasi kawasan kumuh dan



miskin serta pemberdayaan, lingkungan sosial ekonomi; Pembangunan 1000 sarana sanitasi; Pembangunan sanitasi masyarakat; Kota tanpa kumuh; Penyediaan air bersih berbasi masyarakat; Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (Ipal) komunal kawasan hunian; Pembangunan Ipal domestik; dan Gerakan Gerbang Mapan.

e. Fokus Prioritas Pembangunan 5

Fokus prioritas pembangunan 5 diarahkan kepada pengelolaan persampahan dan lingkungan. Penjabaran dari fokus ini diarahkan kepada pengendalian pencemaran air tanah; Konsevasi sumber daya air; Penataan ruang terbuka hijau; Penegakan hukum lingkungan; dan Optimalisasi TPST dan TPA.

f. Fokus Prioritas Pembangunan 6

Fokus prioritas pembangunan 6 diarahkan kepada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) yang dijabarkan



kedalam program optimasisasi pelayanan kependudukan; Peningkatan kompetensi dan kerja aparatur; Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di setiap kecamatan; Intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah; Integritasi pendapatan daerah; Penerapan tunjangan kinerja; Optimalisasi implementasi; Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL); Peningkatan data base disetiap OPD; Pembangunan sistem inovasi daerah; Persiapan pembangunan pelayanan publik terpadu; Pengembanagan SIMRAL terintegrasi dengan desa; Gelar inovasi Kabupaten Tangerang; dan Pelayanan adminitrasi pemerintahan berbasis teknologi.

C. 15 Program Unggulan dan Capaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang menetapkan 15 program unggulan pembangunan pada 2019-2023. Ke-15 Program itu selaras dengan janji politik pasangan Ahmed Zaki Iskandar dan Mad Romli sebagai bupati dan wakil bupati terpilih selain merupakan penajaman dari 25 program periode kepemimpinan Zaki sebelumnya.

Program unggulan Pemkab Tangerang merupakan pengembangan daerah yang berbasis isu strategis untuk mendongkrat pencapaian visi misi kepala daerah dengan orientasi pencapaian pembangunan. Pemkab sendiri akan konsisten mengawal 15 program unggulan yang bersifat lintas sektoral dan lintas OPD. Program ini diharapkan akan menuntaskan permasalahan daerah secara sinergi dan teritegrasi. Berikut ini 15 program Unggulan Pemkab Tangerang

1.Tangerang Religi

Dalam rangka meningkatkan nilai religius sebagai nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang ,menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama merupakan hal yang penting yang dilakukan dengan memberikan insentif kepada Guru Ngaji, peserta didik dapat lebih maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dibidang keagamaan. Selama 5 (lima) tahun diberikan insentif kepada Guru Ngaji. Selain itu untuk mengembangkan karakter siswa yang tingkah lakunya berdasarkan standar-standar moral dan etika, dalam pendidikan formal telah dikembangkan ekstrakurikuler keagamaan yang targetnya sampai dengan tahun 2023 seluruh sekolah dapat menerapkan pendidikan karakter.

Program ini ditangani oleh Sekretaris Derah dan Dinas Pendidikan. Dalam Program Tangerang Religi, ada dua kegiatan yang kini dijalankan. Kedua kegiatan itu yakni pemberian insentif guru ngaji, dan pemberian insentif petugas pemusalaran jenazah.

Dalam akhir RPJMD 2023, ditargetkan sebanyak 17.810 guru ngaji sudah mendapatkan insentif dari Pemkab Tangerang. Tar-



get ini terus dikejar secara bertahap oleh penanggung jawab kegiatan ini, yakni Sekretariat Daerah (Setda). Pada tahun 2019, sebanyak 3.006 guru ngaji yang sudah mendapat insentif. Sedangkan untuk tahun 2020, ditargetkan lagi sebanyak 3.288 guru ngaji mendapat insentif. Perkiraan target capaian untuk tahun 2020 adaah sebanyak 6.302 guru ngaji dengan perkiraan capaian realisasi sebanyak 6.294 guru ngaji. Hingga tahun 2020, persentase capaian kegiatan ini dibandingkan akhir RPJMD adalah 35,34 persen.

Untuk kegiatan pemberian insentif petugas pemusalaran jenazah. Target akhir RPJMD 2023, sebanyak 3.836 orang sudah mendapatkan insentif. Jumlah penerima insentif pun terus didorong oleh Setda. Untuk tahun 2019 saja, sudah 548 petugas pemusalaran jenazah mendapat insentif. Jumlah ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, target penerima ditambah menjadi 822 orang. Perkiraan realisasi tahun 2020, insentif akan diberikan kepada 1.370 orang. Dibandingkan akhir RPJMD, pada tahun 2020 ini persentase capaian baru mencapai 31,71 persen.



2. Sanitasi Pesantren (Sanitren)

Sasaran Program Sanitasi Berbasis Pesantraen (Sanitren) adalah pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi yang fasilitas infrastruktur sanitasinya kurang layak. Berdasarkan hasil pendataan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, dari keseluruhan pondok pesantren (Ponpes) salafi dan pengembangan salafi yang terdaftar di Kabupaten Tangerang sepertiganya memiliki kondisi sanitasi memprihatinkan.

Guna mengatasi persoalan sanitasi tersebut Pemarintah Kabupaten Tangerang akan menuntaskan persoalan tersebut yang akan direalisasikan secara bertahap. Prosedur yang dilakukan untuk mendistribusikan dana hibah melalui rekening pihak Ponpes, yang digunakan untuk pembangunan sanitasi dengan ukuran 5x9 meter yang terdiri dari lima ruang, yaitu tiga pintu untuk MCK dan dua pintu untuk wudhu. Adapun konsep bangunan menggunakan dak atau cor pada bagian atap dengan keseragaman dalam pemilihan bahan-bahan bangunan.

Program ini ditangani oleh Bappeda bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Kegiatan Program Sanitren dilakukan dengan melakukan pembangunan sarana sanitasi di pondok-pondok pesantren. Target pembangunan hingga akhir RPJMD tahun 2023, sebanyak 800 sarana sanitasi sudah di bangun.

Pada tahun 2019, dari target akhir RPJMD sebanyak 800 sarana sanitasi, sudah teralisasi sebanyak 150 sarana sanitasi. Ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2019. Pada tahun 2020, kembali ditargetkan sebanyak 150 sarana sanitasi lagi terbangun, dengan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2020, sebanyak 150 unit bangunan. Jika dibandingkan dengan RPJMD akhir, pembangunan sarana sanitasi di pondok pesantren hinga akhir tahun 2020 diperkirakan baru mencapai 18,75 persen.

3. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM)

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) merupakan gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri dan menyenangkan di sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju GSM adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah, aman dan nyaman, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik peserta didik, menjaga dan merawat sanitasi sekolah (Sanisek) dan mensukseskan Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki).

Selama 5 tahun ditargetkan seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang telah mengembangkan GSM. Program pendukung antara lain pembangunan tambahan ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru khususnya untuk jenjang SMP yang dalam penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi dan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, kantin

dan mushola. Selain itu dialokasikan beasiswa anak sekolah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berprestasi dari jenjang SD dan SMP.

Program ini ditangani oleh Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dalam program GSM, ada empat kegiatan yang lakukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Keempat kegiatan itu yakni pembangunan gedung sekolah, pemambahan ruang kelas sekolah, rehabilitasi bangunan sekolah, serta beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah, hingga akhir RPJMD tahun 2023 ditargetkan sebanyak 24 Unit Sekolah Baru (USB) dapat dibangun. Pada tahun 2019, sudah 5 USB dibangun. Sedangkan target RPJMD tahun 2020 sebanyak 4 USB dibangun, dengan perkiraan capaian sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 11 USB. Hingga akhir tahun 2020, jika dibandingkan dengan akhir RPJMD Kabupaten Tangerang





2023, persentasenya baru mencapai 45,83 persen.

Realisasi pemambahan ruang kelas sekolah untuk tahun 2020 sebanyak 419 ruang kelas baru. Jumlah ini sudah melampuai target tahun 2020 yang hanya dipatok 369 ruang kelas baru.

Sampai akhir RPJMD 2023, kegiatan pemambahan ruang kelas sekolah ditargetnya sebanyak 597 ruang kelas baru terbangun. Pada tahun 2019, sebanyak 293 ruang kelas baru terbangun. Pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 76 ruang kelas baru terbangun dengan perkiraan target hingga tahun 2020 mencapai 369 ruang kelas baru yang dapat dibangun. Melihat perkiraan target tahun 2020, jika dibanndingkan dengan akhir RPJMD, maka persentase capaian tercatat sebesar 70.18 persen.

Sedangkan untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, hingga tahun 2023 ditargetnya sebanyak 398 sekolah dapat direhabilitasi. Pada tahun 2019, sebanyak 286 sekolah sudah direhabilitasi. Target rehabilitasi bangunan sekolah tahun 2020 dipatok sebanyak 28 sekolah. Perkiraan capaian target hingga tahun 2020 sebanyak 369 sekolah dapat direhabilitasi. Persentase capaian tahun 2020 dibandingkan target akhir RPKMD

capaian diperkirakan sebesar 138,44 persen.

Untuk kegiatan pemberian bea siswa pendidikan siswa berprestasi dan MBR, jumlah siswa yang mendapat bea siswa hingga tahun 2023 (akhir RPJMD) ditargetnya sebanyak 5.000 orang. Pada tahun 2019, tidak ada kegiatan hingga realisasi dari kegiatan ini kosong. Sedangkan pada tahun 2020, target yang dipasang sebanyak 1.000 siswa, dengan perkiraan target hingga akhir tahun 2020 tercapai sebanyak 2.000 siswa. Sedangkan perkiraan capaian realisasi sebanyak 1000 siswa. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase capaian sampai dengan tahun 2020, diperkirakan mencapai 20,00 persen.

4. Gerakan Tangerang Sehat

Pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas serta peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan beroperasinya RSUD diwilayah barat untuk menangani masyarakat Kabupaten Tangerang. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan promotif dan preventif kesehatan untuk ibu hamil, usia produktif dan usia lanjut serta meningkatkan kesehatan melalui pendekatan keluarga untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan meningkatkan kepesertaan JKN-KIS.

Program ini ditangani oleh Dinas Kesehatan, RSUD Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pantura, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dalam progran Gerakan Tangerang Sehat, ada tujuh kegiatan



yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ke tujuh kegiatan itu masing-masing Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda/Jaminan Kesehatan Daerah), Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu BPJS PBI), Pendidikan Gizi, Perbaikan Gizi, Menurunkan angka stunting, Desa ODF (Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar Sembarangan), dan Pembangunan RSU Tigaraksa.

Indikator kinerja kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda) adalah jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda. Dalam target akhir RPJMD dipatok sebanyak 32.000 orang sudah mendapat bantuan. Pada tahun 2019, sudah 15.186 orang menerima bantuan dari target 2019 yang hanya mematok sebanyak 7.500 orang.

Pada tahun 2020, dalam kegiatan ini ditargetkan diberikan kepada 7.000 orang dengan perkiraan capaian target sebesar 14.500 orang, dan perkiraan capaian realisasi sebanyak 19.526 orang. Jika dibandingkan dengan persentase capaian hingga akhir RPJMD, perkiraan capaian hingga tahun 2020 tercatat sudah 61,02 persen.

Sementara untuk perkiraan capaian persentase untuk kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu BPJS PBI tahun 2020 baru mencapai 31,68 persen. Ini dapat dilihat dari realisasi capaian tahun 2019 yang sudah memberikan bantuan kepada 89.289 pasien, dari target akhir RPJMD sebanyak 550.000 pasien. Sedangkan target kegiatan ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 190.000 pasien, dengan perkiraan realisasi capaian sebanyak 174.229 pasien dan perkiraan target capaian sebanyak 190.000 pasien.

Kegiatan Pendidikan Gizi adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat pendidikan gizi. Hingga akhir RPJMD ditargetkan sebanyak 17.000 siswa mendapat pendidikan gizi. Namun pada tahun 2019, baru 5.000 siswa mendapatkan pendidikan gizi dengan perkiraan target capaian sebanyak 7.000 siswa. Sedangkan untuk tahun 2020, ditargetkan sebanyak 2.000 siswa lagi mendapat pendidikan gizi, dengan perkiraan target capaian sebanyak 7.000 siswa dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 6.200 siswa. Melihat paparan itu, persentase capaian sampai tahun 2020 dibanding akhir RPJM sudah mencapai 36,47 persen.

Untuk kegiatan perbaikan Gizi, indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase balita gizi buruk. Target akhir RPJMD 2019-2023, balita gizi buruk dapat ditekan sebanyak 5 persen. Target ini sudah tercapai pada tahun 2019, dimana dalam realisasi tahun ini, Dinas Kesehatan sudah mampu menekan balita gizi buruk hingga 5 persen.

Penurunan angka stunting. Target akhir RPJMD dapat ditekan sebanyak 19 persen angka stunting. Pada tahun 2019, Dinkes sudah mampu menekan angka stunting sebanyak 13,67 persen dari target 23,2 persen. Sedangkan target tahun 2020, Dinkes mematok angka 22 persen dengan perkiraan target capaian

sebesar 45,2 dan perkiraan realisasi capaian sebesar 24 persen. Jika perkiraan kinerja hingga tahun 2020 terlaksana seluruhnya, maka persentase capaian akhir RPJM tahun 2020 tercatat sebesar 124,58 persen.

Sedangkan untuk kegiatan Desa ODF (stop Buang Air Besar Sembarangan), jauh dari harapan. Hingga akhir RPJMD tahun 2023, ditargetkan ada 35 desa yang melakukan deklarasi ODF. Namun pada tahun 2019, baru 5 desa yang menggelar deklarasi desa ODF. Sedangkan dari 11 desa yang ditargetkan melaksanakan deklarasi ODF tahun 2020 dengan target capaian RPJMD tahun 2020 sebanyak 6 desa. Perkiraan target capaian tahun 2020 diperkirakan sebanyak 11 desa, dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 1 desa. Melihat kondisi yang ada, maka persentase capaian RPJMD hingga tahun 2020 baru mencapai 2,86 persen.

Untuk pembanguan RSUD Tigaraksa, ada dua item kegiatan, yakni pembuatan dokumen Feasibility Study (FS) dan pembuatan klinik. Hingga tahun 2020 ini, baru kegiatan pembuatan dokumen FS yang dilakukan. Dengan demikian, pembuatan dokumen FS RSU Tigaraksa sudah terlaksana 100 persen. Sedangkan untuk kegiatan pembuatan klinik sama sekali belum tersentuh.

5. Masyarakat Bugar

Pembinaan dan pengembangan olah raga dilaksanakan serta diarahkan untuk memassalkan olah raga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial olah raga tak hanya sebatas untuk mengejar prestasi atau pembinaan atlet, olah raga juga harus dipraktikkan dalam keseharian masyarakat, namun bisa menjadi gaya hidup sehari-hari. Salah satu langkah untuk itu pembudayaan olah raga non prestasi adalah melakukan kegiatan senam kebugaran secara rutin di setiap kecamatan dan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Sedangkan untuk olah raga prestasi didorong dengan melakukan kejuaraan olah raga tingkat pelajar dan kejuaraan tingkat daerah sehingga menghasilkan atlet yang berprestasi baik di tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional. Kehadiran stadion mini disetiap Kecamatan diharapkan mampu memenuhi ketersediaan, sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan.

Program ini ditangani oleh Dispora, Kecamatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dalam program Masyarakat Bugar, ada tiga kegiatan yang dilakukan DTRB dan Dispora. Tiga kegiatan itu yakni peningkatan sarana dan prasarana olah Raga (DTRB), olahraga bersama masyarat (Dispora), dan fungsionalisasi stadion mini (Dipora).

Untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olah Raga, dibagi dalam dua kegiatan yakni berupa pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana Sport Centre dan optimlisasi stadion mini di kecamatan. Untuk dua kegiatan ini sudah terealisasi 100 persen sejak tahun 2019. Pasalnya, untuk kedua kegiatan ini, hingga akhir RPJMD ditargetkan pemenuhan kelengkatan sara dan prasarana sport centre dan optimlisasi stadion Mini di kecamatan, ditargetkan masing-masing 1.

Sedangkan dalam kegiatan olahraga bersama masyarakat, kegiatan diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Perlu diketahui, hingga akhir RPJMD 2023 nanti, ditargetkan ada 2.913 kelompok masyarakat sudah melakukan olahraga bersama. Sedangkan pada tahun 2019, kegiatan ini sudah dilaksanakan kepada 643 kelompok. Untuk target RPJMD 2020, kegiatan ini ditargetkan sudah dilakukan pada 1.224 kelompok masyarakat,



dengan perkiraan realisasi target sebanyak 705 kelompok. Jika mengacu target capaian akhir RPJMD, maka hingga tahun 2020 capaian RPJMD-nya baru mencapai 24,20 persen.

Untuk fugsionalisasi stadion mini, kegiatan diarahkan kepada kegiatan (event) di stadion. Target akhir RPJMD hingga tahun 2023 dipatok ada 10 kegiatan. Pada tahun 2019, baru 2 kegiatan terlaksana. Pada tahun 2020, ditargetkan akan ada 2 kegiatan dengan perkiraan target capaian sebanyak 4 event. Melihat angka tersebut, persentase capaian sampai tahun 2020 dibanding akhir RPJMD baru mencapai 20,00 persen.

6. Sayang Barudak

Pemerintah daerah harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak adalah mengembangkan Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak membentuk Forum Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Puskesmas Ramah Anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan.

Program ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Setidaknya ada empat kegiatan dalam Program Sayang Barudak. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memberikan hak dan perlindungan anak. Keempat kegiatan itu masing-masing fasilitasi sekolah ramah anak, fasilitasi pusat kreatifitas anak, fasilitasi kecamatan layak anak, dan fasilitasi Puskesmas ramah anak.

Kegiatan fasilitasi sekolah ramah anak ini diarahkan kepada jumlah sekolah ramah anak. Dalam RPJMD 2019-2023, jumlah fasilitas sekolah ramah anak ditargetkan dibangun di 747 sekolah. Pada tahun 2019, baru dibangun di 87 sekolah. Sedang pada tahun 2020, jumlah sekolah ramah anak ditargetkan mencapai 287 sekolah, dengan perkiraan target capaian sebaayak 287 sekolah dari target RPJMD tahun 2020 sebanyak 200 sekolah. Melihat kondisi ini, maka persentase capaian hingga tahun 2020 dibandingkan akhir RPJMD, persentasenya baru menunjukkan 38,42 persen.



Sedangan kegiatan fasilitasi pusat kreatifitas anak diarahkan kepada jumlah anak yang ikut pusat krativitas. Hingga akhir RPJMD tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.000 orang ikut dalam pusat kreatifitas. Pada tahun 2019, baru 200 anak ikut kegiatan ini. Sedangkan pada tahun 2020, ditargetkan sebanyak 400 anak, dengan perkiraan target capaian sebanyak 400 anak dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 200 anak. Jika dibandingkat target akhir RPJM, maka perkiraan capaian kegiatan ini sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 20,00 persen.

Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan layak anak, hingga tahun 2023 ditargetkan ada 20 kecamatan layak anak. Pada tahun 2019, baru ada 6 kecamatan layak anak. Pada tahun 2020 ini, jumlah kecamatan layak anak ditargetkan sebanyak 11 kecamatan. Jumlah ini sesuai dengan realisasi pencapaian target tahun 2020 sebanyak 11 kecamatan layak anak. Dengan pencapaian realisasi ini, persentasen kegiatan kecamatan layak anak sampai dengan tahun 2020 ini sudah mencapai 55 persen dari target RPJMD akhir tahun 2023.

Selain fasilitasi kecamatan layak anak, dalam program Sayang Barudak juga memiliki kegiatan fasilitasi Puskesmas ramah anak. Dalam RPJMD 2019-2020, setidaknya ditargetkan ada 8 Puskesmas ramah anak di Kabupaten Tangerang. Tahun 2019, sudah ada 2 Puskesmas. Sedangkan tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 Puskesmas lagi dapat dibangun dengan perkiraan target capaian dan perkiraan target realisasi sebanyak 4 Puskesmas. Melihat capaian kinerja tahun 2019 hingga perkiraan capaian tahun 2020, maka persentase kegiatan ini dipekirakan sudah mencapai 50,00 persen.

7. Tangerang Mandiri Tahan Pangan (Tangerang Mantap)

Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem ketersediaan distribusi dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumber daya yang diwujudkan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pemberdayaan sumber daya manusia, pertanian dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus pembangunan sentra holtikultural.

Selain itu untuk mendukung program ini dilakukan revitalisasi pasar untuk mengembangkan pasar higienis, optimalisasi kawasan Lahan Partanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengembangan budidaya perikanan.

OPD yang menangani program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan BUMD.

Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan diarahkan kepada peningkatan rroduktivitas pertanian. Dalam program ini, ada empat kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Keempat kegiatan itu yakni pengembangan kawasan agropolitan, bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian,



optimalisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B), dan pemberian insentif pada lahan LP2B.

Pengembangan kawasan agropolitan, kegiatan diarahkan pada pengembangan kawasan. Pada akhir RPJMD tahun 2023, Ditargetkan ada 1 kawasan argopolitan. Pada tahun 2019, pengembangan kawasan agropolitan sudah terlaksana. Namun pada tahun 2020 juga, ditargetkan akan dikembangkan 1 lagi kawasan argopolitan, dengan perkiraan pencapaian 2 kawasan dua kawasan argopolitan di Kabupaten Tagerang. Artinya, target RPJMD 2019-2023, sudah tercapai 100 persen sejak di tahun 2019 lalu.

Kegiatan Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, indikator kerjanya dilihat dari jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan (hektar). Dalam RPJMD 2019-2023, ditargetkan 100 hektar lahan pertanian akan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian. Pada tahun 2019, target akhir RPJMD 2023 sudah tercapai 100 persen.

Sama halnya dengan target pengembangan kawasan agropolitan

yang sudah terpenuhi, kegiatan optimalisasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terpenuhi. Dari 1 kawan lahan yang ditargetkan dalam RPJMD 2019-2023, pada tahun 2019, optimalisasi sudah dilakukan pada dua kawasan. Artinya, target kegiatan ini sudah terpenuhi 100 persen.

Dalam RPJMD 2019-2023, pemberian insentif pada lahan LP2B akan diberikan kepada 13.300 hektar lahan LP2B. Pada tahun 2019, pemberian insentif sudah berikan kepada 1.500 hektar. Pada tahun 2020, Lahan LP2B yang mendapat bantuan ditargetkan seluas 4.500 hektar, dengan perkiraan target capaian dan perkiraan realisasi capaian seluas 4.500 hektar. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019-2023, maka realisasi sudah dicapai hingga tahun 2020 sebesar 33,83 persen.

8. Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)

Gerbang Mapan merupakan program unggulan daerah Kabupaten Tangerang yang didesain agar dapat memberikan percepatan bagi pembangunan masyarakat pantai berbasis pada 3 pilar pembangunan, yaitu percepatan pembangunan ekonomi, yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Gerbang Mapan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang, untuk siap menyongsong pembangunan kawasan reklamasi pantai utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan infrastruktur juga turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara merata.



OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Banguan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup.

Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Ada lima kegiatan dalam Gerbang Mapan ini. Kelimanya yakni penanaman mangrove, pembangunan wana wisata TMC, pembangunan sentra budidaya perikanan (Urban Aqua Cultur), pemberdayaan budidaya ikan, dan pemberdayaan nelayan.

Pada kegiatan penanaman mangrove, di akhir RPJMD 2023 penanaman mangrove ditargetkan sudah dilakukan di enam lokasi. Sedangkan pada tahun 2019, penanaman mangrove sudah dilakukan di 4 lokasi. Pada tahun 2020 ini ditargetkan akan dilakukan penanaman mangrove di 1 lokasi dengan perkiraan target capaian dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 5 lokasi. Berdasarkan target RPJMD akhir, persentse capaian sampai dengan tahun 2020 tercatat 83,33 persen.

sedangkan Untuk kegiatan pembangunan Wana wisata Tangerang Mangrove Centre (TMC) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, sudah teralisasi sejak tahun 2019 lalu. Pasalnya, target akhir RPJMD dipatok sebanyak dua wana wisata terbangun, dan pada tahun 2019 pembangunan wana wisata itu sudah dilaksanakan.

Dalam pembangunan sentra budidaya perikanan (Urban Aqua Cultur), terbagi dalam empat kegiatan. Keempat kegiatan itu yakni desain Urban Aqua Cultur, pembangunan Urban Aqua Cultur, penataan lahan Urban Aqua Cultur, dan pemeliharaan dan operasionalisasi.

Untuk desain Urban Aqua Cultur yang diarahkan dengan pembuatan dokumen Fisibility Study (FS) pada tahun 2020 ini sudah teralisasi.

Kegiatan penataan lahan Urban Aqua Cultur dan kegiatan pemeliharaan dan operasionalisasi Urban Aqua Cultur , serta pemeliharaan dan operasionalisasi, sudah dilaksanakan dan selesai pada tahun 2019. Artinya, untuk dua kegiatan ini sudah tercapai 100 persen dari target yang ditentukan dalam RPJMD tahun 2019-2023.

Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan budidaya ikan, ada dua item yang diarahkan kepada jumlah orang yang diberdayakan dan jumlah unit kolam. Untuk jumlah orang yang diberdayakan, pada tahun 2019, sudah 170 orang yang diberdayakan dari target 150 orang. Perlu diketahui, hingga akhir RPJMD 2023, target yang dipatok, sebanyak 750 orang sudah diberdayakan.

Tahun 2020 ditargetkan capaian sebanyak 150 orang lagi dapat diberdayakan dengan perkiraan target capaian sebanyak 300 orang dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 170 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase penca-

paian sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 22,67 persen.

Sedangkan untuk pembuatan kolam, kegiatan diarahkan untuk pembuatan kolam. Pada akhir RPJMD, ditargetkan sebanayak 18.100 kolam terbangun. Namun pada tahun 2019, baru 50 kolam terbangun. Pada tahun 2020 ditargetkan 60 kolam lagi dapat terbangun dengan perkiraan target capaian sebanyak 110 kolam dan perkiraan realisasi capaian 177 kolam. Dibanding target akhir RPJMD, persentase capaian kegiaatan ini sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 0,98 persen.

Untuk kegiatan pemberdayaan nelayan, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah nelayan yang diberdayakan, dan jumlah alat tangkap ikan (API). Untuk jumlah nelayan yang diberdayakan, tahun 2019 sudah 110 nelayan yang diberdayakan dari target 70 nelayan. Perlu diketahui, target akhir RPJMD hingga tahun 2023, sebanyak 670 nelayan sudah diberdayakan.

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 220 nelayan yang diberdayakan dengan perkiraan target capaian 220 nelayan dan perkiraan target capaian sebanyak 134 nelayan. Mengacu pada target akhir RPJMD yang ditargetkan sebanyak 670 nelayan, capaian target RPJMD sampai tahun 2020 baru tercapai 20 persen.

Sementara untuk bantuan API, target akhir RPJMD sebanyak 3.650 nelayan mendapat bantuan API. Pada tahun 2019, sudah 3.500 unit API diberikan kepada nelayan. Pada target tahun 2020 dipatok sebanyak 7.150 unit bantuan API diberikan kepada nelayan dengan perkiraan target capaian sebanyak 7.150 unit API, dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 7.133 unit API. Jika melihat jumlah ini, maka persentase capaian hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai 195,42 persen.

9. Pengembangan Bantuan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro (Kembangku)

Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Kembangku. Bantuan permodalan diberikan kepada Koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk usahanya.

Selain itu juga melayani secara langsung permodalan bagi mikro berbasis kelompok dan memberikan kemudahan masyarakat untuk para pelaku usaha dalam sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal. Upaya untuk meningkatkan koperasi aktif dan berkualitas dilakukan dengan cara antara lain peningkatan akses pembiayaan koperasi, pengembangan koperasi pola syariah dan revitalisasi koperasi.

OPD yang menangani program ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro.

untuk program Pengembangan Bantuan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro (Kembangku), ada empat kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang. Kegiatan itu masing-masing peningkatan akses pembiayaan koperasi, peningkatan akses pembiayaan koperasi UMKM, penilaian koperasi sehat, penyebaran pola pengembangan Gebrak Sipintar.

Untuk kegiatan peningkatan akses pembiayaan koperasi, target akhir RPJMD sebanyak 108 koperasi sudah mampu meningkatkan aksis pembiayaan. Pada tahun 2019, sudah 17 koperasi yang mampu. Tahun 2020, ditargetkan 12 koperasi dengan perkiraan target capaian sebanyak 24 koperasi dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 26 koperasi. Melihat paparan ini, sampai dengan tahun 2020, baru 26,85 persen capaian dari target akhir RPJMD 2019-2023.



Kondisi serupa juga terjadi untuk kegiatan peningkatan akses pembiayaan koperasi UMKM. Dari target akhir RPJMD sebanyak 45.000 Koperasi UMKM mendapat pembiayaan. Pada tahun 2019, sudah 4.989 koperasi dari target 5.000 koperasi. Pada tahun 2020 sebanyak 5.000 UMKM ditargetkan mendapatkan pembiayaan, dengan perkiraan target capaian sebanyak 10.000 koperasi UMKM. Melihat jumlah ini, maka sampai dengan akhir tahun 2020, target RPJMD 2019-2023 baru mencapai 22,20 persen.

Untuk penilaian koperasi sehat, sampai akhir RPJMD ditagetkan ada 810 koperasi sehat. Pada tahun 2019, sudah ada 90 koperasi sehat. Sedangkan pada tahun 2020, kembali ditargetkan akan ada 90 koperasi sehat lagi, dengan perkiraan target capaian dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 180 koperasi. Jika dibandingkan target akhir RPJMD, kegiatan penilaian koperasi sehat sampai tahun 2020 baru mencapai 22,22 persen.

Capaian serupa juga ditorehkan oleh kegiatan penyebaran pola pengembangan Gebrak Sipintar. Perlu diketahui, kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Tangerang. Untuk kegiatan ini, target akhir RPJMD 2019-2023 sebesar 2.700 UMKM. Realisasi tahun 2019 sebanyak 300 UMKM dapat dikembangkan. Pada tahun 2020, kembali ditargetkan sebanyak 300 UMKM dapat dikemebangkan dengan perkiraan target pencapaian dan perkiraan realisasi pencapaian sebanyak 600 UMKM. Melihat jumlah capaian tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, maka persentas RPJMD hingga tahun 2020 baru mencapai 22,22 persen.

10. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajement Asset (Optima)

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka dikembangkan E-Government.

Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, kinerja pelayanan perijinan yang efektif dan efisien dapat menciptakan iklim investasi di Kabupaten Tangerang.

Optimalisasi pendapatan Daerah diupayakan melalui system pendapatan yang terintegrasi dan pengelolaan asset daerah. Program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada termasuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tangerang harus terintegrasi sehingga perlu dibangun IT Center dan Pengembangan sistem satu data yang dilakukan oleh kuatnya system database dari masing-masing OPD.



Seluruh OPD terlibat dalam program ini, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Optima merupakan singkatan dari optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset. Program ini diarahkan kepada sistem informasi perizinan dan mengelolaan aset daerah. Dalam Program Optima terdapat lima kegiatan. Kelimanya yakni pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (Sipinter), pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan sistem aplikasi pengelolaan aset, pembangunan sistem informasi pengelolaan PAD terintegrasi, dan pembangunan BLK Kosambi.

Untuk kegiatan Pengembangan Sipinter, diarahkan pada penyelenggaraan perijinan secara online dan teritegrasi. Target RPJMD 2019-2023, 100 persen pelayanan perizinan di Kabupaten Tangeran terkoneksi secara terpadu. Pada tahun 2019, kegiatan ini baru terealisasi sebesar 13 persen dari target 20 persen. Sedangkan target RPJMD tahun 2020 sebesar 56 persen dengan perkiraan target pencapaian sebesar 76 persen dan perkiraan realisasi pencapaian sebesar 53 persen. Melihat

hasil diatas, maka persentase capaian sampai dengan 2020 diperkirakan baru sebesar 53,00 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini diarahkan pada pebuatan sisten perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Dari target akhir RPJMD sudah terbangun 6 sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pada tahun 2019, baru 1 sistem yang terintegrasi. Sedangkan tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 sistem terintegrasi dengan perkiraan target pencapaian 3 sistem dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 1 sistem. Jika dibandingan dengan target akhir RPJMD 2023 sebanyak 6 sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, capaianya sampai tahun 2020 baru mencapai 16,67 persen.

Pengembangan Sistem perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini diarahkan pada sistem aset yang dikembangkan. Dalam RPJMD 2019-2023 ditargetkan 5 sistem aset dikembangkan. Pada tahun 2019, baru 1 sistem dikembangkan. Dan pada tahun 2020 ditargetkan lagi 1 sistem dikembangkan dengan perkiraan target capaian dan perkiraan realisasi capaian sebanyak 2 sistem. Meliaht kondisi ini, persentase capaian sampai 2020 dibanding RPJM 2019-2023 baru mencapai 40,00 persen.

Untuk kegiatan pembangunan sistem informasi pengelolaan PAD terintegrasi. persentase capaian kegiatan ini sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sudah 100 persen. Ini karena target akhir RPJMD sebanyak 1 sistem.

Perkiraan capaian 100 persen juga ditorehkan untuk kegiatan Pembangunan BLK Kosambi. Kegiatan ini sendiri diarahkan kepada pengadaan lahan BLK. Target akhir RPJM 2019-2023 dalam kegiatan ini adalah 2 paket. Pada tahun 2019, sudah ada

1 lahan diadakan untuk BLK. Pada tahun 2020 ditargetkan 1 lagi pengadaan lahan. Jika rencana ini sesuai dengan rencana, maka perkiraan capai RPJMD sampai dengan tahun 2020 sudah 100 persen.

11. Gerakan Bersama Berantas Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) Plus

Program Gebrak Pakumis Plus ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan di kawasan pemukiman kumuh seperti rumah tiak layal huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan.

Melalui program ini direncanankan setiap tahun dapat dituntaskan 20 kawasan pemukiman penduduk. Pada kawasan yang diberikan program ini selain kegiatan fisik juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melaluipembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pelatihan wirausaha.

Selain itu, masyarakat juga diberikan akses untuk mendapatkan bantuan permodalan dan untuk meningkatkan ketahanan pangan dikembangkan kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, DInas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan.

Program Gebrak Pakumis Plus ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan di kawasan pemukiman kumuh seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kes-



ehatan lingkungan. Ada lima kegiatan dalam Program Gebrak Pakumis Plus. Kelima kegiatan itu yakni bedah rumah berbasis kawasan, pengadaan air minum berbasis kawasan, sanitasi masyarakat berbasis kawasan, penataan lingkungan berbasis komunitas, dan seribu sarana sanitasi (Serasi).

Pada kegiatan bedah rumah berbasis kawasan, diarahkan pada jumlah rumah yang direhabilitasi. Dalam target RPJMD tahun 2020, ditargetkan sebanyak 1.000 rumah akan direhab. Sedangkan pada tahun 2020 ini, perkiraan capaian dipatok diangka 2.000 rumah, sama dengan perkiraan realisasi tahun 2020 sebanyak 2.000 rumah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2023 yang mematok 5.000 rumah, perkiraan capaian kegiatan ini sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 40 persen.

Untuk kegiatan pengadaan air minum berbasis kawasan, target akhir RPJMD dipatok sebanyak 35 titik. Sedangkan target RPJMD tahun 2020 sebanyak 7 titik. Jika dibandingkan target

akhir RPJMD, persentase capaian tahun 2020 baru mencapai 20 persen.

Kegiatan sanitasi msyarakat berbasis kawasan diarahkan kepada jumlah Sambungan Rumah (SR). Dalam kegiatan ini, target akhir RPJMD adalah 750 SR. Sementara target RPJMD tahun 2020 dipatok sebanya 150 SR, dengan perkiraan target capaian sampai akhir tahun 2020 sebanyak 123 SR. Melihat target akhir RPJMD yang mematok 750 SR, maka capaian tahun 2020 ini baru mencapai 17,60 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan penataan lingkungan berbasis komunitas. Dalam kegiatan ini, target akhir RPJMD pada tahun 2023 dipatok sebanyak 40 kawasan yang sudah ditata. Namun capaian hingga tahun 2020 baru mencapai 20 persen. Pasalnya, Target RPJMD tahun 2020 hanya mematok sebanyak 8 kawasan yang ditata. Perkiraan capaian hingga tahun 2020 hanya 8 kasawan dari perkiraan target sebanyak 16 kawasan.

Sedangkan untuk kegiatan Serasi, hingga tahun 2020 capaian kegiatan ini baru 38,27 persen dari target akhir RPJMD yang mematok membangun sebanyak 750 unit sarana sanitasi. Perlu diketahui, sasaran kegiatan ini adalah jumlah sarana sanitasi yang dibangun. Persentasi yang kecil ini dapat dilihat dari target RPJMD tahun 2020 sebanyak 150 unit, dengan perkiraan capaian realisasi sebanyak 287 unit.

12. Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah)

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan ini adalah mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tampat Pebuangan Akhir (TPA) dengan cara pengembangan TPST 3 R dan pembentukan Bank Sampah. Revitalisasi TPA dilakukan untuk meningkatkan kinerja persampahan selain itu dilakukan

optimalisasi sistem managemen pengtelolaan persampahan.

Upaya untuk mengurasi volume sampah juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk peduli pada permasalahan sampah melalui program Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) untuk mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik dan streofoam. Sedangkan di Kantor Pemerintahan dilakukan dengan mencanangakan program Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor).

OPD yang menangani program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan.

OPD yang menangani program ini adalah Bina Marga dan SDA.

Dalam program Kipprah, ada lima kegiatan yang luncurkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kelima kegiatan itu yakni pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), optimalisasi TPS 3 R persampahan, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, penanganan sampah di daerah rawan sampah dan revitalisasi TPA Jatiwaringin.

Untuk Kegiatan KRPL, tidak ada target RPJMD 2020, sementara target akhir RPJMD 2023 ditargetkan ada 19 kelompok pengembangan KRPL. Kendati demikian, dalam capaian target RPJMD 2019, pengembangan kelompok KRPL ini sudah mencapai angka 13 kelompok KRPL. Ini artinya capaian kegiatan ini sudah mencapai melebihi 100 persen.

Sedangkan untuk kegiatan optimalisasi TPS 3 R persampahan, indikatornya adalah jumlah TPS 3 R yang dikelola. Hingga akhir tahun 2023 nanti, target jumlah TPS 3 R yang dikelola dipatok sebanyak 25 TPS 3 R persampahan. Hingga tahun 2020, jumlah jumlah TPS 3 R yang dikelola baru mencapai



24 persen. Ini dikarena realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 baru 5 TPS 3 R. Sedangkan pada tahun 2020, target yang dicanangkan hanya berjumlah 5 TPS, dengan perkiraan target capaian sebanyak 10 TPS dan perkiraan capaian realisasi sebanyak 6 TPS.

Untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, indikator kinerja adalah jumlah bank sampah yang dikelola. Target akhir RPJMD dipatok sebanyak 125 bank sampah. Sedangkan target RPJMD 2020 dipatok 25 bank sampah. Sejak tahu 2019 hingga tahun 2020, capaian baru 27,20 persen. Ini karena pada tahun 2019, realisasi bank sampah yang dikelola baru mencapai 31 bank sampah dari target 125 bank sampah. Sedangkan untuk tahun 2020, target RPJMD sebanyak 25 bank sampah dengan perkiraan capaian target sebanyak 50 bank sampah, dan perkiraan capaian realisasi sebanyak 34 bank sampah.

Indikator kinerja kegiatan penanganan sampah di daerah rawan sampah adalah jumlah penanganan sampah di daerah rawan sampah. Perlu diketahui, hingga akhir RPJMD, ditargetkan sebanyak 259 kali. Pada tahun 2019, realisasi yang dicapai sudah mencapai 115 kali. Sedangkan pada RPJMD taun 2020 ditargetkan dilakukan penangan sampah di daerah rawan sebanyak 50 kali. Perkiraan target capaian pada tahun 2020 ini sebanyak 100 kali dengan perkiraan realisasi capaian sebanyak 165 kali. Melihat kondisi yang, maka dari tahun 2019 hingga tahun 2020, capaian kegiatan ini sudah mencapai 66 persen.

Kegiatan revitalisasi TPA Jatiwaringin diarahkan kepada dokumen pembuatan masterplan TPA. Hingga akhir RPJMD tahun 2023, ditargetkan dapat diselesaikan 1 paket dokumen pembuatan masterplan TPA. Namun hingga tahun 2020, belum ada catatan tentang capaian kinerja. Ini juga berimbas kepada persentase capaian 2020 yang masih kosong.

13.Pengelolaan dan Pemantauan Sumber Daya Air (Lestari)

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah banjir yang diakibatkan oleh luapan air sungai diantaranya yaitu disekitar daerah aliran sungai wilayah Sungai Cisadane, Sungai Cirarab, Sungai Cimanceuri dan Sungai Cidurian. Berdasarkan fakta tersebut, pada beberapa tahun ke depan Pemerintah Kabupaten tangerang merencanakan program penanggulangan banjir guna mengurangi titik banjir agar tidak merugikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdomisili di wilayah banjir tersebut.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan dan normalisasi saluran pembuangan. Penyediaan air bersih merupakan hal yang penting, optimalisasi embung sebagai tempat penampungan air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun air baku untuk PDAM Tirta Kerta Raharja dan mitranya.



Ada dua kegiatan dalam program Lestari. Kedua kegiatan itu yakni infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik, dan pembangunan/peningkatan embung/situ/danau.

Untuk infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik indikatornya adalah persentase sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik. Dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, ditargetkan sebanyak 64,84 persen sungai dan saluran pembuangan dalam kondisi baik. Capaian kegiatan ini pada tahun 2020 sudah mencapai 93,24 persen. Soalnya, realisasi capaian kegiatan ini pada tahun 2019 sudah mencapai 58,59 persen. Sedangkan pada tahun 2020, perkiraan capaian dan realisasi target sebesar 60 persen.

Sedangkan untuk kegiatan pembangunan/peningkatan embung/situ/danau, hingga tahun 2020 sudah belum tercatat pencapaiannya. Dalam target akhir RPJMD dipatok lima buah pembangunan atau peningkatan embung. Dan pada tahun 2019, sudah teralisi dua buah embung yang ditingkatkan atau dibangun. Sedangkan perkiraan capaian target dan realisasi tahun 2020 kosong.

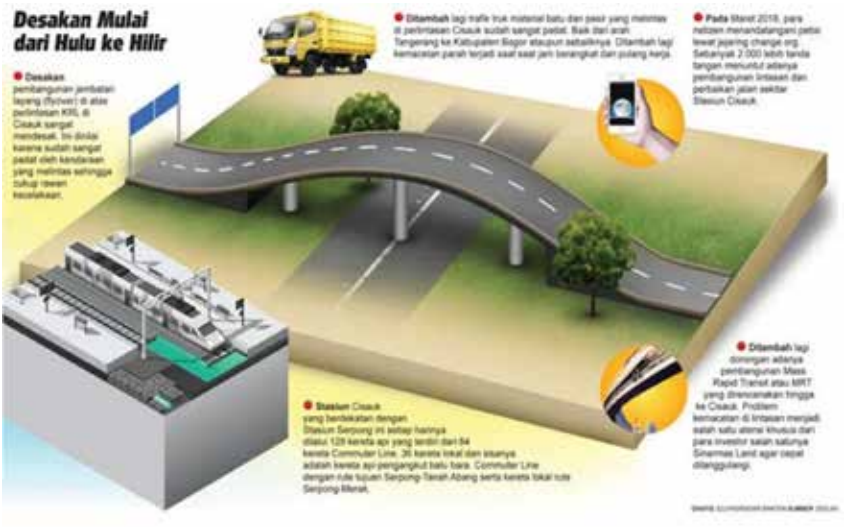
14.Pengendalian Kemacetan Lalulintas (Pekat Lantas)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, terjangkau dan adil, serta layanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi. Ini karena sektor trasportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitasi manusia.

Pada kenyataannya, Kabupaten Tangerang masih memiliki banyak titik kemacetan, antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga-Dadap-Kamal, Jalan Raya Karawaci-Legok, Jalan Raya Cibodas-Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses, terutama pada simpang-simpang geometris dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over dan terminal tipe C.

OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

Sedikitnya ada lima kegiatan dalam program Pekat Lantas. Kelima kegiatan itu yakni Feasibility Study Area Traffic Control System (FS ATCS), Detail Engineering Design (DED) ATCS, pembangunan terminal tipe c, FS terminal tipe c, DED ter-



minal tipe c, dan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten.

Diakhir RPJMD Tahun 2023, ditargetkan sudah ada satu dokumen FS ATCS atau sistem kendali lalu lintas kendaraan. Pada tahun 2019, pembuatan dokumen ini sudah selesai dilakukan. Artinya, dalam persentasi capaian sampai dengan tahun 2020 sudah 100 persen tercapai. Perlu diketahui, feasibility study adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis.

Hal yang saja juga dalam pembuatan dokumen DED ATCS, sudah dilesaikan sejak tahun 2019 lalu. Artinya, hingga tahun 2020, kegiatan ini sudah tercapai 100 persen. Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.

Sedangkan untuk kegiatan pembangunan terminal tipe c, sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, belum memperlihatkan progres. Dalam catatan capaian RPJMD, tidak ada laporan program dalam kegiatan ini. Padahal, dalam target akhir RPJMD tahun 2023, ditargetkan sudh dibangun 1 terminal tipe C.

Kendati belum ada laporan pembangunan terminal tipe C, namun untuk pembuatan FS dan DED terminal sudah dilakukan sejak tahun 2019. Pada tahun itu juga pembuatan FS dan DED terminal tipe C sudah rampung dilaksanakan. Capaian hingga tahun 2020 sudah 100 persen.

Untuk kegiatan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten hingga akhir tahun 2020, persentase capaiannya sudah diangka 89,52 persen. Capaian ini dapat dilihat dari tahun 2019, realisasnya sudah mencapai 95,83 persen. Sedang target RPJMD 2020 dipatok diangka 97, 11 persen, dengan perkiraan capaian dan realisasi sebesar 89 persen.

15.Produk Inovatif dan Kreatif (Proaktif)

Kabupaten Tangerang yang berada dalam posisi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur) harus memiliki keunggulan dan daya saing dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha yang kreatif dan memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi adalah memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru.

Peran pemerintah dalam menggali dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas di kalangan masyarakat sangat penting. Setiap kecamatan dan desa didorong untuk memiliki produk unggulan yang merupakan ciri dan potensi lokal. Upaya untuk mendukung hal tersebut antara lain dengan menyelenggarakan



berbagai event promosi, optmalisasi gerai IKM serta fasilitasi permodalan untuk IKM dan UKM.

Pengembangan inovasi juga dilakukan di kalangan pemerintahan dengan meningkatkan inovasi OPD sehingga meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dengan pengembangan laboratorium inovasi dan festifal inovasi dan kreasi.

Dalam Program Proaktif ini ada dinas yang memiliki tangggung jawab yakni Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) dan Dinas Koperasi. Dispora sendiri diberitanggung jawab untuk kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Sedangkan Dinas Koperasi diserahi tanggung jawab untuk kegiatan bantuan promosi usaha mikro.

Indikator untuk kegiatan pengembangan kesenian dan Kebudayaan daerah adalah banyaknya event. Hingga akhir RPJMD tahun 2023, ditargetkan akan ada 43 event dalam kegiatan ini. Pada Tahun 2019, jumlah event yang selenggarakan sudah sebanyak 22 event dari target sebanyak 15 event. Sedangkan pada RPJMD 2020, ditargetkan sebanyak 31 event terselenggara.

Perkiraan capaian sampai akhir tahun 2020, akan terselenggara sebanyak 46 event dengan perkiraan realisasi sebanyak 24 event. Hingga akhir tahun 2020, persentase capaian mencapai 55,81 persen.

Sama halnya dengan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, kegiatan bantuan promosi usaha mikro, menggunakan indikator jumlah bantuan promosi usaha. Dalam akhir RPJMD, kegiatan ini ditarget dapat memberikan bantuan promosi usaha mikro sebayak 27 event. Pada tahun 2019, kegiatan ini sudah melaksanakan tiga event bantuan. Ini sesuai dengan target RPJMD 2019.

Sedangkan pada tahun 2020, ditargetkan ada sebanyak 3 event bantuan usaha mikro dilakukan dengan perkiraan capaian realisasi dan target sebanyak 6 event. Hingga akhir tahun 2020, persentase capaian target sudah berada diangka 22,22 persen. (Lihat: Tabel.8)

Melihat pemaparan di atas, banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang 15 program unggulan Pemkab Tangerang pada tahun 2020 ini tidak tercapai. Hal ini lebih disebabkan munculnya pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) mulai awal tahun 2020. Hingga seluruh anggaran dan konsentrasi terpaksa dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang hingga akhir tahun 2020 ini juga belum selesai.

Tabel.8. Capaian 15 Program Unggulan Tahun 2020

No	Program Unggulan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJM	Target 2019	Realisasi 2019	Target RPJM 2020	Perkiraan capaian S/d 2020 Target	Perkiraan capaian s/d 2020 realisasi	Persentase capaian s/d 2020 dibanding RPJM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TANGERANG RELIGI	Pemberian Insentif Guru Ngaji	Jumlah Guru Ngaji dan yang mendapat-kan insentif	Orang/ Tahun	17810	3.014	3006	3288	6.302	6294	35,34
		Pemberian Insentif petugas Pemulasa-ran Jenazah	Jumlah petugas pemulasaran jenazah yang mendapatkan insentif	Orang/ Tahun	3836	548	548	822	1.370	1370	35,71
2	SANITREN	Pembangu-nan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	800	150	150	150	300	150	18,75
3	GSM Gerakan Sekolah Menye Nangkan (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	24	5	5	4	9	11	45,83
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	ruang	597	293	293	76	369	419	70,18
		Rehabilitasi Sedang/ berat bangunan	Jumlah sekolah yang direhab	ruang	398	286	286	28	314	551	138,44

		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	ruang	5000	1.000	0	1000	2.000	1000	20,00
4	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	32000	7.500	15186	7000	14.500	19526	61,02
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	550000	90.000	89289	100000	7.000	174229	31,68
		Pendidikan Gizi	Jumlah siswa yang men dapatkan pendidikan gizi	siswa	17000	5.000	5000	2000	Balita Gizi Buruk < 5	6200	36,47
		Perbaikan Gizi	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	Balita Gizi Buruk < 5	Balita Gizi Buruk < 5	Balita Gizi Buruk < 5	Balita Gizi Buruk < 5	45,2	Balita Gizi Buruk < 5	Balita Gizi Buruk < 5
		Menurunkan angka stunting	Menurunya angka stunting	persen	19	23,2	13,67	22	11	24	124,58
		Desa ODF (open defecation free)	Jumlah desa ODF	Desa	35	5	-	6		1	2,86
		Pembangunan RSUD Tigaraksa :							1		
		a. Feasibility study	Jumlah dikumen FS	Dokumen	1	1	1	-		1	100,00
		b. Pembangunan Klinik		Klinik				1			

5	MASYARAKAT BUGAR	Peningkatan Sarana dan prasarana Olah raga	Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana Sport Center	Sport center	1	1	1	1	2	1	100,00
			Optimalisasi Stadion Mini Kecamatan	Stadion	1	1	1		2	1	100,00
		Olahraga Bersama Masyarakat	Jumlah kelompok yang berolahraga	Kelompok	2913	643	643	1224	1.867	705	24,20
		Fungsionalisasi Stadion Mini	Jumlah pemanfaatan stadion mini	Event	10	2	2	2	4	2	20,00
6	SAYANG BARUDAK	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang ramah anak	sekolah	747	87	87	200	287	287	38,42
		Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak	Jumlah anak yang ikut pusat kreativitas anak	orang	1000	200	200	200	400	200	20,00
		Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang ramah anak	kecamatan	20	6	6	5	11	11	55,00
		Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Puskesmas yang ramah anak	Puskesmas	8	2	2	2	4	4	50,00
7	TANGERANG MANTAP	Pengembangan Kawasan Agropolitan		kawasan	1	1	1	1	2	2	200,00
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	100	100	100	200	200	200,00

		Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan		kawasan	1	1	1	1	2	2	200,00
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha	13.300	1.500	1500	3.000	4.500	4500	33,83
8	GERBANG MAPAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Penanaman Mangrove	Jumlah lokasi penanaman	Lokasi	6	4	4		5	5	83,33
		Pembangunan WANA WISATA TMC	Jumlah wanawisata yang dibangun	Paket	2	2	2		2	2	100,00
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Urban Aqua Cultur)		Lokasi	1	2	2	1	2	2	200,00
		1. Desain Urban Aqua Cultur	Jumlah dokumen	DED/FS	1	1	1	0	1	1	100,00
		2. Pembangunan Urban Aqua Cultur	Jumlah Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	1	1	1	0	1	1	100,00
		3. Penataan Lahan Urban Aqua Cultur	Jumlah lahan Urban Aqua Cultur yang ditata	Paket	1	1	1	1	2	2	200,00
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi	Jumlah yang dipelihara	Paket	1	1	1	0	1	1	100,00

8		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	750	150	170	150	300	170	22,67
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	18100	50	50	60	110	177	0,98
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	670	70	110	150	220	134	20,00
			Jumlah alat pen-angkap ikan(API)	unit api	3650	3.500	3500	3650	7.150	7133	195,42
9	KEMBANGKU PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO (KEMBANGKU)	Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan	koperasi	108	12	17	12	24	29	26,85
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koper-asi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan	UMKM	45000	5.000	4989	5000	10.000	9989	22,20
		Penilaian Koperasi yang Sehat	Jumlah koperasi yang sehat	koperasi	810	90	90	90	180	180	22,22
		Penyebaran Pola Pengembangan Gebrak Sipintar	Jumlah UMK yang dikembangkan	UMK	2700	300	300	300	600	600	22,22
10	OPTIMA	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sipinter)	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terin-tegrasi	Persen	100	20	13	56	76	53	53,00

10	OPTIMA	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Integrasi	100	20	13	56	76	53	53,00
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelo-laan Aset	Jumlah sistem aset yang dikembang-kan	sistem	6	1	1	2	3	1	16,67
		Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi	Jumlah sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi	sistem	5	1	1	1	2	2	40,00
		Pembangunan BLK Kosambi :			1	1	1	1	2	1	100,00
		2. Pengadaan lahan	Jumlah lahan yang tersedia	Paket	2	1	1	1	2	2	100,00
11	GEBRAG P AKUMIS PLUS	Bedah rumah berba-sis Kawasan	Jumlah rumah yang direhab	rumah	5000	1.000	1000	1000	2.000	2000	40,00
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	titik	35	7	7	7	14	7	20,00
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	750	150	132	150	300	132	17,60
		Penataan Lingkun-gan Berbasis Komunitas	Jumlah kawasan kumuh yang terlayani	kawasan	40	8	8	8	16	8	20,00

		Serasi (Seribu Sanitasi)	Jumlah sanitasi yang dibangun	unit	750	150	150	150	300	287	38,27
12	KIPRAH	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok KRPL	Kelompok	10	10	13		10	13	q
		Optimalisasi TPS 3 R persampahan Penyediaan	Jumlah TPS 3 R yang dikelola	TPS3R	25	5	5	5	10	6	24,00
		Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dikelola	Bank Sampah	125	25	31	25	50	34	27,20
		Penanganan sampah di Daerah Rawan Sampah	Jumlah penanga-nan sampah	kali	250	50	115	50	100	165	66,00
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin		Paket	1				-	0	-
		a. Pembuatan Masterplan TPA	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	1		1	1	100,00
13	LESTARI	Infrastruktur Sungai dan Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik	Presentase Sungai dan Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik	persen	64,84	58,38	58,59	60,46	60	60	93,24
		Pembangunan/Pen-ingkatan Embung/ Situ/Danau	Pembangunan/Pen-ingkatan Embung/ Situ/Danau	buah	5	2	2	1	-	0	-

14	PERKAT LANTAS	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)			18			0	-	0	-
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	dokumen	1	1	1	0	1	1	100,00
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	dokumen	1	1	1	0	1	1	100,00
		Pembangunan Terminal Tipe C			1			0	-	0	-
		FS Terminal Tipe C	Tersedianya FS Terminal Tipe C	dokumen	1	1	1	0	1	1	100,00
		DED Terminal Tipe C	Tersedianya DED-Terminal Tipe C	dokumen	1	1	1	0	1	1	100,00
		Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	99,41	96	95,83	97,11	89	89	89,53
15	PROAKTIF	Pengembangan Kesenian dan Kebu-dayaan Daerah	Jumlah pelaksa-naan kesenian dan kebudayaan	Event	43	15	22	31	46	24	55,81
		Bantuan Promosi	Jumlah Bantuan Promosi Usaha Mikro	event	27	3	3	3	6	6	22,22

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang

BAB IV

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

PADA awal tahun 2020, corona virus disease (Covid-19) menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease (Covid-19).

Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus

konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pedoman ini merupakan revisi dari pedoman serupa yang diterbitkan pada 16 Maret 2020 dengan perubahan pada beberapa substansi sesuai perkembangan situasi.

Wabah coronavirus disease 2019 Covid-19 tengah menyerang bangsa ini dengan sangat cepat. Tidak saja jumlah kasus positif yang terus bertambah, dampak akibat penyebaran virus corona asal China tersebut juga meluas terutama di sektor ekonomi.

Menurut dokumen resmi pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang diterbitkan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kantor Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).

Penelitian menyebutkan, bahwa ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.

Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia,

sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonialuas di kedua paru.

Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/ PHEIC). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi sebanyak 414.179 kasus dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 pertama sebanyak 2 kasus.

Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, MalukuUtara, Maluku dan Papua. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kabupaten. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang), Jawa Timur (Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta).

Seperti diketahui, pendemi Covid-19 ini, tidak hanya berdapak pada bidang Kesehatan tetapi juga sangat berpengaruh pada sector ekonomi. Melihat kondisi ini, pemerintah memiliki tiga

kebijakan utama dalam penanganan Covid-19. Pertama, fokus pada sektor kesehatan melawan corona. Kedua, jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat. Ketiga, economic survival untuk pondasi ekonomi Indonesia.

Seperti dikutip dari laman https://www.kemenkopmk.go.id/ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah akan memastikan seluruh masyarakat terutama yang mengalami dampak langsung akibat Covid-19 dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejauh ini pemerintah telah mengantongi data masyarakat yang akan menerima bantuan baik berupa sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun sebagian data masih dalam proses, yakni calon penerima yang terkategori rentan miskin karena terdampak Covid-19.

Pemerintah juga tengah berfokus memulihkan perekonomian. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merancang lima program utama. Kelima program itu di antaranya Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja.

Pertama, Indonesia Aman yakni memastikan rakyat aman dari Covid-19. Program ini meliputi akselerasi tes Polymerase Chain Reaction (PCR), pelacakan, dan karantina secara nasional. Targetnya, mengurangi jumlah zona merah.

Kedua, Indonesia Sehat dalam bentuk reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong. Program ini meliputi percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan, dan obat di dalam negeri. Selain itu, transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.



Ketiga, Indonesia Berdaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah ini berfokus pada penyaluran bantuan sosial (Bansos), program padat karya, kartu prakerja, dan subsidi gaji. Selain itu, berfokus pada penyaluran kredit modal kerja dengan penjaminan pemerintah yang memprioritaskan UMKM.

Keempat, Indonesia Tumbuh untuk meningkatkan penerimaan negara. Caranya, dengan mendorong ekspor dan aktivitas ekonomi di level mikro dan sektor lain. Selain itu, transformasi perluasan perpajakan dan cukai.

Terakhir, program Indonesia Bekerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah pun menyiapkan program Beli Produk Indonesia dari anggaran pemerintah.

A. Penanganan dan Pengendalian

a.1. Kasus Pertama

Pandemi Covid-19 yang melanda nusantara, tak pelak menimpa warga Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang, kasus Corona pertama muncul

di Kabupaten Tangerang menimpa warga Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua. Berdasarkan penelusuran Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang, pria tersebut memiliki riwayat berpergian ke Malaysia untuk berlibur.

Tiga hari sebelum Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, atau tepatnya 11 Marett 2020, publik di Tangerang, terutama yang tinggal di sekitar kawasan Lippo Karawaci, digegerkan beredarnya pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp. Kendati demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum mendapat kepastian dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI soal pasien dimaksud. Pasalnya, jika ada yang positif terpapar Covid-19, Balitbangkes (Kementerian Kesehatan RI) akan memberikan informasi ke Dinkes Provinsi Banten dan Dinkes Kabupaten Tangerang.

Kendati belum menyatakan ada pasien positif, Dinkes Kabupaten Tangerang telah menetapkan lima pasien masuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kelima pasien itu berada di sejumlah rumah sakit. Perlu diketahui, PDP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19. Tidak hanya itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak dengan langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probabel Covid-19.

Selain lima pasien dalam pengawasan itu, Dinkes Kabupaten Tangerang juga menetapkan 25 orang lainnya masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka memiliki riwayat interaksi dengan negara terjangkit yakni Malaysia. ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus

tersebut. Selain itu, bisa juga orang sehat yang pernah kontak erat dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.

a.2. Penerapan PSBB

Pada Sabtu, 14 Maret 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) atas wabah virus Corona di Provinsi Banten. Penetapan status KLB ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten.

Status KLB di Provinsi Banten ini meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Penetapan KLB sebagai salah satu upaya Pemprov Banten dalam membatasi kecepatan sebaran/paparan Covid-19 terhadap warga masyarakat dan wilayah di Provinsi Banten.

Bersamaan dengan penetapan KLB itu, Gubernur juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi agar meliburkan Siswa SMA/K Negeri dan Swasta maupun SKH untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah selama dua (2) pekan sejak 16 sampai dengan 30 Maret 2020, dan akan dibuka kelas maya (online), terkecuali bagi siswa klas 12 tetap melakukan kegiatannya sesuai jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang telah ditetapkan.

Selain itu Gubernur juga tidak melaksanakan upacara dan apel bersama, membatasi berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan kehadiran orang yang banyak, membatalkan kunjungan kerja dan tidak menerima kunjungan kerja dari luar Banten hingga batas waktu KLB ini dinyatakan berakhir.

Gubernur juga menghimbau masyarakat agar menghindari tempat-tempat pertemuan dan keramaian umum. Diusahakan sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan ke daerah yang



terkena wabah virus Corona. Dan masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan berolah raga.

Pasca penetapan KLB ini, Gubernur Banten menggelar rapat bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Dalam pertemuan itu, para kepala daerah kepala daerah tersebut juga sepakat untuk menutup sementara semua aktivitas pendidikan. Baik untuk semua tingkatan pendidikan sekolah negeri maupun swasta.

Tak lama berselang setelah penetapan KLB, Gubernur Banten memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan penerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tertanggal 15 April 2020, disusul dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep. 140-Huk/2020

tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 15 April 2020.

Pemberlakuan PSBB ini menyusul telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten.

Pada 23 Agustus, Gubernur Banaten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 383 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam peraturan ini, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif bagi setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum.

Tanggal 21 September 2020, Gubernur Banten menetapkan perpanjangan Tahap II (kedua) PSBB di Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.241 - Huk/2020, tangga 21 Oktober 2020. Perpanjangan tahap II ini dimaksudkan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Banten.

Dalam Perpanjangan PSBB se-Provinsi Banten pertama ini, Gubernur menetapkan perpanjangan selama satu bulan mulai 21 September 2020 hingga 20 Oktober 2020 mendatang. Hal ini berbeda dengan perpanjangan PSBB sebelumnya di wilayah Tangerang Raya yang berlaku selama dua (2) pekan atau 14 hari.

Usai perpanjangan PSBB selama 1 bulan yang berakhir 20 Oktober 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk kembali memperpanjang penerapan PSBB di Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.241-Huk/2020. PSBB jilid ke II diperpanjang selama satu bulan kedepan sejak tanggal 21 Oktober hingga 19 November 2020.

Apa yang dilakukan oleh Provinsi Banten, sudah barang tentu diikuti oleh pemerintah Kabupaten/kota di bawahnya, termasuk di Kabupaten Tangerang.

Menyusul pernyataan Gubernur Banten yang menyatakan Banten dalam kondisi KLB Covid-19, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19. Keputusan Bupati Tangerang itu tertuang dalam SK Bupati bernomor 440/ Kep 273/ huk 2020 tertanggal 23 Maret 2020.

Berkaitan dengan tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona, Bupati dalam SK-nya tertanggal 23 Maret 2020 itu memutuskan empat hal yakni; 1.Status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Desease 2019 (Covid-19) Kabupaten Tangerang terhitung mulai 23 Maret hingga 23 Mei 2020; 2. Perpanjangan status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Desease 2019 (Covid-19); 3 Biaya yang diperlukan untuk tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Desease 2019 (Covid-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Tangerang pun dalam kondisi tanggap darurat telah menyiapkan ruang khusus pemantau Gugus Tugas COVID-19.

Kabupaten Tangerang sendiri telah ditunjuk Provinsi Banten

menyiapkan satu rumah sakit rujukan penanganan Corona, yakni RSUD Kabupaten Tangerang. Namun demikian, di Kabupaten Tangerang ada 26 rumah sakit baik negeri dan swasta yang siap menangani pasien terkait Covid-19 diantaranya RSUD Balaraja dan RS Siloam Kelapa Dua.

Terkait dengan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pun mendandatangani Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam Pencepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Peraturan Bupati tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati itu ditandatangani Jumat 17 April 2020. Jangka waktu pelaksanaan PSBB ditetapkan selama 14 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.

Ada 47 pasal yang tercatum dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2020 itu. Perbup PSBB tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang untuk mencegah penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi penyebaran Covid-19.

Adapaun pembatasan aktivitas meliputi pembatasan proses belajar mengajar di sekolah atau instansi pendidikan lainnya, pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.



Ruang lingkup Perbup dalam Pelaksanaan PSBB meliputi hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan Covid-19, satuan tugas siaga Covid-19 tingkat RT/RW, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; sanksi dan pembiayaan.

Pelaksanaan PSBB Kabupaten Tangerang diberlakukan diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang, dan lebih diperketat di beberapa kecamatan, dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh yang berdomisili atau kegiatan di wilayah daerah.

Selama PSBB setiap warga harus menjaga jarak antar sesama (physical distancing) sejauh 1-2 meter. Masyarakat juga diminta untuk membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, serta tidak menjalankan kegiatan keagamaan atau beribadah di rumah ibadah. Yang tidak kalah penting adalah berprilaku hidup bersih.

Setelah 14 hari perberlakukan PSBB di Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang kembali keluarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang.

Peraturan tersebut dibuat sebagai payung hukum kebijakan perpanjangan PSBB di Kabupaten Tangerang mulai 2 Mei–17 Mei 2020. Serta dibuat tertuang dalam Keputusan Bupati Tangerang Nomor 360/Kep.426-Huk/2020 tentang Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Pelaksanaan PSBB Dalam Percepatan Penanganan Covid-19.

Selanjutnya Bupati mengeluarkan Perbub Nomor 31 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Tangerang. Perbub ini berisi perpanjangan penerapan PSPB di wilayah Kabupaten Tangerang.

Namun untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang mengeluarkan Perbub No 34 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Tangerang. Perbup ini diteken terkait perpanjangan PSBB tahap tiga.

Dalam Perbub No 34 tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Tangerang memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang tidak memiliki KTP Jabodetabek dan Banten. Aturan ini ditujukan bagi pelaku usaha atau warga yang berdomisili diluar Jabodetabek dan Banten. Apabila tidak bisa menunjukkan SIKM, maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kabupaten Tangerang.

SIKM tidak diperlukan untuk kategori yang memiliki KTP

Jabodetabek dan Banten, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Jabodetabek, pimpinan lembaga tinggi negara, korps perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, anggota TNI dan kepolisian, dan petugas jalan tol.

Pemberlakuan SIKM itu merupakan aturan penerapan PSBB yang kembali diperpanjang di Kabupaten Tangerang hingga 14 Juni 2020.

Setelah menerbitkan Perbub No 34 tahun 2020, Bupati Kembali menerbitkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Wilayah Kabupaten Tangerang.

Kemudian Bupati kembali meneken Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Wilayah Kabupaten Tangerang. PSBB di wilayah Tangerang Raya kembali diperpanjang selama 14 hari, mulai Minggu (20/9) sampai tanggal 5 Oktober.

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar mengatakan, penerapan PSBB memang akan diperpanjang terus oleh Gubernur Banten. Namun dalam PSBB kali ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang merevisi sejumlah poin dalam surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Ada beberapa aturan yang diubah pada pelaksanaan aktivitas pembatasan kegiatan masyarakat di tempat atau fasilitas umum dan pasar.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 443.2/2790-KSD/2020, ter-



dapat empat hal yang harus disesuaikan dalam kondisi saat ini, yakni; 1. Agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pasar modern/tradisional tentang protokol kesehatan Covid-19 yang ketat ; 2. Melaksanakan monitoring pembatasan waktu operasional bagi kegiatan keagamaan, pusat perbelanjaan, toko, swalayan, pasar modern/tradisional, rumah makan, kafe, dan restoran siap saji, sampai dengan pukul 20.00 WIB; 3. Melanjutkan program Gebrak Masker secara menyeluruh, simultan dan berkelanjutan di semua level sampai dengan bulan Desember 2020, dan; 4. Agar melaksanakan koordinasi dan aksi penanganan, pencegahan Covid-19 lintas sektoral (Koramil, Polsek, Puskesmas, Kepala Desa/Lurah, PKK/Kader PKK, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).

Dalam SE yang baru, Pemkab Tangerang lebih menegaskan penerapan PSBB dengan pemberian sanksi kepada para pelanggar aturan. Diantaranya sanksi berupa teguran sampai sanksi penutupan tempat usaha. Untuk poin nomor 3, dalam program Gebrak Masker atau Operasi Yustisi, pelanggar aturan akan



disanksi sosial, seperti membersihkan jalan, hingga push-up.

Sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 yang menetapkan PSBB di Provinsi Banten, termasuk Tangerang Raya, kembali diperpanjang selama satu bulan. Penerapan PSBB selama 1 bulan ini diberlakukan setelah masa perpanjangan PSBB ke-12 kali diberlakukan di wilayah Tangerang Raya. Perpanjangan PSBB selama 1 bulan ini berakhir 20 Oktober 2020.

Setelah keluarnya SK tersebut, maka tahap pembatasan sosial resmi diperpanjang hingga bulan depan, tepatnya sampai tanggal 19 November 2020. Tidak ada yang berbeda dengan aturan teknis terkait PSBB di Kabupaten Tangerang sebelumnya dengan kali ini. Masyarakat diminta tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan dan tidak mengabaikan anjuran 4M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan).

a.3. Pembentukan Gugus Tugas

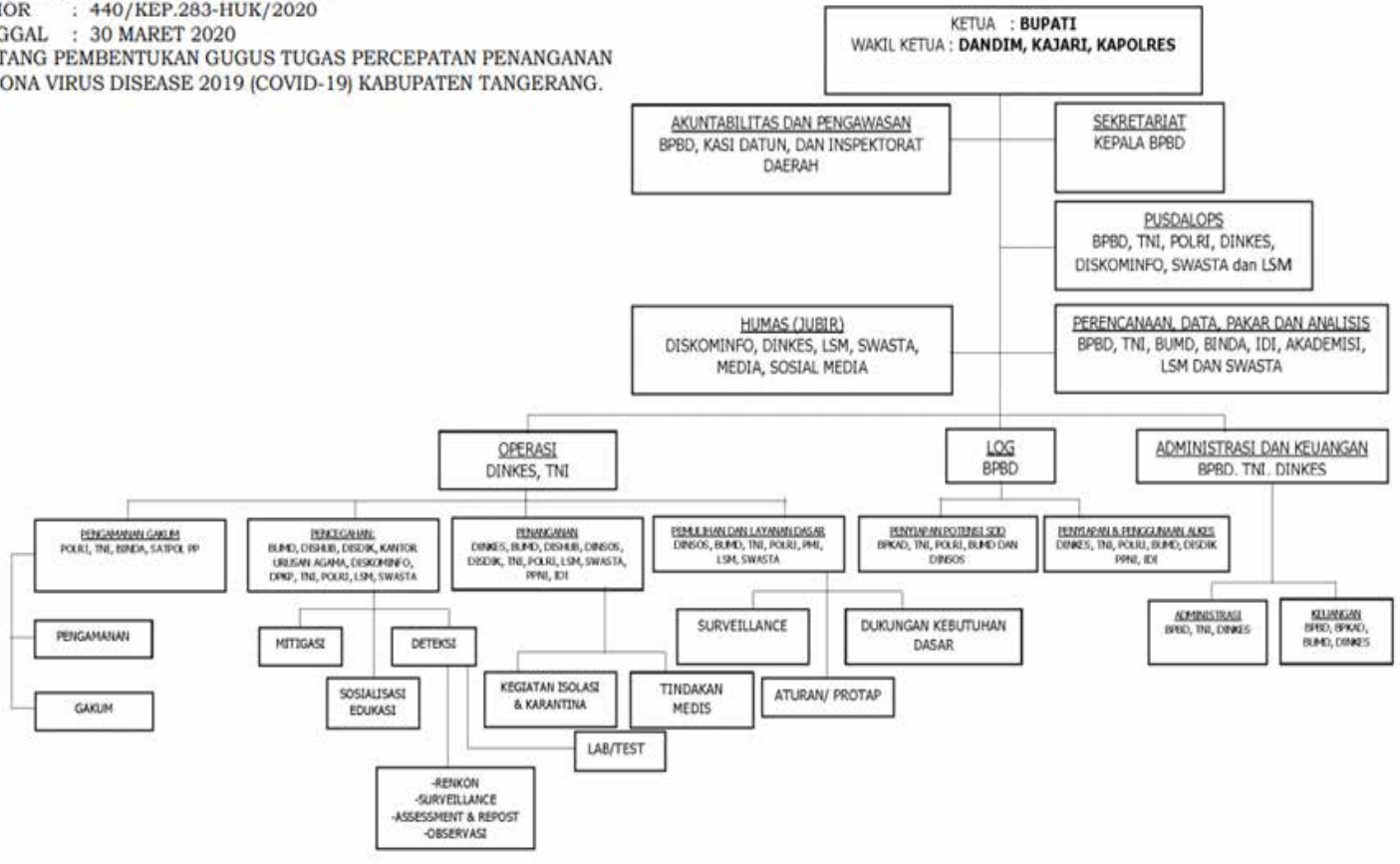
Untuk menanggulangi dan mengendalikan pandemi Covid-19, Pemkab Tangerang membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Tangerang. Pembentukan Gugus Tugas ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati NOMOR : 440/KEP.283-HUK/2020, tertanggal 30 Maret 2020. Gugus Tugas ini Bupati Tangerang sebagai ketua, sedangkan wakil ketua dijabat oleh Dandim, Kajari dan Kapolres. (Tabel.10)

Selain itu Pemkab Tangerang juga membentuk Satuan Tugas (Satgas), Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19, beranggotakan Kejakasaan, TNI. POLRI dan Instansi terkait di Kabupaten Tangerang.



Tabel 9. Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 440/KEP.283-HUK/2020
TANGGAL : 30 MARET 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TANGERANG.



Dalam SK tersebut disebutkan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi) Gugus Tugas/Satgas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat.

Dalam Tupoksinya, Ketua berugas;

a. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan.

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan.

d. Mengerahkan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan penanganan.

e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kabupaten Tangerang.

Sedangkan tugas Wakil Ketua adalah mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua gugus tugas tingkat Kabupaten.

Tugas Sekretariat meliputi a) administrasi surat menyurat; b) kegiatan protokoler; dan c) dukungan sekretariatan.

Tugas Humas meliputi a) komunikasi publik; b) agenda setting; c) strategi komunikasi; d) media monitoring; dan e) juru bicara

Sedangkan tugas Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis meliputi a) pengumpulan data; b) analisas; c) kajian; d) policy brief; e) protokol nasional; f) perencanaan; dan g) laporan capaian.

Untuk Operasi yakni Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan daerah.

Untuk Bidang Pencegahan bertugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

Sedangkan Bidang Penanganan bertugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar bertugas melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

Bidang Pengamanan dan Gakum bertugas melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan daerah.

Tugas Bidang Logistik yaitu memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.

Tugas Penyiapan Potensi Daerah yakni melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.

Tugas Penyiapan dan Penggunaan Alkes adalah penyedian logistik peralatan darurat di daerah.

Tugas Administrasi adalah Tata usaha administrasi.

Sedangkan tugas Bidang Keuangan bertugas Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.

Selain tugas pokok, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai lembaga akuntabilitas dan pengawasan yang bertugas melaporkan pelaksanaan administrasi dankinerja.

Fungsi lait Gugus Tugas adalah sebagai sebagai pusat pengendali operasi yang bertugas; a. Pengumpulan dan pengelolaan data (Data Base); b. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan c. Pelaporan.

Bukan hanya Gugus Tugas, Pemkab Tangerang juga membentuk Satgas (Satgas), Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan

Covid-19, beranggotakan Kejakasaan, TNI, Polri dan Istansi terkait di Kabupaten Tangerang. Pembentukan Satgas dan monitoring tersebut dikarenakan meningkatnya kasus positif Covid-19 di masyarakat yang beerasal dari Orang Tanpa Gejala (OTG). Menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, OTG adalah seseorang yang tidak bergejala tapi berisiko telah tertular virus corona dari pasien Covid-19. Selain itu, OTG memiliki kontak erat dengan kasus positif Covid-19.

Pembentukan Satgas dan Monitoring penanganan Covid-19 tingkat Pemkab Tangerang ini berdasarkan Perpres Nomor. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ada tiga tujuan pembentukan Satgas dan monitoring Covid-19 yaitu :

1. Penanganan bidang Kesehatan.

2. Pengamanan jaringan pengaman social.

3. Penanganan pemulihan dampak ekonomi.

Dibentuknya Satgas ini sendiri karena melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang, dan hasil dari proses Test Swab dan PCR atau Polymerase Chain Reaction, ditemukan banyak kondisi masyarakat yang terpapar tetapi dalam kondisi OTG.

Selain Satgas tingkat Kabupaten, Pemkab juga membentuk 7.732 Satgas tingkat Rukun Tetangga (RT) dan 1.653 Satgas tingkat Rukun Warga (RW). Satgas tingkat RT dan RW ini menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Di bentuknya Satgas ini karena masih meningkatnya kasus disebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Satgas Covid-19 yang dibentuk sampai ke tingkat RT/RW tersebut untuk mengoptimalkan peran RT dan RW dalam melakukan edukasi, pendataan hingga pelaporan dalam penanganan COVID-19.

a.4. Indikator COvid-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat nasional telah menetapkan beberapa indikator penentuan zonasi risiko penyebaran virus Corona di kabupaten/kota. Penetapan ini untuk memetakan daerah-daerah di Indonesia yang merupakan daerah-daerah zonasi risiko, menggunakan indikator-indikator kesehatan masyarakat. Terdapat 15 indikator utama. Dari 15 indikator kesehatan masyarakat itu terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga telah menetapkan empat zona risiko. Keempatnya yakni zona risiko sedang, zona risiko rendah, dan zona tidak terdampak.

Berikut 15 indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19:

1. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak. (target lebih besar sama dengan 50%)

7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif.

8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP.

9. Penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk.

10. Penurunan angka kematian per 100.000 penduduk.

11. Rt - angka reproduksi efektif kurang dari 1. (sebagai indikator yang ditriangulasi)

12. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu.

13. Positivity rate kurang dari 5%. (dari seluruh sampel diagnosis yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%)

14. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19

15. Jumlah tempat tidur di RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya.

Ketiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemi-

ologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Surveilans kesehatan masyarakat menyangkut kemampuan sistem kesehatan masyarakat untuk melakukan pemantauan, seperti deteksi kasus atau testing, pemantauan mobilitas penduduk serta pelacakan kontak.

Indikator terakhir, pelayanan kesehatan berfokus pada ketersediaan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit untuk penanganan Covid-19 dan alat pelindung diri (APD). Penerapkan indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan suatu daerah siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi berikutnya.

Salah satunya terkait dengan indikator epidemiologi, apabila suatu wilayah terjadi penurunan jumlah kasus selama 2 minggu sejak puncak terakhir ini sangat baik. Jumlah kasus ini tidak hanya pada kasus positif Covid-19 tetapi juga kasus ODP dan PDP atau kasus probable yang ada di wilayah itu.

Melalui ketiga indikator, dapat melihat tingkat risiko penularan Covid-19 suatu wilayah. Dengan penilaian berdasarkan indikator kesehatan masyarakat, masyarakat dapat mengetahui tingkat risikonya.

Gugus Tugas Nasional memetakan tiga tingkatan risiko, yaitu tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang pertanggal 9 Agustus 2020 menunjukan, Total Kasus sebanyak 2.506 kasus dengan terkobfirmasi positif sebanyak 411 kasus, PDP 889 orang dan ODP sebanyak 1 orang.

Dari kasus terkonfirmasi positif sebanyak 411 kasus, sembuh sebanyak 306 orang dan meninggal 18 orang. Sedangkan dari PDP 889 orang, 117 orang dalam proses pengawasan, 723 orang sembuh dan meninggal 49 orang. Sedangkan dari 1.206 ODP, dalam proses pemantauan sebanyak 23 orang dan sembuh 1183 orang.

Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, banyak upaya dilakukan Pemkab Tangerang seperti;

1. Tracing, testing dan treatment kasus Covid-19

- Meningkatkan pemeriksaan Swab PCR sampai mencapai target Bappenas

- Meningkatkan rapid test massal terutama di kecamatan dgn kasus tinggi

- Meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi utk pasien Covid-19

- Penyediaan Rumah Singgah Karantina Griya Anabatic

2. Penyediaan website Covid-19 untuk monitoring informasi

3. Penyediaan mobil jenazah dan lahan pemakaman kasus Covid-19

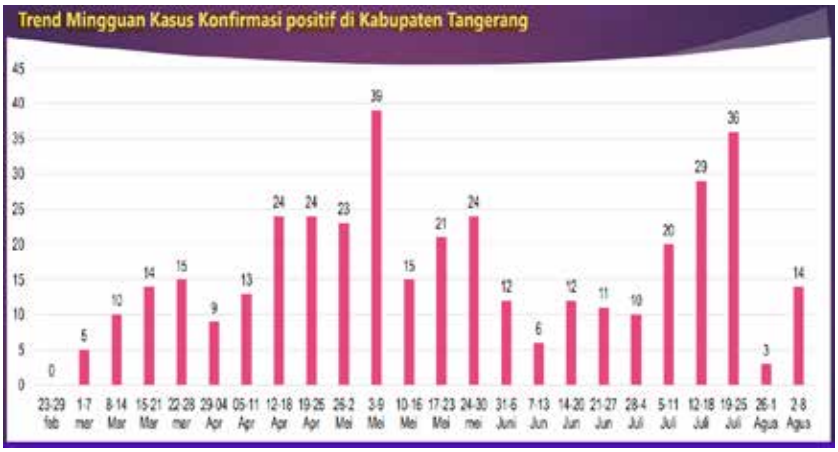
4. Pelaksanaan PSBB bertahap

5. Pelaksanaan check point, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Upaya yang dilakukan ini mengacu pada 15 indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, dimana didalamnya terkandung indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan indikator pelayanan kesehatan.

1. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%). Sementara trend mingguan kasus konfirmasi positif di Kabupaten Tangerang terjadi penurunan sebesar lebih dari 50 persen dari kasus puncak selama 2 minggu terakhir sehingga nilai skoring penurunan jumlah kasus positif adalah sebesar 0,225 (skor 3 kali bobot 0,075). (Tabel 10)

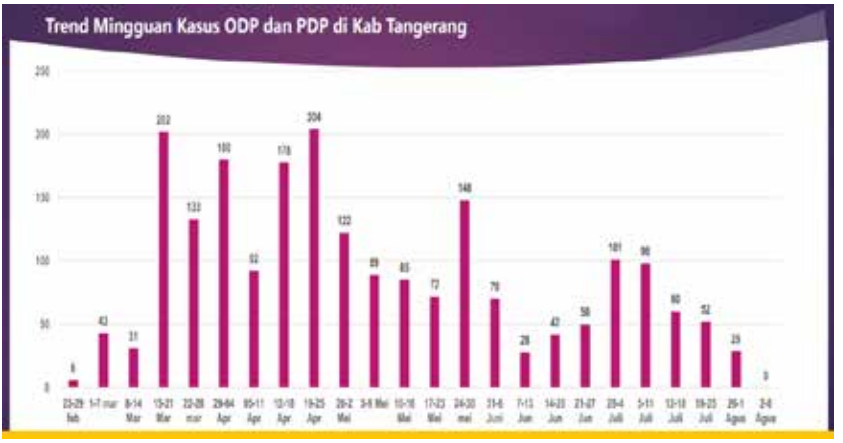
TABEL 10. Trend mingguan kasus konfirmasi positif/Indikator 1



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%). dalam dua minggu terakhir kasus ODP dan PDP di Kabupaten Tangerang terjadi penurunan sebesar lebih dari 50 persen dari kasus puncak selama 9 bulan terakhir, sehingga nilai skoring indikator 2 ini sebesar 0,225 (skor (3) dikai bobot (0,075). (Tabel 11)

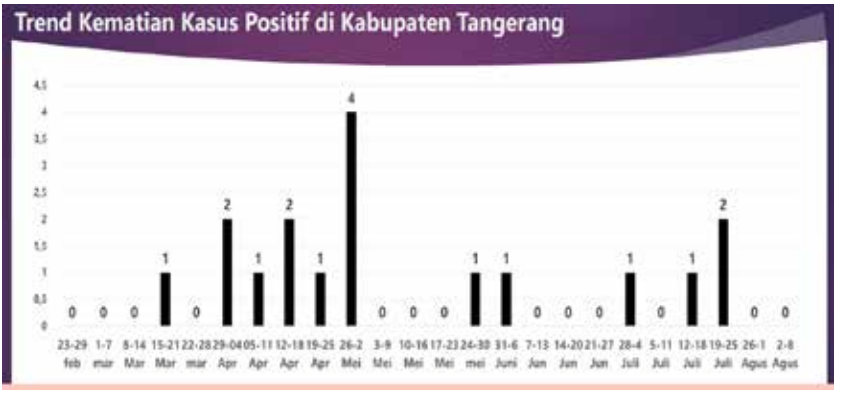
TABEL 11: trend Mingguan Kasus ODP dan PDP/indikator 2



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%). Kasus kematian positif Covid-19 di Kabupaten Tangerang, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50 persen dari kasus puncak selama 13 mingu terakhir, sehingga nilai skoring indikato 3 ini sebesar 0,3 (sekor 3 dikali bobot). (Tabel 12)

TABEL 12. trend Kematian Kasus positif/indikator 3



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar

sama dengan 50%). Trend Kematian Kasus ODP dan PDP di Kabupaten Tangerang terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 9 minggu terakhir dengan skor 0,27 (skor [3] dikali bobot [0,09]). (Tabel 13)

TABEL 13. Trend Kematian Kasus ODP dan PDP/indikator 4



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

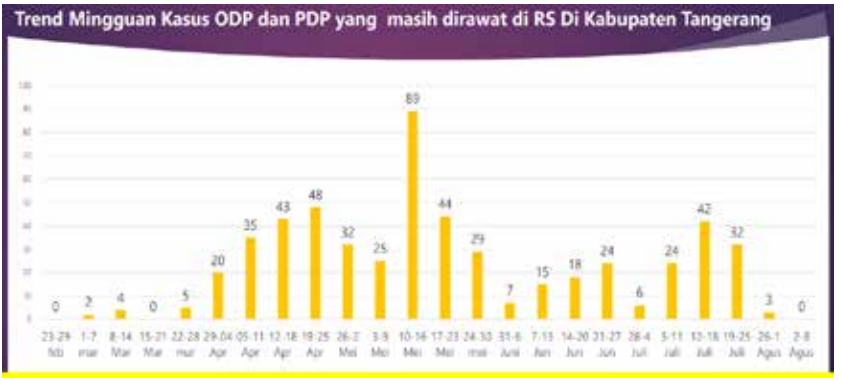
5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%). Sedangkan Kurva mingguan kasus positif dirawat di RS di Kabupaten Tangerang, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 8 minggu terakhir dengan skor 0,15 (skor [3] dikali bobot [0,05]). (Tabel 14)

TABEL 14. Trend Mingguan Kasus Positif yang masih dirawat di Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang/indikator 5



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

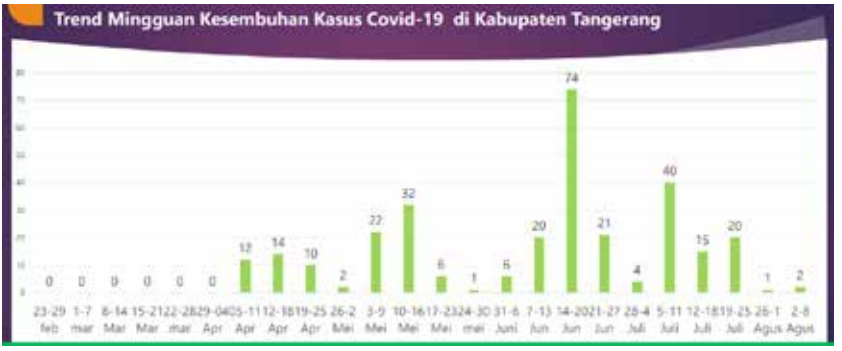
6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak (target lebih besar sama dengan 50%). Trend Mingguan Kasus ODP dan PDP yang masih dirawat di RS di Kabupaten Tangerang, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 11 minggu terakhir dengan skor 0,15 (skor [3] dikali bobot [0,05]). (Tabel 15)



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif. Kurva mingguan kesembuhan kasus positif Covid-19 masih fluktuatif namun cenderung naik, dengan skor 0,1 (skor [2] dikali bobot [0,05]). (Tabel 16)

TABEL 16. Trend Mingguan Kesembuhan Kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang/ ndicator 7.



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP. Kurva mingguan selesai pemantauan dan pengawasan (ODP dan PDP) di Kab Tangerang, terjadi kenaikan dalam 2 minggu terakhir dengan skor 0,1. (Tabel 17)

TABEL 17. Trend mingguan Kasus ODP dan PDP selesai dipantau dan diawasi di Kabupaten Tangerang/indikator 8.



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

9. Penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk. Kategori laju insiden 9,63 dengan nilai skor 2, sehingga nilai skoring indikator 9 ini sebesar 0,19 (skor [2] dikali bobot [0,095]). (Tabel 18)

Tabel 18: Laju Insidensi Kasus Positif Per 100.000 Penduduk/Indikator 9.



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

10. Penurunan angka kematian per 100.000 penduduk. Laju Kematian Kasus Covid-19 Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tangerang terjadi penurunan selama 14 minggu terakhir. Kategori laju kematian 0,43 dengan nilai skor 2,5 sehingga nilai skoring indikator 10 ini sebesar 0,1875 (skor [2,5] dikali bobot [0,075]). (Tabel 19)

TABEL 19. Laju Kematian Kasus Covid-19 Per 100.000 Penduduk /indikator 10



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

11. Rt - angka reproduksi efektif kurang dari 1 (sebagai indikator yang ditriangulasi). Trend angka Rt masih fluktuatif cenderung menurun (dikatakan kategori selalu menurun jika dalam kurun waktu 3 minggu berutut-turut nilai Rt < 1).Saat ini Rt rata2 di Kabupaten Tangerang sebesar 0,84. (Table 20)

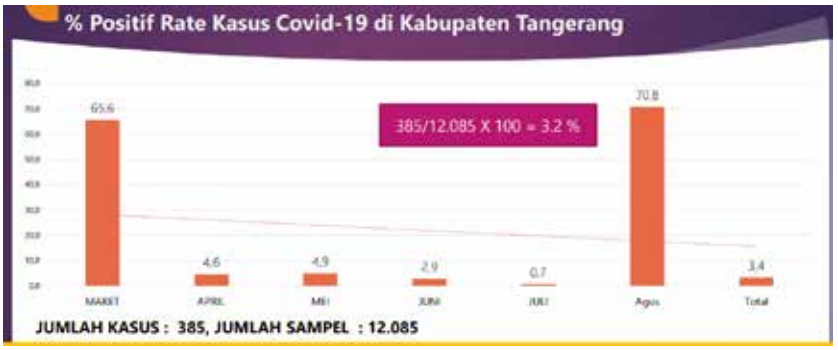
Tabel 20. Angka Reproduksi Efektif



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

12. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu. Sementara persentase Positif Rate Kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang sebesar 3,2 % masuk pada kategori 5 % < dengan nilai skor 3, sehingga nilai skoring indikator 12 ini sebesar 0,24 (skor [3] dikali bobot [0,08]). (Tabel 21)

TABEL 21. Persentase Positif Rate Kasus Covid-19/ indikator 12



Sumber: Paparan Proses Bisnis Penanganan Covid-19 Pemkab Tangerang 2020

13. Positivity rate kurang dari 5% (dari seluruh sampel diagnosis yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%). Sementara Jumlah Tempat Tidur (TT) di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung s.d ≥20% jumlah pasien positif Covid-19. Skor indikator 0,255.

14. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19. Jumlah TT di RS Rujukan mampu menampung s.d. ≥20% jumlah ODP, PDP & pasien positif Covid-19. Skor indikator 0,255.

15. Jumlah tempat tidur di RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19. Terdapat 22 rumah sakit non rujukan Covid-19 dengan TT 240 dan 44 Puskesmas di wilayah Kab Tangerang memberikan pelayanan Covid-19.

Melihat 15 indikaror tersebut, kondisi Covid-19 di Kabupaten Tangerang menunjukan perubahan. Dari Bulan Maret 2020 berwarna merah (Zona Merah) hingga bulan Agustus 2020

berubah status menjadi warna kuning (Zona Kuning).

a.5. Rumah Sakit Rujukan

Untuk merawat dan mengobati pasien Covid-19, Pemerintahan Kabupaten Tangerang telah menyiapkan Rumah Sakit Rujukan dan Ruang Isolasi di Rumah Sakit Umum Tangerang, RSUD Balaraja, dan RSUD Pakuhaji. Selain tiga rumah sakit milik pemerintah daerah, Pemkab Tangerang juga menunjuk 23 RSU Swasta dan 44 Puskesmas rujukan pasien ODP, PDP dan terkonfirmasi positif.

Sejumlah Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang:

1. Ciputra Hospital, Citra Raya, Desa Ciakar ,Kecamatan Panongan

2. RS Mitra Keluarga Gading Serpong Jl. Raya Legok-Karawaci No.20 Medang Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten.

3. RS Qadr, Komplek Islamic Village, Kelapa Dua, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten.

4. RS Siloam, Jalan Kelapa Dua Raya No.1001, RT.2/RW.2, Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

5. RSU Kabupaten Tangerang, Jl Jend. Ahmad Yani No.9, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

6. RSUD Balaraja, Jl. Rumah Sakit No.88, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten.

7. RSUD Pakuhaji, Jl. Raya Pakuhaji No.88, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

8. Siloam Hospital, Lippo Village Jl. Siloam No.06 Tangerang City, Banten.



a.6. Rumah Singgah

a.6.1 Griya Anabatic

Dalam rangka pencegahan dan menanggulangi covid-19, Pemkab Tangerang menyediakan rumah singgah bagi penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Griya Anabatic, Kecamatan Kelapa Dua. Griya Anabatic ini disiapkan sebagai fasilitas pasien agar cepat sembuh dalam penanganan, mulai pemberian makanan selama tiga kali sehari, asupan vitamin, pemberian program kebugaran sehingga pasien dapat nyaman dan pulih kembali serta dinyatakan sehat.

Selain asupan makanan, Griya Anabatic dilengkapi ruang ber-AC dan televisi. Ini agar secara psikologis pasien bisa bangkit kembali melawan virus dan lebih menusiawi, serta ditangani baik tenaga medis dan perawat jaga. Gedung ini pun dilengkapi dengan teknologi CCTV, sehingga pasien bisa terpantau pergerakan dan tidak sembarang. Siapa pun tak boleh masuk, kecuali petugas.

Griya Anabatic memiliki 192 unit kamar. Untuk pasien Covid-19 disediakan 100 kamar yang berlokasi di lantai 3 dan 4. Untuk

lantai 1 diperuntukan bagi tenaga medis. Ruang perawatan pasien virus corona berukuran 3 x 6 meter. Fasilitas penunjang seperti AC, kamar mandi, Wi-Fi dan lemari.

Rumah singgah tersebut dilengkapi fasilitas ruang isolasi untuk pasien Covid-19 dengan fasilitas Wifi, TV Cable, ruang pos kesehatan dengan tiga tempat tidur, tensi meter, thermometer non contact, dua EKG, satu ventilator mobile, delapan kursi roda, tiga ambulans, satu mobil jenazah, instalasi pengolahan air limbah, dan tempat pembuangan sampah medis.

Untuk jumlah relawan medis dan non medis yang terlibat mencapai 120 relawan, 56 personel TNI/Polri, 35 petugas keamanan, petugas kebersihan dan teknisi Griya Anabatic.

Rumah Singgah pasien Covid-19 Griya Anabatic di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang resmi ditutup. Langkah ini diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang seiring dengan terus menurunnya jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang.

Griya Anabatic sendiri mulai beroperasi sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 13 Juli 2020. Selama menjadi rumah singgah, Griya Anabatic sudah menampung hingga 234 pasien Covid-19 selama empat bulan. Dari jumlah itu, 225 pasien yang menjalani isolasi berhasil dipulangkan setelah dua kali pemeriksaan PCR hasilnya negatif.

Sementara untuk pasien yang masih dalam perawatan dipindahkan ke beberapa rumah sakit rujukan. Empat diantaranya dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang dan RS Siloam Kelapa Dua. Kemudian, lima pasien lagi dipindahkan ke ruang isolasi RSUD Kabupaten Tangerang.

Setelah di tutup, Pemkab Tangerang berencana akan kembali membuka fasilitas rumah isolasi atau rumah singgah Griya

Anabatic. Rencana dibukanya Kembali rumah singgah itu, karena angka positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang, terus Kembali mengalami peningkatan.

Rencana pembukaan Griya Anabatic penanganan Covid-19 tersebut diputuskan pada saat rapat persiapan pembukaan kembali rumah singgah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Dalam rapat tersebut hadir Komando Distrik Militer 05/10 Tigaraksa Letkol Infanteri Bangung Siregar, Kepala BPBD Bambang Sapto, Kasatpol PP Bambang Mardi, Kadinkes Dr. Desiriana, Kepala Bappeda Taufik Emil, dan Seluruh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tangerang.

a.6.2. Hotel Yasmin

Meski sudah diputuskan dalam rapat, namun Pemkab Tangerang batal membuka rumah singgah Griya Anabatic. Padahal, tempat yang berlokasi di Blok SA-20, Jalan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua itu disiapkan untuk merawat pasien OTG Covid-19 dengan pelayanan ala hotel. Namun penggunaan tempat itu batal dilakukan karena masih adanya kendala teknis. Sebagai penggantinya, Pemkab menetapkan Hotel Yasmin di Kecamatan Curug untuk menjadikan Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk merawat pasien Covid-19.

10 September 2020 Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meninjau langsung persiapan penggunaan Hotel Yasmin sebagai rumah singgah pasien Covid. Ia pun berharap, hotel tersebut segera dibuka untuk penanganan pasien Covid-19 khusus yang berstatus OTG.

Berbed dengan Griya Anabatic, Hotel Singgah Yasmin ini bisa merawat satu keluarga dalam 1 kamar. Srdangkan Griya



Anabatik yang sebelumnya dipakai jadi tempat sianggah, hanya dapat menampung 1 orang dalam 1 kamar.

Tanggal 17 September 2020, Hotel Yasmin Kecamatan Curug resmi beroperasi. Sebanyak 21 pasien OTG masuk pada hari pertama dioperasikannya Hotel Singgah tersebut.

Menurut catatan, Hotel Yasmin yang telah digunakan sebagai tempat isolasi OTG mulai 17 September 2020 sampai 12 Oktober 2020 mencatatkan ada 450 pasien yang dirawat di tempat itu.

a.6. Penyemprotan Disinfektan

Pemerintah Kabupaten Tangerang memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk menyemprotkan cairan disinfektan di pusat keramaian dan stasiun yang ada di Kabupaten Tangerang. Penyemprotan ini dilakukan untuk mempersempit penyebaran virus Corona serta memberikan sterilisasi dan membunuh bakteri dan virus berbahaya

Selain dilakukan oleh Dinas Kesehatan, penyemprotan Disinfektan juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana



Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang. Badan yang menanggulani bencana ini melakukan penyemprotan disinfektan 20 pasar gtradisional yang ada di Kabupaten Tangerang.Kabupaten Tangerang.

Penyemprotan disinfektan di Pasar Gudang Tigaraksa dan Pasar Modern Kelapa Dua tersebut dalam rangka pencegahan virus Corona yang lebih masif di titik keramaian masyarakat salah satunya pasar tradisional dan tempat umum swalayan, toko, gedung-gedung perkantoran, terminal, tempat ibadah, sekolah dan perumahan/pemukiman yang diindikasi ada yang terpapar Covid-19 serta area umum lainnya.

Dalam penyemprotan disinfektan di tempat umum ini, BPBD dibantu dengan PMI dalam melakukan penyemprotan terutama yang skala kecil (hanya menggunakan alat semprot kecil).

Selain oleh Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten, penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh personel kepolisian dari Polresta Tangerang. Polresta Tangerang mengerahkan 3 unit armoured water canon (AWC) untuk penyemprotan disinfektan

di ruang publik di Kabupaten Tangerang.

Penyemprotan ini dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, serta unsur TNI dari Kodim 0510 Tigaraksa. Penyemprotan dilakukan di tempat-tempat umum dan keramaian di sepanjang Jalan Baru Pemda Kabupaten Tangerang dan Alun-Alun Tigaraksa.

Polisi juga melakukan penyemprotan disinfektan di Perumahan Citra Raya Cikupa dan Perumahan Citra Raya, Panongan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena mobilitas masyarakatnya cukup tinggi.

Untuk mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19, Polresta Tangerang menyiapkan bilik disinfektan bagi pemohon SIM. Ada 2 bilik disinfektan disediakan di Gedung Satlantas Tangerang dan Markas Polresta Tangerang.

a.7. Gebrak Masker

Upaya lain untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) menggelar kegiatan Gerakan Bersama Menggunakan Masker (Gebrak Masker) di Eco Plaza, Citra Raya, Kecamatan Panongan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembagian 50 ribu masker. Kegiatan Gebrak Masker bertujuan mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai bentuk realisasi Gebrak patroli ke sejumlah lokasi pun dilakukan dan menegus masyarakat yang belum terbiasa menggunakan masker. Patoli dilakukan oleh Petugas dari Satpol PP, Polisi Polresta Tangerang dan TNI dari Kodim Tigaraksa. Mereka terus turun ke masyarakat guna mendisiplinkan. Kata dia, semua elemen jangan pernah lelah atau bosan mengedukasi masyarakat



untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

Gebrak Masker pun dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang. Gerakan ini dilakukan bersama oleh Kader PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa, hingga RW/RT.

Bersama anggota PKK, Asisten Bindang Pemerintahan dan Kesra Heri Heryanto, Sekretaris Gugus tugas Covid-19 Bambang Sapto dan Wakil Ketua PKK Nina Madromli, membagikan secara simbolis 1000 masker, Alat Pengukur suhu, Sabun batang dan hand sanitizer kepada 29 Kader PKK Kecamatan. Hal ini sebagai simbol gebrak masker terus dilaksanakan.

Dengan dibagikannya masker, sabun dan hand sanitizer, diharapkan kader PKK di wilayah dapat membantu menjadi triger di masyarakat sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga diri dari bahaya Covid-19.

Selain mengkampanyekan Gebrak Masker TP PKK Kabupaten Tangerang terus mengkampanyekan gerakan 4M (memakai



masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan)

Gebrak Masker juga dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Kabupaten Tangerang. Selain membagikan 5000 masker, Pokja wartawan juga membagikan puluhan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dengan tema "jurnalis peduli covid-19". Para wartawan ini membagikan 5.000 masker di sejumlah titik yang ramai dilintasi. Lokasi yang menjadi titik pembagian masker yakni di Jalan Pemda Kecamatan Tigaraksa, Kawasan Telaga Bestari, Citra Raya, Rumah Karantina Pasien COVID-19 Hotel Yasmin, serta Lampu Merah JHL Gading Serpong.

B. Penanggulangan Dampak Covid

B.1. Anggaran

Untuk dapat menangani dampak pandemi, maka dibutuhkan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah realokasi dan refocusing anggaran. Dasar hukum realokasi dan refocusing adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.O7/2O2O Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Selama pandemi Covid-19, terjadi setidaknya terjadi tiga kali realokasi dan refocusing anggaran. Realokasi dan refocusing terkait Realokasi Pengurangan Belanja Pegawai (BTL) Rp 17.656.883.946, Realokasi Belanja perjalanan dinas luar daerah DPRD sebesar Rp 10.352.400.000, Realokasi Pengeluaran Pembiayaan (SKPKD) sebesar Rp 5.000.000.000, dan Silpa 2019 (SKPKD) Rp 50.000.000.000.

Realokasi dan refocusing ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 07 April 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Realokasi Anggaran difokuskan melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kesehatan, baik pencegahan maupun operasional tindakan kesehatan.

Pada realokasi dan refocusing ke dua, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Realokasi Anggaran difokuskan melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Jaring Pengaman Sosial



(JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Ada lima hal pada realokasi dan refocusing ke dua. Kelimanya yakni Belanja Modal Konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Rp.63.393.618.050, Belanja Modal Infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga Rp.29.913.099.950, Belanja Modal Pengadaan Lahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Rp.52.000.000.000, Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah Rp. 2.836.000.000, dan Belanja Barang dan Jasa (Operasional) pada Sekretariat Daerah Rp. 1.857.282.000. Total anggaran pada realokasi dan refocusing ke dua sebesar 150.000.000.000.

Sedangkan pada realokasi dan refocusing ke tiga terjadi pada rasionalisasi pendapatan, yang terdiri rasionalisasi belana tidk langsung maupun rasionalisasi belanja angsung. Rasionalisasi pendapatan Rp 1.119.093.147.927, Rasionalisasi Belanja Tidak Langsung Rp 141.259.287.236 dan Rasionalisasi Belanja Langsung Rp 1.150.352.400.000. Jumlah Rasionalisasi Belanja Rp 1.291.611.687.236.

Realokasi dan refocusing ke tiga ini Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Realokasi Anggaran difokuskan melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Dampak Ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19

Selain realokasi dan refocusing yang dilakukan Pemkab Tangerang, Realokasi anggaran juga terjadi lewat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten. NIlai realokasinya Rp 60.000.000.000, yang terbagi dalam Penanganan Kesehatan Rp 15.000.000.000, Penanganan Jaring Pengaman Sosial Rp 35.000.000.000, dan Penanganan Dampak Ekonomi Rp 10.000.000.000. Dasar hukum realokasi bantuan keuangan Pemprov Banten ini yakni Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19.

Realokasi juga berasal dari dana desa dan tranfer pusat. Dasar Hukum realokasi dana desa ini adalah Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor :1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan kepada Para Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa Seluruh Indonesia.

Realokasi dana desa dan tranfer pusat terdiri dari Dana Desa (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) 12.300.000.000 (yang digunakan untuk Oprasional Gugus Covid-19 Tingkat RT/RW sebesar Rp. 50 Juta/Desa), dan Dana Desa (Transfer Pusat) Rp 123.000.000.000 (Untuk Bantuan Langsung Tunai Masyarakat terdampak Covid-19 Tuingkat Desa sebesar Rp. 500 juta/Desa). Realokasi dana desa dan tranfer pusat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Realokasi pada APBDes.

Total alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabuppaten



tangerang sebesar Rp 610,827,823,254, yang berasal dari APBD Kabupaten tangerang Rp 427,827,823,254, Bantuan keuangan Provinsi Banten Rp 60,000,000,000, dan tranfer pemerintah pusat melalui dana desa Rp 123,000,000,000.

B.2. Penanggulangan Dampak Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid, dan tetap menjalankan sejumlah program unggulan. Dalam penangan dan pengendalian Covid-19, Pemkab Tangerang telah menjalankan sejumlah kebijakan dibidang kesehatan, Jaminan Pengaman Sosial (JPS), penanganan dampak ekonomi, penanganan pendidikan dan terus melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Dalam penanganan Covid-19 dibidang kesehatan, Pemkab Tangerang telah menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan seperti menyiapkan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), 44 Puskesmas, 23 rumah sakit umum swasta dan dua rumah singgah.



Selain itu, Pemkab Tangerang juga sudah melakukan rapid test kepada 42.056 orang, swab test kepada 32.007 orang, melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kecamatan, pasar tradisional, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Bahkan Pemkab Tangerang juga telah dan terus melakukan sosialisasi Gerakan Masker (Gebrak Masker) secara masif untuk memutus rantai Covid-19 di tengah masyarakat.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan, Pemkab Tangerang juga memberikan fasilitas tempat pemakaman bagi korban meninggal akibat Covid-19. Ada sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disiapkan untuk korban meninggal akibat virus ini, seperti di TPU Buni Ayu, Kecamatan Sukamulya, TPU Kramat Wates di Kecamatan Kelapa Dua dan TPU Mekar Bakti di Kecamatan Panongan.

1. Jaring Pengaman Sosial

Seperti diketahui, Covid-19 nyaris melumpuhkan sektor ekonomi dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bagi

masyarakat korban PHK atau usaha yang gulung tikar, Pemkab Tangerang memberikan bantuan baik berupa barang dan uang tunai lewat Jaminan Pengaman Sosial (JPS).

Bantuan lewat JPS ini diberikan kepada penerima Bantuan Sosial Tunia (BST). Agar penerima BST tepat sasaran maka Bupati Tangerang membuat surat Nomor : 471.11/1315-Dinsos/2020 Tanggal 13 April 2020 Perihal Pendataan Masyarakat Terdampak Covid-19, dimana kriteria calon penerima BST adalah :

a. Keluarga PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena positif Covid-19.

b. Asisten rumah tangga dan pekerja/karyawan yang di PHK/ dirumahkan,

c. Tukang ojek pangkalan, tukang becak dan supir angkutan umum yang tidak beroperasi.

d. Pedagang asongan, pedagang keliling yang sudah tidak bekerja lagi,

e. Tenaga/pekerja harian lepas seperti tukang bangunan dan buruh.

f. Janda dengan sosial ekonomi yang rentan,

g. Petani penggarap dan nelayan, dan

h. Penyandang disabilitas.

Ada empat JPS yang diberikan kepada warga Kabupaten Tangerang yang terdampak, yakni melalui bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan melalui dana desa. Bantuan berbentuk uang dan paket sembako.



Untuk JPS yang disalurkan oleh pemerintah pusat berupa uang, diberikan kepada 155.980 Kepala Keluara/KK (untuk bulan Mei dan Juni), 158.321 KK (bulan Juli, dan 154.743 KK (Agustus dan September). Nilai bantuan untuk bulan Mei sampai dengan Juli sebesar @ Rp 600.000, dan nilai bantuan Agustus-September sebesar @ Rp 300.000. JPS bantuan Pusat ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Untuk JPS yang disalurkan oleh pemerintah provinsi, diberikan kepada 147.546 KK. Jumlah realisasi penerima bantuan tahap pertama sebanyak 92.821 keluarga, dan penerima bantuan dalam proses yang akan dberikan sampai dengan bulan oktober sebanyak 54.719 KK. Setiap KK penerima bantuan sebesar @ Rp 600.000. JPS ini bekerja sama dengan Bank Banten.

Sedangkan JPS dari Pemkab Tangerang, diberikan kepada 83.333 KK. Jumlah realisasi tahap pertama sebanyak 74.908 KK. Sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 8.325 KK. Penerima bantuan masing-masing mendapatkan bantuan uang @Rp 600.000. Untuk penyalurkan bantuan ini, Pemkab Tangerang bekerjasama dengan Bank BRI.

Selain bantuan sosial, Pemkab Tangerang juga sudah memberikan bantuan berupa paket sembakoyang diberikan kepada 9.043 KK.

Untuk JPS yang menggunakan dana desa, diberikan kepada 61.691 KK yang tersebar di 246 desa. Teknis pelaksanaannya, kepala desa langsung memberikan kepada masyarakat desa yang terdata. Untuk pemberian bantan bantuan tahap I, yakni April-Juni, bantuan berikan berupa uang tunai masing-masing @ Rp600.000/KK, dan bantuan Tahap II yag diberikan antara Juli-September, bantuan bantuan berikan berupa uang tunai masing-masing @ Rp300.000/KK.

Perlu diketahui, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BLT terbagi dalam dua ketegori. Kategori pertama, yakni desa yang mendapat ADD dari pemerintah pusat di atas Rp 1 miliar, dana bantuan sosial tunai yang harus dialokasikan sebesar 35 persen dari dana desa. Sedangkan desa yang mendapat ADD dari pemerintah pusat di bawah Rp 1 miliar, dana bantuan sosial tunai yang harus dialokasikan sebesar 15 sampai dengan 20 persen dari dana desa.

C. Penanganan Dampak Ekonomi

Selain bidang kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga sangat berdampak dan mempengaruhi sektor pendidikan hingga sektor ekonomi. Untuk membantu memulihkan dampak ekonomi, Pemkab Tangerang meluncurkan empat skema pemulihan dampak ekonomi.

Empat skema pemulihan dampak ekonomi itu, yakni Subsidi Bantuan Bunga, Bantuan Usaha Pertanian, Bantuan Permodalan Skema Covid dan Bantuan Usaha Perikanan. Empat Skema itu termuat dalam aplikasi Sistem Bantuan Masyarakat (Sibamas).

1. Skema Bantuan Subsidi Bunga

Skema bantuan subsidi bunga, skema ini memberikan bantuan subsidi bunga pada debitur atau nasabah BUMD Kabupaten Tangerang yang meliputi: Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja, BPR Kerta Raharja, serta nasabah UPTD Pendanaan Dana Bergulir (UPDB) Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang dengan skema yang dibayarkan oleh APBD Kabupaten Tangerang, dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020.

2. Skema Bantuan Pertanian

Skema bantuan pertanian, skema ini membantu sektor usaha pertanian sebagai upaya dari pengurangan dampak ekonomi pasca Covid-19 pada para petani dan peternak. Skema bantuan ini dimulai dari upaya pemberian sarana prasarana, pembelian produksi gabah atau beras petani, pengadaan cadangan pangan hingga pengembangan usaha peternakan dan pertanian.

Skema Bantuan Pertanian yakni berupa bantuan Ketahanan Pangan berupa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemkab Tangerang yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2020 sebesar Rp. 1.459,000.000, dan bantun Ketahanan pangan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD KabupatenTangerang TA 2020 sebesar Rp. 5.562.750.000.

a. Kegiatan bantuan ketahanan pangan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten digunakan untuk pembelian Gabah Kering Giling (GKG) kepada kelompok tani sesuai HPP sebesar Rp.700.000.000; Stimulans sarana produksi pertanian berupa benih padi dan pupuk urea sebesar Rp.723.750.000.

b. Sedangkan penggunaan bantuan bersumber anggaran BTT APBD Kabupaten Tangerang digunakan untuk pembelian



gabah, revitalisasi mesin penggilan padi, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pengembangan usaha peternakan; dan penyediaan sumber air di lahan pertanian.

Jumlah penerima manfaat bantuan ketahanan pangan sebanyak 100 Poktan/Ga Poktan. 1 Poktan beranggota rata-rata 20 orang. Total penerima manfaat 2.000 orang petani.

Skema bantuan ini nantinya diharapkan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tangerang, serta keberlanjutan usaha sektor pertanian dan peternakan agar tetap dapat berjalan, yang pada akhirnya membantu meningkatkan derajat masyarakat petani di desa-desa.

3. Bantuan Perikanan

Skema Bantuan Perikanan. Skema bantuan perikanan ini bertujuan untuk membantu sektor keberlanjutan usaha perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Pada sektor ini, kegiatan diarahkan kepada ketahanan pangan dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat serta keberlangsungan kegiatan perikanan, seperti penangkapan budidaya ikan serta pengolahan ikan.

Skema bantuan perikanan ini bertujuan untuk membantu sektor keberlanjutan usaha perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan.

Alokasi Anggaran = Rp. 10.458.937.500. Skema bantuan perikanan ini diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan penerima bantuan sebanyak 2.500 orang, dan penerima bantuan yang terdampak hasil kegiatan sebanyak 3.500 orang.

Kegiatan bantuan perikanan ini diarahkan kepada pembelian hasil budidaya ikan sebanyak 100.000 Kg; Bantuan BBM @ Rp.500.000 sebanyak 400 Kapal; Pembelian produk hasil pengolahan ikan sebanyak 1000 Paket; Bantuan pelatihan dan peralatan olahan ikan untuk 25 kelompok; Bantuan alat tangkap ikan sebanyak 250 Unit; Bantuan mesin kapal sebanyak 22 unit; Bantuan budidaya lele yang diberikan kepada 480 orang dan 72 kelompok pembudidaya; Bantuan budidaya ikan nila sebanyak 100 Paket yang diberikan kepada 49 orang dan 17 Kelompok budidaya; Bantuan benih bandeng sebanyak 3 juta ekor kepada 426 orang dan 7 kelompok; dan Bantuan budidaya ikan hias untuk 5 kelompok.

Untuk bantuan perikanan ini diarahkan kepada pembelian hasil budidaya ikan sebanyak 100.000 Kg terdiri dari (1) Pembelian hasil produksi budidaya ikan air tawar segar sebanyak 50.000 Kg (2) Pembelian hasil produksi budidaya ikan payau segar sebanyak 50.000 Kg. Hasil pembelian ikan akan disalurkan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang dan gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan untuk diberikan kepada yang terdampak.

Sedangkan bantuan dalam program pengelolaan dan pemberdayaan nelayan berupa pengadaan sarana rantai dingin untuk 3 TPI. Bantuan Berupa 3 paket freezwe ukuran 700 liter untuk 3

TPI. Untuk bantuan operasional melaut berupa bantuan paket perbekalan melaut bagi 400 Kapal nelayan, dengan masing-masing BBM Solar seharga Rp 500.000.

Ada dua kegiatan untuk program pengembangan dan kelembagaan perikanan. Keduanya yakni, pengadaan sarana rantai dingin untuk kelompok pengolah dan pembelian produk hasil pengolahan perikanan. Pengadaan sarana rantai dingin untuk kelompok pengolah berupa bantuan pembelian freezer 10 unit untuk 10 kelompok pengolah. Sedangkan pembelian produk hasil pengolahan perikanan, bantuan berupa pembelian 19 produk hasil olahan pengolah.

Pada program pelatihan diversifikasi olahan bernilai tambah, ada dua kegiatan yang dilakukan yakni pelatihan dan pemberian sarana prasarana serta pemberian sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pengolahan hasil ikan sebanyak 25 paket, kepada 25 Kelompok (20 org/kelompok) di 12 Kecamatan. Rinciannya, pelatihan diversifikasi olahan bernilai tambah. sedangan pemberian sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan berupa pemberian sarana prasarana seperi freezer box, food procesor, pisau, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas, box container, timbangan digital, panci alumunium, baskom stainless, mixer stainless steel, blender dan lain sebagainya.

Untuk bantuan pembudidaya ikan nila, diberikan sebanyak 100 paket untuk 49 orang dan 17 kelomopok di 10 Kecamatan. Setiap 1 paket terdiri dari kolam bundar berdiameter 1,7 meter, benih ikan nila, pakan ikan, aerator dan probiotik.

Untuk bantuan pembudidaya ikan bandeng, bantuan yang diberikan berupa benih ikan bandeng yang dibagi ke dalam 4 paket bantuan, dengan total 3 juta benih bandeng, atau terdapat 426

orang dan 7 kelompok (94 org) di 5 Kecamatan. Setiap paket terdiri atas benih bandeng.

Bantuan untuk Budidaya mina (magot inovation aquaculture) diberikan berupa paket. Tiap paket terdiri dari insektarium, larvarium penetasan, larvarium pembesaran, rak larvarium penetasan, mesin pencacah sampah makanan, troli, timbangan digital, motor roda Tiga dan hanggar/gedung)

Bantuan Budidaya ikan hias diberikan kepada budidaya komoditas ikan hias cupang 1 paket, diskus 1 paket, louhan 1 paket dan ikan oscar 1 paket. Setiap paket terdiri dari akuarium, rak besi akuarium, aerator, keran aerator, instalasi aerator, filter aerator aquarium Fish tank biochemical double spons.

4. Skema Bantuan Permodalan

Skema bantuan Permodalan melalui aplikasi SIBAMAS (sistem bantuan masyarakat). Ini merupakan rancangan program dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya sebagai upaya peningkatan usaha mikro kecil dan tenaga kerja yang terdampak PHK akibat Covid-19. Salah satu upayanya, yaitu dengan menstimulasi dan memulihkan pelaku usaha mikro dan penengah, agar kegiatan usahanya tetap berjalan. Selain itu, tujuan lain adalah mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang usaha bagi korban PHK untuk menjadi wirausaha baru.

Program bantuan permodalan ini akan dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dengan mekanisme bantuan sebesar Rp 5 sampai Rp 10 juta perorang untuk meningkatkan usahanya, dan juga menumbuhkan wirausaha baru dari tenaga kerja yang di PHK.

Bantuan diberikan kepada UMKM terdampak dan wira usaha

baru. Bantuan ini bersumber bantuan UKM Provinsi Banten melalui bantuan keuangan sebanyak 2.870 UKM, dan Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN).

Dua kelompok itu, yakni kelompok peserta korban PHK dan kelompok pelaku UMKM terdampak Covid-19. Untuk kelompok peserta korban PHK, diharuskan memenuhi peryaratan seperti ber-KTP dan tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, memiliki rencana usaha dan rencana tempat usaha, calon penerima tidak pernah menerima bantuan usaha sejenis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta usaha yang didirikan bukan jenis usaha terlarang atau berbahaya.

Sedangkan bagi kelompok pelaku UMKM terdampak harus memenuhi peryarakat, seperti ber-KTP dan tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, mendapat surat keterangan desa/kelurahan, membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB), membuat Cash Flow (Omset sebelum masa covid dan pada masa Covid-19), calon penerima tidak pernah menerima bantuan usaha sejenis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta usaha yang didirikan bukan jenis usaha terlarang atau berbahaya.

D. Penanganan Pendidikan

Di bidang pendidikan, dampaknya sangat terasa pada kegiatan belajar dan mengajar (KBM). Baik siswa dan pendidik, terpaksa harus belajar mandiri dengan menerapkan pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kendati demikian, PJJ ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, setelah sejumlah operator memberikan bantuan kepada siswa-siswa di Kabupaten Tangerang.

Pelajar mulai tingkatan PAUD sampai dengan tingkat SMP mendapatkan bantuan Paket Internet Kartu Merdeka Belajar dari berbagai operator seluler. Bantuan ini untuk mendukung kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh (PJJ) kepada 239.846



pelajar. Tiap siswa mendapat masing-masing 10 Gigabite (GB).

Terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah dihentikan sementara selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Metode pembelajaran selama PSBB dilakukan melalui metode pembelajaran jarak jauh. Peserta didik belajar di rumahnya masing-masing. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang diteken Gubernur Banten Wahidin Halim pada 14 Juni 2020.

Untuk tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten juga mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan pelajara tatap muka di kelas melainkan dengan metoda daring atau online.

Sementara untuk tingkat SD dan SMP pelaksanaan KBM telah diatur melalui keputusan bersama (SKB) empat menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan

pelaksanaan pendidikan di daerah.

Berdasarkan kalender Tahun ajaran baru, betul tanggal 13 Juli 2020 sebagai KBM tetapi karena ada SKB empat menteri sebagai panduan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19, maka sekolah tidak diperbolehkan KBM termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tatap muka tetapi secara oline.

Terkait pendaftaran ulang secara langsung, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Wilayah Kabupaten Tangerang dilaksanakan selama tiga hari mulai 13 – 15 Juli 2020, dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk kegiatan lanjutan PPDB di SDN/SMPN Wilayah Kabupaten Tangerang, dilaksanakan pendaftaran ulang siswa baru secara langsung, sesuai dengan aturan PPDB bagi siswa yang diterima dengan membuktikan persyaratan PPDB, membawa fotocopy/ bukti upload yang telah dilaksanakan secara Online. Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan perhatikan protokol kesehatan, tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker dan disiapkan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer di sekolah.

Dinas Pendidikan juga mengharuskan pendaftaran ulang siswa baru harus menggunakan sistem sesi atau gelombang, tujuannya tentu saja, untuk menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan di sekolah.

Sedangkan terkait kegiatan belajar mengajar termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tidak boleh ada kegiatan tatap muka, melainkan dengan metode daring atau online. Karena hal tersebut telah diatur melalui SKB Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19.

“Bila ada ditemukan sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka maka sekolah tersebut akan kita tinjau izin operasionalnya, dan bila sekolah negeri melaksanakan maka kita tinjau SK pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.

E. Pelayanan Publik

e.1 Pelayanan Dukcapil

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar, sementara waktu, menunda mengurus dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk). Hal ini merupakan cara social distancing (mejaga jarak antar-warga) dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mengatakan langkah itu diambil berdasarkan arahan dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagi tindaklanjut arahan Dirjen Kependudukan dan catatan Sipil, Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mengeluarkan surat edaran Disdukcapil No. 470/324-DKPS tanggal 17 Maret 2020. Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat Bupati Tangerang No. 443.2/1015-.um/111/2020 tanggal 15 Maret 2020, perihal imbauan antisipasi penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, pihaknya akan melayani kepengurusan adminduk jika itu dalam skala darurat, seperti mengurus atau membuat BPJS Rumah Sakit, bank dan lainnya. Hanya saja, dalam prosesnya, pihaknya memberlakukan aturan berbeda, yakni melalui pesan aplikasi WhatsApp atau SMS.

Bentuk pelayanan melalui WA dan SMS bertujuan untuk menghindari keramaian masyarakat di tempat pelayanan, seperti tertuang dalam imbauan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.



Dengan begitu, petugas jaga yang melayani masyarakat juga bisa bekerja dengan tenang dan tidak takut tertular Covid-19.

e.2. Pelayanan Perijinan

Penutupan pelayanan untuk Penyelenggaraan Perizinan dan Pengaduan Tatap Muka juga dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.atap muka ini untuk pencegahan penyebaran virus Corona (Covid 19). Pihak DPMPTSP akan melayani secara online dan offline lewat email.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan informasi pengaduan secara tatap muka ditutup sebagai bentuk kewaspadaan dan antisipasi terhadap resiko penyebaran serta pencegahan Covid 19. Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang menginginkan pelayanan perizinan dan pelayanan penananaman modal dapat menghubungi aplikasi perizinan dan website DPMPTSP.

Untuk memudahkan pelayanan, DPMPTSP membuat aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (SIPINTER 2)

dengan cara pemohon masuk melalui sipinter.tangerangkab.go.id, kemudian pemohon bisa secara langsung mengikuti panduan pada aplikasi Sipintar 2 tersebut

Penutupan pelayanan tatap muka tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat edaran imbauan antisipasi penyebaran Covid-19 tertuang dalam Nomor : 443.2/1015-Bag.Um/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020.

Pada pelaksanaan perizinan disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan yang sudah protap satgas virus Corona, baik pegawai DPMPTSP maupun yang berkunjung akan diukur suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer.

Ada beberapa jenis perizinan yang bisa dilakukan secara online diantaranya adalah izin prinsip penanaman modal , izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin prinsip penggabungan penanaman modal perusahaan, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) , izin usaha jasa kontruksi (IUJK), izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin reklame, izin reklame kendaraan, izin billboard berkontruksi diatas 20M2, izin reklame billboard kecil/papan merk/nama/neon box, izin usaha perdagangan (IUP), izin usaha toko modern, izin usaha penyelenggaraan parkir, izin rumah sakit kelas C dan D, dan pelayanan kesehatan, izin mendirikan rumah sakit, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional.

DPMPSP juga melayani izin lembaga pelatihan kerja skala daerah secara online, izin pembuangan limbah cair (IPLC), izin mendirikan bangunan (IMB), izin prinsip, izin lokasi, izin rencana tapak garis besar (master plan), izin praktek tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, surat praktek mandiri (ion dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis izin praktek mandiri



bodan), izin lingkungan meliputi izin UKL/UPL, izin tempat sementaa limbah B3, tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Selain itu DPMPTSP Kabupaten Tangerang buka pendaftaran Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Online. Warga asing dan pelaku yang akan memasuki wilayah Kabupaten Tangerang bisa memperoleh SIKM dengan cara daftar di website Covid-19. tangerangkab.go.id., dan ppid.tangerangkab.go.id.

SIKM berlaku selama PSBB ketiga bagi warga asing, baik perorangan maupun pelaku usaha yang berdomisili di luar Jabodetabek, sekaligus pelayanan administrasi untuk warga karena tugas, pekerjaan dan emergency selama masa PSBB harus melakukan perjalanan dinas masuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Sektor usaha yang diizinkan bepergian/beroperasi selama masa PSBB, yaitu sektor kesehatan, keuangan, industri strategis, bahan pangan/makanan/minuman; logistik; energi; perhotelan; komunikasi dan teknology informasi; konstruksi; kebutuhan sehari-hari dan pelayanan dasar, utilities publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

Perjalanan orang berpergian dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu : perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu).

Surat Izin Masuk ini terseut mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang.

F. Program Unggulan di Masa Pandemi

Meski Pemkab Tangerang terus disibukkan dengan penanganan dan pengendalian Covid-19, Pemkab Tangerang juga terus menggenjot program unggulan. Ada empat bidang ungulan yang terus dilakukan selama pandemi. Keempat bidang itu yakni bidang pendapatan, bidang infrastruktur, bidang pemukiman dan bidang ketahanan pangan.

Dalam bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang telah meluncurkan sejumlah program, seperti Program Gebyar Agustus, September Bangkit dan Oktober Gemilang. Program-program ini untuk memberikan insentif pajak kepada Wajib Pajak (WP). Pemberian insentif itu berupa penghapusan denda PBB-P2 sebesar 100 persen; pengurangan PBB-P2 Maksimal 30 persen; penundaan jatuh tempo hingga 31 Oktober 2020; keringanan 100 persen untuk PBB-P2 golongan I masa Pajak Tahun 2020 yang sudah ditetapkan TNT 1 Agustus 2020; serta Discount 5 persen ketetapan BPHTB.

Jumlah Pemberian Insentif PBB P2 dan BPHTB yang telah diberikan kepada Wajib Pajak selama program tersebut sebesar Rp.25.370.921.116,-

Di bidang infrastruktur, Pemkab Tangerang juga terus melak-



sanakan pembangunan di 46 titik yang tersebar di 17 kecamatan. Pembangunan infrastruktur itu meliputi pembangunan jembatan; peningkatan jalan; pendestrian jalan; normalisasi sungai; rehabilitasi jalan; peningkatan saluran pembuangan; pembagunan tanggul; dan pembangunan saluran air.

Untuk bidang pemukiman, Pemkab Tangerang terus menggenjot rehabitasi rumah tak layak huni (RTLH) lewat program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah rumah yang sudah direhabilitasi sejak tahun tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 ini, sebanyak 6.681 rumah. Ke 6.681 rumah yang direhabilitasi ini menggunakan sumber dana dari APBD sebanyak 4000 unit (Gebrak Pakumis) dan 2.681 rumah yang bersumber dari APBN (Bantuan Stimulan Perumahan).

Sedangkan untuk bidang ketahanan pangan, Pemkab Tan-

gerang telah membangun Pergudangan Cibadak Indah No. 98 di Jalan Raya Serang Sukanegara, Kecamatan Cikupa, dan Pergudangan Kampung Melayu. Untuk Pergudangan Cibadak, akan difokuskan untuk menyimpan beras beras. Daya tampung gudang ini sebanyak 700 ton. Selain itu, gudang ini berupa Cold Storage yang bisa menampung daging, ayam, ikan sebanyak 34 ton serta sayur mayur. Sedangkan pergudangan Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang memiliki luas 2.000 meter dan mampu menampung 500 ton beras.

Gudang-gudang tersebut nantinya bakal menampung dan menjadi gudang penyimpanan produk dan bahan pokok untuk keperluan warga, baik dari hasil petani dan nelayan di Kabupaten Tangerang maupun luar Kabupaten Tangerang. Kehadiran tambahan gudang tersebut diharapkan dapat lebih menjaga stabilitas dan pasokan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

BAB V

PRESTASI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020

A. KEGIATAN

Dalam tahun 2020, banyak kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melayani masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik guna menuju Tangerang lebih gemilang.

1. Bupati Tinjau Lokasi Banjir

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar bersama Wakil Bupati Tangerang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyied meninjau sejumlah lokasi yang terkena banjir di Kabupaten Tangerang, Rabu (01/01/20).

Bupati mengatakan, banjir diakibatkan tingginya curah hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang dengan ketinggian air mencapai 20-30 cm. Bupati memastikan seluruh ajarannya



siaga guna mengantisipasi hujan lokal serta banjir kiriman.

Setelah meninjau banjir di Kelurahan Bencongan, Bupati melanjutkan meninjau sekaligus membantu evakuasi pasien Rumah Sakit QADR Islamic Karawaci yang terkena banjir.

Bupati menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, agar cepat tanggap dan siap siaga dengan berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari curah hujan yang tinggi, khususnya terhadap wabah penyakit DBD di daerah-daerah yang rawan terkena bencana banjir.

"Di titik wilayah yang terkena banjir ini kita sudah siapkan berbagai penanggulangan bagi warga jika warga harus mengungsi, dapur umum serta berbagai perlengkapan logistik pun sudah kita siapkan," ucap Zaki.(Diskominfo)

2. Sekda Resmikan Ruang Laktasi

Untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di Gedung Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyied meresmikan Ruang Menyusui (Laktasi), Selasa (31/12). Peresmian ruang laktasi ini ditandai memotong untaian melati.



Dalam sambutannya Sekda mengatakan, ruang laktasi ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemkab Tangerang demi memberikan kenyamanan bagi tamu yang berkunjung ke Gedung Bupati Tangerang.

Selain Ruang Laktasi, lanjut Sekda, ruang tunggu tamu pun disediakan dengan nyaman, ruang ber-AC, pojok baca, hingga sofa yang memadai disediakan fasilitas yang nyaman pula kulkas dan air mineral.

"Fasilitas yang disediakan merupakan perwujudan Kabupaten Tangerang yang Layak Anak. Jadi anak diberikan ruang untuk mendapatkan haknya," terang pria yang biasa disapa Rudi.

Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tangerang, Ruchyadi Indrayana menambahkan, ruang laktasi ini merupakan wujud perhatian Pemkab Tangerang akan kebutuhan ibu dan anak yang disediakan agar akses pelayanan lebih maksimal.(Diskominfo)

3. Bupati Minta OPD Respon Pengaduan Masyarakat

Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang harus responsif menindaklanjuti keluhan masyarakat.



Apalagi, Pemkab Tangerang saat ini sudah memiliki akses pengaduan masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam sambutannya ketika memimpin apel pagi di Lapangan Maulana Yudha Negara di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Senin (13/01/20). BUpati menegaskan, ketika ada pengaduan langsung apa pun yang mengenai keluhan masyarakat agar kepala OPD menindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Pengaduan langsung dari masyarakat agar kepala OPD lebih cepat dan tanggap sesuai bidangnya dengan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, “ ungkap Zaki.

Zaki memaparkan, yang sering diadukan masyarakat kepada Pemkab mulai dari pelayanan, jalan rusak, irigasi mampet, PJU mati, pelayanan KTP, dan masih banyak lagi keluhan terkait pelayanan.

“Harus segera ditindaklanjuti, jangan menyepelekan hal yang bersifat pengaduan masyarakakat, berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat bila perlu langsung beraksi,” tegas Zaki. (Diskominfo)

4. Atasi Banjir, Perahu Karet Disediakan di Tiap Kecamatan

Mengatasi banjir di musim hujan, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyediakan perahu karet dan peralatan dapur umum di 29 kecamatan dan desa/kelurahan. Hal ini untuk mengatasi tanggap bencana banjir di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Mudah-mudahan nanti di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang tahun depan atau 2 sampai 3 tahun yang akan datang semua kecamatan, desa dan kelurahan punya perahu, punya peralatan dapur umum yang bisa bisa digunakan untuk tanggap darurat bencana banjir di wilayah masing-masing," kata Bupati Tangerang A Zaki Iskandar saat memimpin rapat koordinasi terkait penanganan dan antisipasi banjir di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang Banten, Kamis (9/01/20). Rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah Moch Maesyal Rasyid dan para Asisten. seluruh Kepala OPD, Camat, dan Ormas.

Zaki memaparkan, perlu perahu karet dan peralatan dapur umum di setiap kecamatan, desa dan kelurahan, dikarenakan



pengalaman penanganan bencana banjir pada awal tahun 2020 mengalami kesulitan akibat kekurangan perahu karet serta peralatan dapur umum. Perahu karet yang di BPBD Kabupaten Tangerang, dinilai tidak cukup untuk mengatasi banjir yang terjadi di 14 kecamatan kemarin.

Zaki juga pada kesempatan tersebut meminta seluruh jajaran Pemkab. Tangerang, Ormas, OKP, agar bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan baik agar proses penanganan musibah banjir bisa segera diatasi, dan lagi musim penghujan saat ini masih awal, masih ada beberapa bulan lagi musim penghujan dan itu yang harus diantisipasi oleh semua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid menambahkan, terkait penyediaan perahu karet dan peralatan dapur umum di kecamatan dan desa/kelurahan, Pemkab Tangerang akan menganggarkan untuk tahun berikutnya, mengingat banjir ini selalu datang tiap tahun.(Diskominfo).

5. Zaki Keynote Speaker Seminar Nasional UNPRI Ke 26

Universitas Paramita Indonesia menggelar seminar nasional dengan tema "Tantangan Pelayanan Publik Dalam Penyederhanaan Birokrasi". Seminar dilaksanakan pada Sabtu (1/2/2020) di Gedung Graha Widya Bhakti Puspitek, Serpong Tangerang Selatan Seminar dihadiri dari oleh peserta dari berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Pemda Ogan Ilir, dan perwakilan Pemprov Bukit Tinggi.

Hadir pula dalam seminar nasional tersebut beberapa petinggi di kalangan birokrasi Indonesia, seperti Prof. Ryaas Rasyid, Staf Ahli Kemenpan RB Jufri Rahman, yang dimoderatori oleh Soma Atmaja, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Tangerang dan beberapa penulis seluruh Indonesia dari kalangan akademisi.



seminar yang merupakan rangkaian Dies Natalies HUT ke-26 UNPRI, hadir beberapa kalangan civitas academica Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran dan kalangan birokrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang diamanatkan menjadi keynote speaker menyampaikan, penyederhanaan birokrasi akan mempercepat pembangunan, tetapi butuh komitmen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah karena kebutuhan pelayanan kepada masyarakat lebih utama.

"Komitmen harus dibangun mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga kebutuhan masyarakat lebih cepat dan terlayani," kata.

Bupati Zaki mengambil contoh, untuk membangun jembatan yang melintasi rel kereta saja di Tangerang harus meminta izin begitu banyak mulai dari KAI, Kemenhub, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi hingga Kementrian PUPR, sehingga sampai bertahun-tahun pembangunan jembatan belum terealisasi.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam

Negeri, Akmal Malik yang hadir sebagai pembicara mengungkapkan, pihaknya siap memfasilitasi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Menurut Akmal, kebijakan yang berbelit dan seakan-akan rumit tersebut akibat belum berjalannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.(Diskominfo)

6. Penerapan Perbup 47, Bupati Libatkan TNI-Polri

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan pelibatan unsur TNI dan Polri dalam penerapan Perbup 47 tentang Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Tambang. Pelibatan unsur TNI-POLRI ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Polresta Tangerang.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dengan Komandan Dandim 0510 Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon dan Kapolresta Tangerang, Ade Ary Syam Indradi di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Senin (3/2/20).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, permasalahan kendaraan bertonase besar terutama dari sektor tambang tidak bisa dikendalikan seorang diri oleh Pemerin-



tah Kabupaten Tangerang. Ini karena personil yang ada, tidak mencukupi untuk menjaga seluruh wilayah yang dilintasi oleh awak angkutan tersebut.

"Teknis detailnya, pos pantau akan menjadi tempat bagi petugas gabungan untuk memberhentikan setiap truk yang masih nekat melintas, karena Perbup 47 masih tetap membatasi pengoperasian izin melintasnya, yaitu dari pukul 22:00 sampai 05:00 WIB," tegasnya. (Skj/Diskominfo)

7. Pemkab Tangerang Terus Bantu Warga Yang Kebanjiran

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus membantu warga yang dilanda kebanjiran di beberapa wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Tangerang, Rabu (5/2/2020).

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Bambang Sapto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BPBD dan dinas terkait lainnya terus membantu warga di tengah kebanjiran. BPBD Tangerang telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir seperti pemberian logistik makanan cepat saji dan pembangunan dapur umum serta tenda pengungsian, dan bantuan lainnya.

"Dari awal kejadian banjir BPBD sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan membantu warga, serta memberikan bantuan logistik dan pendirian dapur umum," Kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini untuk di lokasi Desa Gelam Jaya yang banjir diakibatkan oleh curah hujan tinggi dan juga tanggul jebol di Sungai Cirarab saat ini sudah mulai dikerjakan oleh masyarakat dibantu dengan TNI dan aparat lainnya.

"Diharapkan dengan diperbaikinya tanggul tersebut, banjir di Desa Gelam Jaya bisa segera surut dalam waktu cepat dan semoga



curah hujan tidak tinggi lagi sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing," harap Bambang. (Skj/Diskominfo)

8. Wakil Bupati Datangi Warga Terdampak Banjir

Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli mendatangi warga dan meninjau banjir di lokasi terdampak seperti Perumahan Nuansa Mekar Sari RW 06, Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg, Selasa (04/02/20).

Wakil Bupati mengatakan, kedatangannya ke lokasi banjir untuk mencari solusi mengatasi banjir di wilayah itu. Menurutnya, salah satunya dengan normalisasi Sungai Cirarab yang melintas di Rajeg. Mad Romli mengatakan, akan secepatnya akan mengajukan surat ke pemerintah pusat dan provinsi.

"Saya sangat prihatin atas kondisi masyarakat yang ada di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg. Saya akan perintahkan dinas terkait membuat surat penyampaian memohon agar dinormalisasi setidaknya di tahun-tahun ini," katanya.

Sementara itu, Andri Suseno selaku Ketua RW 6 Desa Mekarsari, Rajeg mengutarakan, kedatangan Wakil Bupati Tangerang sangat



ditunggu warga yang terkena dampak. Ini karena mereka sangat ingin berjumpa dengan pimpinannya di tengah kesulitan mereka.

"Kami senang Pak Wakil hadir di sini karena warga ingin berjumpa dengan pimpinannya, karena di sini ada 789 jiwa dari 322 KK yang tersebar di 5 RT, ini menandakan kepedulian dari Pemerintah kepada warganya,"Ungkapnya. (Herly/Diskominfo)

9.Lepas Ekspor Pipa Fiberglass Terbesar Ke Negeri As

Bupati Tangerang dampingi Menteri Perindustrian RI meresmikan pengiriman pipa komposisi serat kaca (fiberglass) berdiameter 3,4 meter dengan panjang total 5,3 kilometer ke Silicon Valley, Amerika Serikat. Acara tersebut digelar di PT.Future Pipe Industries (FPI) Balaraja, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/2/20).

Presiden Direktur PT. FPI, Imad Makhzoumi mengatakan, Pipa tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan infrastuktur transmisi pembangunan (sewerage system) yang nantinya akan membangun beberapa kota di area San Fransisco, Belmont, Redmond dan San Carlos Amerika Serikat. Proyek pengiriman senilai USD 20 juta ini merupakan pengiriman yang pertama dan terbesar di Indonesia.



Lanjut Imad, Kegiatan ekspor ke Amerika Serikat juga akan terus berlanjut sampai ke depannya, mengingat kebutuhan akan produk yang sustained seperti produk pipa fiberglass ini akan terus meningkat dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun ke depan.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Pemerintah fokus memacu sektor industri agar lebih gencar meningkatkan nilai investasi dan ekspornya. Upaya ini diyakini mampu mendorong penguatan daya saing sektor manufaktur dan struktur ekonomi nasional.

Sementara itu Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengungkapkan, dengan adanya proyek pengiriman pipa berteknologi tinggi ini dia harapkan dapat mempertegas eksistensi produk-produk Indonesia di kancah dunia internasional.

"Saya bangga di Kabupaten Tangerang ada juga pabrik pipa yang bisa bikin pipa berdiameter sampai 4 meter, itu luar biasa dan lebih luar biasa lagi sudah sampai ekspor ke Amerika, dan ini asli olahan dan rancangan SDM asli Indonesia," ungkap Zaki.(Diskominfo)



10. Wabup Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Wakil Bupati Tangerang, H Mad Romli mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Pencanangan ini ditandai dengan pemukulan gong yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, Jumat (06/03/20).

Wakil Bupati mengatakan, Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya suatu organisasi. Selain sebagai pusat informasi dan sumber ingatan, arsip juga merupakan bentuk penyelamatan pertanggungjawaban terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Hadisa Mashur mengatakan, penyelenggaraan kegiatan tentang sadar dan tertib kearsipan ini sangatlah penting untuk diselenggarakan karena ini akan membangun kesadaran pentingnya arsip dan menyelamatkan arsip di lingkungan daerah.

Lanjut Hadisa, kegiatan ini diikuti oleh para pengelola arsip di Desa, Kelurahan, Kecamatan dan OPD. Ini agar para peserta dapat

lebih memahami tata kelola kearsipan dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan pengamanan arsip daerah. (Redi/Diskominfo)

11. KAHMI Kabupaten Tangerang Ajak Bupati Zaki Tanam Mangrove

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tangerang mengajak Pemkab Tangerang untuk bersama-sama menanam mangrove di Pesisir Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Demikian disampaikan PresIdium KAHMI Kabupaten Tangerang, Abdul Haris Syarif Mansyur, SH, MH pada saat audensi dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang bertempat di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Selasa (10/03/2020).

"Persoalan lingkungan adalah tanggungjawab bersama hingga anak cucu. Pentingnya menjaga ekosistem laut dan kelestarian lingkungan, menjadi salah satu tanggung jawab KAHMI Kabupaten Tangerang," ujar Haris.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, dirinya sangat senang bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan Presiden KAHMI Kabupaten Tangerang dan bisa bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada KAHMI yang salah satu kegiatannya adalah menanam mangrove di wilayah pantai utara Tangerang.

"Acara tanam mangrove ini sangat Saya dukung dan apresiasi dan ke depannya kalau bisa di bulan September diagendakan lagi untuk tanam mangrove dan bersih-bersih pantai dan hilir Cisadane setelah acara sehabis lebaran sukses," terang Zaki.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zaki pun mengharapkan kepada HMI dan para mahasiswa yang hendak melakukan KKN di Kabupaten Tangerang agar bisa terjun langsung dan



mengimplementasikan langsung KKN di masyarakat, terutama di wilayah pesisir seperti membersihkan sampah di pantai dan di hilir Sungai Cisadane. (Diskominfo)

12. Bupati Tangerang Cek Kebutuhan Bahan Pokok

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar melakukan pengecekan langsung harga dan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional terkait mewabahnya Corona Virus (Covid - 19) di Indonesia, Senin (16/3/20).

Disela-sela kunjungannya ke Pasar Tradisional Kelapa Dua Bupati mengatakan, kehadirannya dalam rangka pengecekan ke pasar-pasar tradisional terhadap ketersediaan sembilan bahan pokok terutama beberapa bahan makanan seperti gula, beras, daging, telur ayam, dan minyak goreng ternyata di pasar tradisional semuanya aman dan harga relatif stabil.

"Walaupun ada kenaikan sedikit tapi masih dalam batas kewajaran dan yang terpenting bahan-bahan lain stoknya masih aman. Masyarakat jangan panic buying, semua stok bahan makanan di pasar tradisional dengan harga murah terjangkau dan stoknya aman," Kata Zaki.



“Ketersediaan sembako menjelang bulan suci Ramadhan saya yakin, dan saya juga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pasar-pasar tradisional kita ini dengan stok dan persediaan bahan makanan semua sudah siap dan masyarakat jangan khawatir nggak perlu panik,” Pinta Zaki.

Sementara itu, Camat Kelapa Dua, Prima Saras Puspa yang hadir mendampingi Bupati meninjau Pasar Kelapa Dua mengungkapka, pasokan kebutuhan pokok cukup walaupun harga ada sedikit naik akibat pasokan masih ada yang terlambat.(Diskominfo)

13. Kadis Koperasi Resmikan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni milik Ibu Rohaetin di Kp. Dukuh RT.002/004, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, diresmikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Dra. Hj. Nurul Hayati, M.Si, Kamis (19/3/2020).

Nurul mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran aktif KSPPS Abdi Kerta



Raharja sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

Ketua KSPPS Abdi Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Hj. E Farida, SE. M, Si mengatakan, kegiatan renovasi rumah siap huni ini merupakan program KSPPS Abdi Kerta Raharja, khusus bagi warga yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Tangerang.

KSPPS Abdi Kerta Raharja yang mengelola usaha simpan pinjam, pendidikan pelatihan dan jasa konsultan serta perdagangan umum, yang berdiri pada tahun 2009 ini memiliki kantor cabang di Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Bogor.

Masih penjelasan Hj Farida, untuk tahun 2020 ada 2 rumah yang direnovasi oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dengan ukuran 45 meter persegi, 2 kamar tidur, 1 kamar tamu dan 1 WC yaitu milik Ibu Rohaetin, KCP Tigaraksa Kp. Dukuh RT 02 RW 04 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.(Diskominfo)



14. Camat Di Kabupaten Tangerang Dukung Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesi kedua disambut baik oleh pimpinan kecamatan di Kabupaten Tangerang. Camat Sepatan Kabupaten Tangerang, Dadang Sudrajat menyatakan sangat menyambut baik rencana penerapan PSBB sesi kedua untuk pencegahan Covid-19 yang semakin masif di masyarakat.

Lanjut Dadang, apa yang disampaikan oleh Bupati Tangerang pada rakor dan evaluasi pelaksanaan PSBB sesi pertama, Selasa kemarin (28/4/20), PSBB sesi kedua lebih kepada penindakan hukum yang humanis yang membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggar.

Di tempat terpisah, Camat Kelapa Dua Prima Saras Puspa juga sangat setuju dengan dilakukannya penerapan PSBB sesi kedua ini. Dia menegaskan, perlu ada sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar PSBB di Kabupaten Tangerang. Apa lagi wilayahnya, merupakan zona merah wabah Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Kelapa Dua urutan pertama dalam sebaran wabah corona di setiap kecamatan.

Selain itu, Camat Kelapa Dua ini juga meminta bantuan kepada Bupati Tangerang agar bisa meminjamkan mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat mobil patroli yang dimiliki Kecamatan Kelapa Dua hanya satu, dan sulit untuk menjangkau wilayah Kelapa Dua yang sangat padat penduduknya.

Sementara itu, Camat Pagedangan, H. Dadan Gandana menambahkan, pada rencana penerapan PSBB sesi kedua, ia sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati Tangerang, ini demi percepatan pengentasan wabah corona di wilayah Kabupaten Tangerang.

Untuk Kecamatan Pagedangan, pihaknya melakukan pengawasan dan pembagian tugas di daerah yang menjadi titik check point. Selain itu banyak perumahan yang melakukan penutupan portal untuk pengamanan keluar masuk kawasan.

Camat Teluknaga, Supriyadinta menyampaikan, pada pelaksanaan PSBB sesi pertama pihaknya melakukan pengawasan di tiap-tiap pintu masuk desa dengan melakukan check point dan pembagian masker kepada pengguna jalan, namun masih ada truk tanah yang melewati wilayah Kecamatan Teluknaga. (Tim Humas Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang)

15. PMI Salurkan 2000 Paket APD Bagi Warga Binaan Rutan Jambe

Bergerak terus untuk melakukan langkah kemanusiaan merupakan tugas Palang Merah Indonesia (PMI). Kali ini PMI Kabupaten Tangerang kembali memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, serta disinfektan kepada warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang, Kamis (30/04/2020).

PMI Kabupaten Tangerang secara simbolis menyerahkan langsung APD kepada Mujiarto, Kepala Rumah Tahanan Kelas I Tangerang.



Mujiarto mengatakan, di rutan ini ada 1402 orang warga binaan, kita akan bagikan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Rutan Kelas I Tangerang.

"Semua kita akan pergunakan untuk kebersihan warga binaan, agar bisa mengantisipasi penyebaran di area rutan," ungkapnya.

Pengurus PMI Kabupaten Tangerang, Suranto menjelaskan, sebelumnya PMI sudah melakukan penyemprotan disinfektan di Lapas Kelas I Tangerang, dan saat ini PMI menyerahkan 2000 paket yang berisi masker, hand sanitizer, disinfektan untuk warga binaan.

"Kita serahkan 2000 paket, yang isinya 6000 masker, 2000 hand sanitizer, dan 4000 cairan pembersih Wipol untuk warga binaan Lapas Jambe," ungkap pria yang akrab disapa Otoy. (Diskominfo)

16. Bupati Zaki Dampingi Mensos Bagikan Bantuan Covid-19

Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar mendampingi Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara dalam rangka memantau dan bertemu langsung calon penerima bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat. Acara tersebut berlangsung di Kantor Pos



Curug, Kelurahan Sukabakti, Sabtu (25/4/20).

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan, memang bantuan-bantuan ini semuanya terbatas, maka dari itu harus dimanfaatkan dengan baik dan dipergunakan dengan semestinya terutama untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Bapak/Ibu sekalian.

Sementara itu, Mensos RI, Juliari P. Batubara mengungkapkan, bantuan ini merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Kemensos, dan Kemensos meminta bantuan kepada PT. POS untuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat.

"Bantuan ini jangan dilihat dari nilainya tapi dilihat dari perhatian pemerintah untuk masyarakatnya yang sedang terkena dampak Covid-19 di Indonesia," terangnya.

Mensos berpesan sekali lagi, Ia minta tolong untuk yang mendapatkan bantuan berkali-kali mari buka hati nurani kita, kita lihat kanan-kiri jika tetangga kita apakah yang berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkan maka kita harus dengan ikhlas mem-

berinya tanpa perlu gembar gembor di medsos.

"Orang Indonesia yang terkenal akan gotong royongnya, Saya kira kita selesaikan dengan musyawarah mufakat terkait masalah pendataan bantuan sosial ini jangan apa-apa di upload di medsos kita harus gunakan hati nurani," pungkasnya.

Ujat Sudrajat, selaku Kadinsos Kab. Tangerang mengatakan, bahwa pendistribusian bansos tunai ini dipantau langsung oleh Mensos RI, dan bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak merupakan bagian dari kuota Kab.Tangerang sebanyak 102.572 KK.(Disskominfo)

17. Bupati Bagikan Dua Ribu Paket Sembako Untuk Ustad Dan Guru Ngaji

Pemerintah Kabupaten Tangerang membagikan dua ribu paket sembako kepada para ustadz dan guru mengaji yang terdampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang, Selasa (28/4/20). Para ustadz dan guru ngaji ini yang mendapatkan bantuan tersebut, merupakan kelompok masyarakat yang tidak tercover oleh Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, untuk membantu para ustadz dan guru ngaji terdampak covid-19, pihaknya membagikan sebanyak dua ribu paket sembako melalui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan dan UPZ kecamatan.

Menurut Zaki, pembagian ribuan paket sembako itu dilakukan di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan cara door to door ini, kata Zaki, dipilih untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan bisa sampai pada mustahiq sesuai data yang diajukan sebelumnya.

Sementara itu, Ketua MUI kab. Tangerang KH. Ues Nawawi



mengungkapkan, MUI Kabupaten Tangerang selaku koordinator pembagian sembako, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bupati Tangerang yang telah mencurahkan kepeduliannya kepada masyarakat Kabupaten Tangerang , khususnya kepada para asatidz / guru ngaji di Kabupaten Tangerang.(Diskominfo)

18. Bupati Zaki Paparkan Program Desa Wisata Ketapang

Tigaraksa -- Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar paparkan program Desa Wisata Ketapang Mauk melalui video conference untuk usulan DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera). Video conference tersebut berlangsung di Ruang Cituis, Lantai 5 Gedung Setda, Kamis (30/4/20). Bupati Zaki mengatakan, DAK tersebut dialokasikan khusus untuk sektor air minum dan sanitasi serta penanganan perumahan.

" Harapannya, dengan saya sendiri yang langsung mempresentasikan kepada Kementerian dan instansi terkait, kita bisa masuk 5 sampai 10 besar yang nantinya bisa mendapatkan DAK dari Pusat," Katanya.

Zaki menjabarkan, dipilih Ketapang menjadi lokus pembanguna,



karena untuk melanjutkan program yang sudah ada, dan itu lebih kepada zona wisatanya serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahap duanya akan fokus kepada infrastruktur pendukung ekonomi yang merupakan pelabuhan pasar ikan.

"Harapannya, di tahun 2021 ini kita fokus kepada penanganan rumah tidak layak huninya, sanitasi dan air bersih. Jadi kalau rumah tidak layak huninya tertangani, artinya 2021 itu wajah Ketapang itu berubah drastis dari yang tadinya kumuh menjadi lebih baik," Harap Zaki.

Semantara itu, Andie Pramudita dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kemen PUPR mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi proposal usulan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sudah begitu jelas dan komprehensif dalam isi paparan dan penyampaiannya oleh Bupati Tangerang. (Diskominfo)

19. Kejari Kabupaten Tangerang Peduli Bakti Sosial Dampak Covid-19

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melaksanakan bakti sosial ke beberapa panti asuhan dan kepada masyarakat miskin



yang terdampak PHK Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang, Selasa (5/5/20).

"Kejaksaan Peduli mendistribusikan sebanyak 500 paket bantuan dengan masing-masing nilai sebesar Rp.100.000 ke beberapa panti asuhan dan kepada masyarakat miskin yang terdampak PHK yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Bahrudin, SH, MH.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mendistribusikan 500 paket tersebut ke panti asuhan dan masyarakat miskin atau terdampak PHK di wilayah Kabupaten Tangerang antara lain ke Pondok Pesantren Bustanul Wildan Kec.Jambe, Majelis Zikir Al Ikhlas Desa Ranca Buaya Kec.Jambe, Pondok Pesantren Al Falah Desa Sukamanah Kec.Jambe, dan Panti Asuhan Hikmah Syahada Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa.

Selain itu, kata Bahrudin dilaksanakan juga di Panti Asuhan Al Mirot Kec. Cisoka, Panti Asuhan Darussalam Kec.Cisoka, Panti Asuhan Sirrul Hikmah Perum Taman Adiyasa Kec.Solear, Panti Asuhan Amanah Kec. Rajeg, Panti Asuhan Muttaqim Desa Pasir Nangka Kec.Tigaraksa, Panti Asuhan Nurun Nisa

Kec.Kronjo dan Panti Asuhan Assyafiiyah Kec.Kronjo. (Diskominfo)

20. 154 KK Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Jayanti Terima Dana BST

Sebanyak 154 Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI (4/5/20). Pencairan BST di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang dilakukan langsung oleh Dirjen PFM didampingi Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan, Babinsa TNI AD, serta perwakilan dari PT. Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama menjelaskan, BST ini merupakan bagian perlindungan pemerintah kepada warga yang terdampak Covid-19.

"Bansos Tunai ini lebih ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Kemensos," kata Asep.

BST merupakan salah satu program dalam jaring pengaman sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Dirjen PFM berharap dengan adanya BST ini masyarakat mampu bertahan di masa Covid-19.

Bansos Tunai akan disalurkan kepada sembilan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp



600.000 per KPM per bulan, selama 3 bulan, dari bulan April s/d Juni 2020.

Mekanisme BST disalurkan langsung ke rumah–rumah penerima manfaat melalui PT. Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank Himbara. Seperti BNI, Mandiri, BRI, serta BTN.

Bupati Tangerang Zaki Iskandar, berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Sosial, untuk pemberian di bulan baik ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua dan semoga wabah ini cepat selesai," ujar Bupati Zaki. (Diskominfo)

21. Pangdam Jaya Dan Bupati Zaki Panen Raya Buah Melon

Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiono dan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar melaksanakan Panen Raya Hortikultura di Kampung Pangkalan, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Jumat (8/5/20).



Panen Raya Hortikultura berupa buah melon ini sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19

"Panen Raya Hortikultura berupa buah melon ini sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Ketahanan pangan nasional harus tetap berjalan," kata Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiono.

Eko Margiono mengatakan, sudah menjadi komitmen bagi Kodam Jaya untuk mendukung program Ketahanan Nasional, dengan membuka lahan yang tidak produktif untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Pembukaan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif ini dimulai dari bulan Desember 2019, bekerja sama dengan pemilik lahan PT. ASG. Luas tanah yang digarap kurang lebih 300 Ha dan berlokasi di Desa Pangkalan Angus dan Tanjung Burung.

"Dari luas lahan 300 Ha, yang telah digarap kurang lebih 50 Ha, yang sudah ditanami melon, labu, bayam, caesim, padi tradisional, rumput gajah dan padi mekanisasi," ujar Eko.

Pangdam menjelaskan bahwa pihak Kodam Jaya hanya ingin mendorong petani untuk mau bercocok tanam dan memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif dan petani bisa hidup lebih layak, apa lagi saat ini negeri kita sedang dilanda wabah virus corona.

Pelaksanaan program tersebut melibatkan personel Babinsa Koramil 01/Teluk Naga, kelompok tani setempat, masyarakat desa setempat dan penyuluh dari BPT Teluk Naga Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang.

Sementara kegiatan panen hortikultura buah melon ini diadakan agar dapat dijadikan motivasi bagi petani untuk terus memaksimalkan lahan pertaniannya yang sudah disiapkan oleh Kodam Jaya.

Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar yang hadir langsung pada acara tersebut mengucapkan Alhamdulillah, di tengah-tengah kondisi cuaca dan tantangan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan panen raya holtikultura di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Mudah-mudahan penen kita di hari ini dapat menjadi inspirasi buat anak muda lainnya agar semangat berkebun dan bercocok tanam di wilayahnya masing masing," terang Zaki.

Pada acara tersebut hadir juga Dirjen Tanam Pangan Kementerian Pertanian RI, Bapak DR. Ir. Suwandi, M.SC, Asterdamjaya Kol. Inf. Jacky Aristanto, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian pada Kementerian Pertanian RI, Bapak Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, Danrem 05/Wijayakhrama, Kolonel Inf. Tri Budi Utomo dan Dandim 0506 Tangerang. (Diskominfo)

22. Bapenda Beri Insentif Bebas Denda PBB P2



Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang memberikan insentif pembebasan sanksi denda administrasi kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tengah situasi pandemi, Rabu (13/05/2020). Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengungkapkan, insentif ini berupa pembebasan sanksi denda administrasi bagi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan selama masa pandemi corona virus hingga 31 Agustus 2020.

"Kami harapkan dengan adanya insentif ini masyarakat bisa lebih semangat untuk membayarkan pajaknya meskipun di tengah situasi pandemi saat ini dan pemberian insentif tersebut untuk seluruh massa pajak bumi dan bangunan dan insentif ini diberikan sampai dengan 31 Agustus 2020," Kata Soma.

Sementara itu, Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Dwi Chandra Budiman menambahkan, insentif penghapusan denda atau sanksi administrasi denda PBB dalam masa pandemi ini merupakan salah satu amanat dari pemerintah pusat, dari Gubernur dan dari Bupati.

"Covid-19 ini dampaknya menghantam semua lapisan, bukan hanya kalangan-kalangan tertentu tapi hampir semua kalangan terkena dampak dan itu yang menjadi pertimbangan kami dalam memberikan insentif tersebut untuk seluruh massa pajak bumi dan bangunan dan insentif ini diberikan sampai dengan 31 Agustus 2020," katanya.

Menurut Dwi, ini adalah kesempatan yang bisa digunakan oleh para wajib pajak, yang biasanya masyarakat enggan untuk membayar pajak karena dendanya, dengan adanya penghapusan denda ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lanjutnya Dwi mengatakan, penurunan pendapatan PBB kurang-lebih untuk bulan April turun sekitar 26% dan untuk BPHTB penurunan kurang lebih di angka 50% dalam bulan April dibandingkan dengan bulan berjalan tahun lalu, dan bulan Mei kemungkinan akan lebih dalam lagi penurunannya karena memang ini penerapan PSBB sudah mulai tegas dan virus covidnya masih meluas.

Berbagai kemudahan dan inovasi pun, menurut Dwi, telah dilakukan oleh Bapenda, seperti salah satunya dengan pelayanan online tanpa tatap muka, pembayaran pajakpun sudah bisa melalui Bukalapak maupun Tokopedia, Bank BJB, Kantor Pos, Alfamart, dan Indomart sehingga itu sudah memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa perlu keluar rumah.(Diskominfo)

23. Rumah Oden Dibedah Lebih Layak

Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang membangun rumah Oden (46), Warga miskin di Kampung Pondok Kulon, RT 01 RW 01 Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji yang reyot dan nyaris ambruk, Selasa (02/06/20).

Camat Pakuhaji Asmawi menjelaskan, di wilayah Kecamatan



Pakuhaji rumah tidak layak masih ada, Pemkab Tangerang pun memiliki program Gebrak Pakumis, tetapi yang berbasis kawasan, sedangkan yang parsial ada di kecamatan.

"Camat bersama tokoh masyarakat saling bahu-membahu membantu bergotong royong membangun rumah yang layak untuk Pak Oden," ujar Asmawi yang pernah menjabat sebagai Camat Kronjo.

Saat ditemui, Oden (46), warga Pakuhaji yang rumahnya dibedah berterimakasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang dan segenap masyarakat yang bersedia membantu bergotong royong untuk membangun rumahnya yang tidak layak.

Oden merupakan pedagang keliling yang menjual makanan ringan berupa cilok ke setiap sekolah-sekolah, sedangkan di masa pandemi Covid-19 ini sekolah diliburkan sehingga dengan kondisi ekonomi seperti ini sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari apa lagi untuk membangun rumah.

Oden pun menerima bantuan sosial tunai sebesar Rp. 600 ribu rupiah karena merupakan salah satu warga yang terdampak wabah Covid-19 dari APBD Kabupaten Tangerang. (Diskominfo)

24. Sekda Tinjau Kapasitas TPA Jatiwaringin

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid meninjau lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Jumat (5/06/20). Peninjauan tersebut bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environmenta Day).

Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati pada 5 Juni, sejak pertama kali Majelis Umum PBB menetapkannya pada 1974.

Selain menyambut hari lingkungan hidup, peninjauan ke TPA ini pun menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi permasalahan sampah di wilayah Tangerang.

“ Saya mengajak kepada masyarakat agar dapat mengurangi



sampah rumah tangga, agar bisa mengurangi kapasitas sampah di TPA jatiwaringin," ujar Rudi Maesyal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Achmad Taufik menambahkan volume sampah di Jatiwaringin sudah menumpuk dari luas lahan 21 hektar, selain itu pemkab masih ada lahan sekitas 10 hektar untuk mempersiapkan TPA Jatiwaringin dan akan dilakukan penanaman pohon diarea TPA.

" Lebih dari 2000 ton sampah tiap harinya masuk di TPA ini, sehingga kita terus waspadai bagaimana kapasitas dan mencari solusi terbaik berkaitan dengan pengolahan sampah yang efektif di Kabupaten Tangerang," ungkap Taufik. (Diskominfo)

25. Camat Pakuhaji Renovasi Rumah Warga

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kecamatan Pakuhaji berencana renovasi rumah milik Ibu Masih warga kampung Gagah Rt 02/02, Desa Kiara Payung.

"Rumah milik ibu Masih rencana kami akan rehab, dengan di bantu pihak desa dan swadaya masyarakat setempat," kata Camat Pakuhaji Kabupaten Tangerang H Asmawi kepada Humas Pemkab Tangerang, Kamis (11/06/20).

Dilanjutkan H Asmawi yang pernah menjabat Camat Kronjo Kabupaten Tangerang bahwa pihaknya sudah melakukan survei ke rumah Ibu Masih, warga Kampung Gaga Rt 02/02, Desa Kiara Payung tersebut.

Ia juga mengungkapkan pada survei di temani pihak Desa Kiara Payung dan Rt dan Rw setempat, dan ketemu langsung dengan ibu masih dan memberikan bantuan berupa beras dan lainnya.

Masih, warga Kampung Gaga Rt 02/02, Desa Kiara Payung mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Pakuhaji dan



Pak Kades yang sudah berkunjung di rumahnya.

" Terima kasih pak camat dan pak kades sudah berkunjung ke rumah. Saya ucapkan terima kasih atas rencana renovasi rumah saya," kata ibu masih.(Humas Pemkab Tangerang)

26. Disdik Buka PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan seluruh Stakeholder Pendidikan di Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Drs.H Syaifullah, MM mengatakan, dalam masa tanggap darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) seperti saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2020/2021

Pembukaan PPDB tersebut untuk menindak lanjuti Surat Seputusan Kadisdik Nomor: 422.3/1472- Disdik-2020 Tentang petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 serta hasil



rapat penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 dengan seluruh Stakeholder pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Diskominfo)

27. Bupati Pantau Proses Pemusnahan Sampah

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melakukan kunjungan ke TPST (Tempat Pengelolan Sampah Terpadu) Citra Raya untuk melihat proses pemusnahan sampah menggunakan prototipe incinerator mini.

Bupati Zaki tiba di TPST Citra Raya didampingi oleh Kepala Bappeda Taufik Emil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ahmad Taufik, dan Camat Panongan serta beberapa pejabat lainnya, Senin (6/7/20).

Disela-sela kunjungannya, Bupati Zaki mengatakan, hari ini dirinya melihat salah satu upaya dari Citra Raya dalam rangka mengurangi sampah yaitu dengan sistem incinerator (pemusnahan sampah dengan dibakar), ini adalah sampel dengan kapasitas kecil, 4 kubik perhari yang nanti masih dalam uji coba dan penyempurnaan.



“Semoga nanti kita bisa lihat sistem yang sempurna kemudian mekanisme yang lebih baik, dan ramah lingkungan serta aman, kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung program-program dan upaya untuk meminimalisir sampah yang akan dibawa ke TPA.

Bupati Zaki berharap, kerjasama antara elemen masyarakat dengan pemerintah daerah bisa mengurangi sampah di masa yang akan dating.

Sementara itu, Bambang selaku pengelola dan pembuat prototipe incenerator mengatakan, prototipe incinerator ini bisa menampung sampah 4 kubik dan dari hasil buangannya atau tingkat pencemaran udaranya sangat rendah. Bahkan alat ini sudah dites oleh instansi terkait terhadap ambang batas kewajaran dan semuanya masuk dalam kategori ambang batas dan aman bagi udara di sekitar.(Diskomifo)

28. Camat Sepatan Panen Sayur Hidroponik

Untuk Perkuat Ketahanan Pangan di tengah Pendemik Covid-19 Camat Sepatan Dadang Sudrajat dan Kepala Desa Sarakan, melaksanakan Panen Sayuran Hidroponik di Perumahan Duta



Asri Palem 5 RT. 01/03 Kelompok Wanita Tani Desa Sarakan Kabupaten Tangerang, Rabu (8/07/20).

Camat Sepatan Dadang Sudrajat mengatakan Panen Sayuran Hidroponik ini sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi Pandemik Covid-19 yag terjadi saat ini.

Dadang mengcapkan terima kasih serta apresiasi kepada segenap Kelompok Wanita Tani (KWT) yang sudah kedua kalinya ikut hadir dalam menyaksikan panen sayur hidroponik. Dia berharap untuk dapat memicu tumbuhnya semangat & ide Kreatif untuk dapat di contoh Khususnya Warga Kecamatan Sepatan.

Kepala Desa Sarakan Kecamatan Sepatan Halimi mengucapkan Rasa Terima kasih Kepada Warga Palem 5 yang sudah melakukan penanaman sayur dengan metode Hidroponik. (Diskominfo).

29. DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 4 Perda

DPRD Kabupaten Tangerang, tetapkan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan, empat perda tersebut dilakukan saat Rapat Pari-



purna, di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Senin (20/7/2020).

Empat Perda yang tersebut yakni, Perda Tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu di Kabupaten Tangerang, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Tangerang dan Perda Tentang Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail mengatakan, DPRD Kabupaten Tangerang bersama eksekutif menetapkan persetujuan bersama terhadap empat Raperda menjadi Perda Kabupaten Tangerang.

Sementara, Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli yang hadir pada paripurna tersebut, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Terutama kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan atas empat Raperda yang diajukan eksekutif.

Empat Raperda yang disahkan, mencerminkan adanya komitmen

bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tangerang, dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Serta potensi dibeberapa aspek pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang.(diskominfo)

30. Sekda Pimpin Rapat Persiapan MTQ Ke-17

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid pimpin rapat persiapan pengiriman kafilah Kabupaten Tangerang yang akan mengikuti MTQ Ke-17 tingkat Provinsi Banten. Rapat tersebut di gelar di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Rabu (22/07/20).

" Hari ini kita lakukan rapat penjadwalan kafilah Kabupaten Tangerang menghadapi MTQ Ke-17 tingkat Provinsi Banten, yang awalnya di laksanakan di Kota Tangerang Selatan dialihkan ke di lokasi Masjid Al-Bantani Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Serang. Kita sudah melakukan persiapan pembinaan kafilah dengan LPTQ Kecamatan agar memberikan kesiapan terbaik," ungkap Sekda.

Nantinya dari tanggal 5 Agustus khafilah sudah kita karantikan di Diklat Kitribakti Curug, tentunya dengan protokol kesehatan



agar mengantisipasi penularan Covid-19.

"Mudah-mudahan ditengah pandemi Covid-19, kafilah Kabupaten Tangerang dapat memberikan hasil yang terbaik diajang MTQ ke-17," tutur Sekda yang juga ketua LPTQ.

MTQ Ke-17 Tingkat provinsi Banten akan diselenggarakan mulai tanggal 10 Agustus hingga 15 Agustus 2020. (Diskominfo)

31. Wabup Dampingi Kapolda Tinjau Kampung Tangguh Pasar Kemis

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mendampingi Kapolda Banten Irjen Fiandar meninjau Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya di RW. 014 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/7/2020).

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengatakan Kampung Tangguh Nusantara ini dibangun untuk meningkatkan kualitas ekosistem alam dan upaya menguatkan ketahanan pangan masyarakat. "Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan spirit positif yang nyata bagi kita untuk bisa mendukung terus program ini agar bisa memberikan manfaat positif yang signifikan dan



menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat serta pola pikir masyarakat agar kedepan bisa menjadi masyarakat yang lebih produktif, inovatif, mandir," kata Wabup.

Kapolda Banten Irjen Drs Fiandar berterimakasih kepada Pemkab Kabupaten Tangerang yang telah mendukung penuh Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya ini. "Saya Harap Polri, TNI dan pemerintah terus membimbing dan membantu warga Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya," ucapnya. (Diskominfo)

32. Dinas Perkim Kirim Air Bersih Korban Kebakaran Perum Sudirman

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, memberikan bantuan air bersih kepada korban kebakaran Perum Sudirman Indah, Blok B12, Rt 03/06, Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan, melalui UPTD Pengelolaan Air Bersih pihaknya mengirimkan bantuan air bersih.

" Kami kirimkan 1 unit mobil tangki air yang berisi 5000 liter untuk warga

Pengungsi yang terkena bencana kebakaran dan terkena dampak kekeringan di perumahan Sudirman Indah Blok B12 RT.3 RW.6 kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa penerima.

Selain itu, pada tanggal 8 Agustus 2020, pihaknya juga mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang kekurangan air bersih, mobil tangki air mengisi toren-toren ke wilayah Zona 1 untuk keperluan mencuci tangan, yang tersebar dibeberapa pasar tradisional dalam rangka mencegah penularan Covid-19.(Diskominfo)



33. Bupati Zaki Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar bersama Gubernur Banten Wahidin Halim pagi tadi mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Banten yang bertemakan Fokus Area Penertiban dan Penyelamatan Aset Capaian Tahun 2020, di Pendopo Gubernur, Selasa (24/11/2020).

Selain dihadiri 8 Bupati/ Walikota se Banten, Rakor yang diisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ini juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta perwakilan PT PLN (Persero) dan Angkasa Pura II.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah/ aset dan penyerahan fasos serta fasum oleh Kementerian ATR/ BPN Kepada Gubernur Banten dan Bupati/ Walikota se Banten, yang dilanjutkan dengan penyerahan MoU oleh PT. Angkasa Pura II kepada Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar dan Walikota Tangerang.



Bupati Zaki mengatakan, pihaknya akan selalu mematuhi dan mengikuti segala aturan dalam hal tata kelola pemerintah, terlebih masalah aset, karena mencegah lebih baik.

Hal senada diungkapkan oleh Gubernur Banten bahwa MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengungkapkan, hasil dari konsultasinya ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, tidak selamanya persoalan diskresi ada niatan korupsi. Ada mens rea yang tidak ditindak oleh hukum.

Dikatakan, Pemprov Banten terus menunjukkan komitmennya dalam penertiban dan pengamanan aset daerah. Dari 1.022 bidang tanah sampai dengan November 2020 sudah bersertifikat sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen. Pada tahun 2020 telah terealisasi 201 bidang.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango

ungkapkan KPK hadir dalam pengelolaan aset daerah yang baik sebagai bagian dari tugas pokok pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 6, tugas KPK meliputi: pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, serta eksekusi putusan pengadilan. (Diskominfo)

34. Upacara HUT Ri Ke 75 Berlangsung Khidmat

Upacara peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia ke 75 di Kabupaten Tangerang berlangsung sederhana, namun khidmat, di Lapangan Maulana Yudhanegara Tigaraksa.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, upacara tingkat Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan protokol Covid-19 sesuai dengan edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor 492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020.

"Meskipun perayaan HUT RI kali ini digelar sederhana dan harus mengikuti aturan protokol covid-19, akan tetapi tidak mengurangi rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, Di tingkat Kecamatan pun digelar Upacara pengibaran dan penurunan Bendera, semuanya dilaksanakan secara terbatas juga, tentu saja ini sekaligus membangkitkan semangat perjuangan kita semua kepada masyarakat terutama yang ada di kecamatan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT RI tingkat Kabupaten Tangerang Jaenudin mengungkapkan, perayaan HUT ke-75 RI tingkat Kabupaten Tangerang ini digelar minimalis dan sederhana. Banyak hal baru yang ditemukan dalam rangkaian kegiatannya. Salah satunya dibatasinya 3 paskibraka saja dan peserta upacara pun dibatasi. Hanya diikuti 13 perwakilan dari TNI dan 13 perwakilan dari Polri, 13 perwakilan ASN Pemkab Tangerang.



Pada upacara hanya diikuti oleh 13 orang Perwakilan dari TNI dan 13 orang perwakilan dari anggota Polri, 13 orang dari perwakilan ASN Pemkab Tangerang. Pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) pun tidak seperti biasanya. Kali ini hanya tiga orang, hanya bertugas mengibarkan bendera, dan 3 orang paskibra untuk penurunan bendera sore harinya.

Adapun yang bertindak sebagai Inspektur upacara pada pengibaran bendera adalah Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, sedangkan untuk penurunan Bendera yang menjadi Inspektur upacara adalah Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli. (Diskominfo)

35. Bupati Zaki Sampaikan Pidato Pengantar Kupa Dan Ppas

Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar menyampaikan pidato pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin (24/8/2020)



Bupati Zaki mengatakan, sesuai dengan agenda Rapat Paripurna DPRD, dirinya selaku Kepala Daerah menyampaikan Pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan KUPA dan PPAS tahun 2020 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tujuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dalam pencapaian target RPJMD ;

2. Memberikan arah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;

3. Memberikan gambaran perubahan asumsi yang berkembang

saat ini dibandingkan dengan KUA Tahun Anggaran 2020; dan

4. Memberikan acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Bupati Zaki kondisi kemampuan keuangan daerah dalam PPAS Perubahan Tahun 2020 yaitu, jumlah pendapatan daerah diproyeksikan sebelum perubahan sebesar Rp5,71 triliun setelah perubahan menjadi Rp5,08 triliun, berkurang sebesar Rp633,86 miliar yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar Rp2,75 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,12 miliar berkurang sebesar Rp628,59 miliar;

- Dana Perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp1,78 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,69 triliun berkurang sebesar Rp94,99 miliar;

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp1,17 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,26 triliun bertambah sebesar Rp89,72 miliar.

Jumlah pendapatan tersebut direncanakan untuk membiayai belanja sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar Rp2,76 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,99 triliun bertambah sebesar Rp231,23 miliar; dan

- Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar Rp3,45 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp2,70 triliun berkurang sebesar Rp742,34 miliar.

Lanjutnya, dengan besaran target pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tersebut, pada PPAS Perubahan Tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebelum perubahan sebesar Rp495 miliar setelah perubahan sebesar Rp617,75 miliar bertambah

sebesar Rp122,75 miliar dari total belanja daerah.

Defisit tersebut dibiayai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebelum perubahan sebesar Rp500 miliar setelah perubahan sebesar Rp617,75 miliar bertambah sebesar Rp117,75 miliar sesuai hasil Audit BPK Tahun 2019. (Bidang IKP Diskominfo)

36. Bupati Apresiasi JHL Group Usung Konsep Budaya Lokal

JHL Group terus melakukan inovasi dalam perkembangan bisnis di bidang properti. Salah satunya adalah hotel. Kini JHL Group tengah membangun dan merampungkan infrastruktur hotel Episode di Serpong, Kabupaten Tangerang. Ini merupakan hotel Episode bintang 4 kedua yang dibangun setelah di Kuta, Bali.

Acara proses tutup atas atautopping off hotel episode telah dilaksanakan pada Jumat, (28/8/2020). Pada acara tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi JHL Group. Serta pejabat tinggi seperti Bupati Tangerang, Ahmed Zaky Iskandar dan Komjen. Pol. H. Mochamad Iriawan yang sekaligus menjabat sebagai ketua PSSI.

"Gading Serpong daerah yang isrimewa, kota masa depan dan



infrastruktur yang baik. Memamg ini kota yang di konsep jadi kota. Bukan kampung yang jadi kota terus gak di konsep," ujarnya Jerry Hermawan Lo dalam jumpa pers.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaky Iskandar mengapresiasi konsep budaya lokal yang diusung oleh JHL Group dalam pembangunan Hotel Episode ini. Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, dengan adanya hotel seperti Episode ini membantu memperkenalkan budaya Indonesia. Sehingga kawula muda saat ini mengetahui budaya Indonesia.

"Terima kasi atas dedikasi dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kami selalu mendukung, terutama investasi yang masuk ke Kabupaten Tangerang," pungkasnya.(Diskominfo)

37. Bupati Resmikan Gudang Ketahanan Pangan Wilayah Utara

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meresmikan gudang ketahanan pangan di wilayah bagian utara Tangerang. Peresmian ini dilaksanakan di Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Jumat (11/9/2020)

"Kegiatan ketahanan pangan ini hasil dari kerja sama Pemerintah Daerah melalui PT. Mitra Kerta Raharja bersama PT. Mega Pangan Mandiri," ujar Zaki.

Zaki juga mengatakan, mudah-mudahan kedua PT ini dapat terus berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Lanjutnya, Kabupaten Tangerang sendiri memiliki luas wilayah 959,6 km2 dengan jumlah penduduk 4 juta jiwa tersebar di 29 wilayah Kecamatan.

Memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang masih ada dan bisa dikembangkan.



“Dengan adanya Gudang Ketahanan Pangan ini bisa menyimpan ketersediaan pangan dalam menghadapi musim Kemarau di wilayah utara,” ucapnya.

Direktur PT. Mitra Kerta Raharja Akip Samsudin menambahkan kegiatan ini merupakan terobosan yang bagus dalam mempertahankan ketahanan pangan di kabupaten tangerang. Ia menjelaskan gedung ini memiliki luas 2.000 meter dapat menampung 500 ton beras untuk disimpan.(Diskominfo)

38. Pemkab Proyeksikan Rp. 4.96 Triliun Pada APBD Ta. 2021

Pemerintah Kabupaten Tangerang proyeksikan Rp. 4.96 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Proyeksi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2,12 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,68 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 1,14 triliun.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa jumlah pendapatan tersebut direncanakan untuk membiayai



belanja. Seperti Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,34 triliun serta Belanja Langsung sebesar Rp. 2,91 triliun.

"Besaran target pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tersebut, tahun 2021 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 300 miliar," ujar Zaki, Jumat (18/9/2020).

Masih penjelasan Bupati Tangerang pada acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tentang Penyampaian KUA dan PPAS, APBD TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang bahwa Anggaran Defisit tersebut dibiayai dari Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp. 300 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menambahkan setelah Bupati menyampaikan Penjelasan tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2021 ini, pihaknya senantiasa mendukung penuh demi terwujudnya Tangerang yang semakin Gemilang. (Diskominfo)

39. Bupati Tangerang Lantik 4 Pejabat Eselon II.B

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melantik Empat pejabat Eselon II.b dilingkungan Pemkab Tangerang Provinsi Banten.



Acara pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Tangerang Jl Kisamaun Nomor 1, Kota Tangerang, Jumat (18/9/20).

Pejabat yang dilantik Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.757-Huk/2020 adalah:

1. Ujang Sudiartono, ST. Mt, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. (Sebelumnya Sekdis Pendidikan)

2. Dra. Resmiyati Marningsih, M.Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakataan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. (Sebelumnya Sekdis BKPSDM).

3. Dra. Ratih Rahmawati, MM Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. (Sebelumnya Sekdis Perhubungan).

4. Cikwi R Inton, S.IP, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. (Sebelumnya Camat Jayanti).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan Pelanti-

kan Ini merupakan penyegaran organisasi dan penyempurnaan karEna ada 4 Posisi Eselon II.b kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki waktu pensiun.

Bupati berpesan Kepada ke empat pejabat yang dilantik, agar melaksanakan tugas dengan baik jalankan tugas dan fungsinya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing.(Diskominfo)

40. 12 Tahun Menanti, Akhirnya Air PDAM Mengalir

Akhirnya warga Perumahan Sudirman Indah, Tigaraksa, dapat menikmati air bersih dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja milik Pemkab Tangerang, setelah 12 tahun menanti.

Plt RT03/06 Blok B Perumahan Sudirman Indah, Kelurahan Tigaraksa, Maidi Supernenti mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tangerang dalam hal ini Perumdam TKR yang telah memasang jaringan perpipaan air bersih di perumahannya.

Ia mengaku, tinggal di Sudirman Indah sejak tahun 2008 artinya sudah 12 tahun menanti air bersih dari PDAM. Berkat perjuangan warga dan pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 baru terealisasi pemasangan jaringan air bersih.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zaki Bupati Tangerang yang telah realisasikan program air bersih di Sudirman. Ini menjadi kebanggaan buat kami yang selama ini menanti air PAM selama 12 tahun," ujar Maidi.

Baya Pangiluan Hatta, Kepala Kantor Cabang Tigaraksa Perumdam TKR, mengatakan untuk pemasangan jalur pipa di Perum Sudirman Indah sudah selesai awal tahun 2020. Dikatakan Baya, sekarang sedang fokus pemasangan sambungan rumah ke warga yang telah mendaftar kolektif melalui pengurus RT/RW yang telah ditunjuk dan perorangan atau mengurus langsung di perusahaan.



Berdasarkan data sampai akhir September ini yang sudah terpasang sambungan langganan (SL) di Perum Sudirman Indah mencapai 920 dari 2.500 yang daftar. Biaya pendaftaran Rp1.206.000 untuk golongan rumah tangga.

Direktur Utama Perumdam TKR Kabupaten Tangerang Sofyan Sapar menambahkan untuk sambungan langsung (SL) di perumahan Sudirman Indah sudah mencapai 920 SL, dan yang belum akan segera dipasang.

Perumdam TKR di Cabang Tigaraksa sudah melayani sambungan langsung ke rumah sebanyak 15.418 sl, mulai dari Kecamatan Balaraja, Cisoka, Solear, Tigaraksa, dan Sukamulya. Untuk sambungan langsung di Kecamatan Solear 1.350 sl, Kecamatan Cisoka 1.000 sl, Kecamatan Balaraja 7.775 sl, Kecamatan Suka Mulya 1.231 sl, Kecamatan Tigaraksa 4.062 sl.

Tahun ini target sambungan langganan di Cabang Tigaraksa

7.000 sl yang akan dipasang, di Perumahan Kirana, Batara Kecamatan Solear dan Perumahan Sudirman Indah Tigaraksa. Perumdam TKR Kabupaten Tangerang investasikan dana untuk membangun jaringan infrastruktur sistem penyediaan air minum untuk melayani masyarakat di Cabang Tigaraksa. (Diskominfo)

41. Bupati Tangerang Kembali Meresmikan Gudang Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali meresmikan Gudang Ketahanan Pangan, tepatnya di bagian barat Kabupaten Tangerang, Jumat (2/10), setelah sebelumnya juga meresmikan Gudang Ketahanan Pangan di bagian utara Kabupaten Tangerang.

Gudang bernama PT Benteng Pangan Utama tersebut berlokasi di Pergudangan Cibadak Indah No. 98, Jalan Raya Serang Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. "Sebelumnya saya juga sudah meresmikan gudang ketahanan pangan di wilayah Tangerang Utara pada 11 September 2020," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangan tertulis yang dikutip Ahad (4/10).

Zaki mengatakan, gudang tersebut bakal menampung dan menjadi gudang penyimpanan produk dan bahan pokok untuk keperluan warga, baik dari hasil petani dan nelayan di Kabupaten Tangerang maupun luar Kabupaten Tangerang. Kehadiran tambahan gudang tersebut diharapkan dapat lebih menjaga stabilitas dan pasokan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Dia berharap warganya bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan biaya yang ekonomis.

Sementara itu, pimpinan PT. Benteng Pangan Utama, Ahmad Subadri mengatakan, gudang yang baru saja diresmikan tersebut, terdiri dari dua bagian, yakni gudang penyimpanan untuk



beras yang bisa menampung hingga 700 ton dan gudang cold storage yang bisa menampung daging, ayam, dan ikan sebanyak 34 ton serta sayur mayur.

Diketahui, peresmian gudang ketahanan pangan di wilayah Barat Kabupaten Tangerang tersebut merupakan hasil dari kerjasama Pemerintah Daerah melalui PT. Mitra Kerta Raharja bersama PT. Mega Pangan Mandiri.(Diskominfo)

42. DPRD Kabupaten Tangerang Sahkan Perda APBD Peruba han 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang ketok palu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun 2020.Pengesahan Raperda menjadi Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut, digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengungkapkan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang bersama jajaran Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembahasan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2020.



Pembahasan tersebut, kata Ketua Dewan dalam rangka menyelaraskan kebijakan-kebijakan secara konstruktif. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Menurutnya, dalam pendapat akhir tersebut tercermin semangat kebersamaan serta kearifan yang dilandasi totalitas rasa pengabdian yang tinggi. Sebagai wujud semangat yang dimiliki untuk mengutamakan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli yang hadir pada pengesahan APBD Perubahan Tahun 2020 mengatakan pembahasan atas perubahan APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dilaksanakan secara dinamis dan konstruktif, yang mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertangung jawabkan. Dengan tujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Perubahan APBD TA. 2020.

Selain itu, diharapkan dapat menggerakan kembali roda perekonomian masyarakat. Terutama pada sektor rill sebagai dampak dari pandemi ini. (Diskominfo)



43. Dinas Bina Marga Normalisasi Sungai Dan Bangun Saluran Air

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang menormalisasi beberapa sungai dan membangun saluran air pada tahun ini.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang Dedi Sukardi mengatakan, kegiatan peningkatan irigasi yang diperbaiki tahun 2020 hanya 22 dari 62 kegiatan yang direncanakan.

"Sebagian kegiatan peningkatan sungai dan saluran air terkena refocusing atau pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan Covid-19," ujar Dedi.

Kegiatan yang dilaksanakan seperti peningkatan Sungai Cimaneuh, Sungai Cisiang, Sungai Cipayeun, Cikolear, Sungai Ciketapang, Sungai Cikait, Sungai Curanjieun, Sungai Cikepuh.

Kemudian, pembangunan Sungai Cilongok 1, tanggul Sungai Ciketapang Mauk, saluran pembuangan Cibolang, saluran pembuang Cikunir 1, saluran pembuang Dangdeur, dan saluran pembuang Cipangodokan. (Baca juga: Pengusaha Antusias Penerapan Kembali PSBB Transisi Jakarta)

Selain itu, pada Agustus dan awal September 2020 telah melebarkan drainase atau jalan air dan juga membangun sodetan air yang berada di Jalan Raya Pemda (Jalan Syekh Nawawi). Pembangunan tersebut guna mengurangi genangan air yang berada di jalan raya.

Slamet Budhi selaku Kepala Dinas Bina Marga SDA menambahkan bahwa sebelumnya, bahwa pihaknya telah membangun drainase yang ada di Jalan Pemda dan pelebaran untuk penanganan genangan air karena setiap curah hujan tinggi terjadi genangan yang cukup luas, jadi pihaknya melakukan kegiatan crossing (Sodetan).

Jadi menurutnya, kalau dilihat penanganan ini, Alhamdulillah ketika curah hujan cukup tinggi dan tidak akan terjadi genangan lagi di jalan tersebut jadi mudah-mudahan ke depan dengan upaya-upaya yang terus kita lakukan ini tidak terjadi genangan yang berakibat terjadinya kerusakan jalan yang ada di jalan Syeh Nawawi atau Jalan Pemda. (Diskominfo)

44. Hut Kabupaten Tangerang Ke-388 : Sejarah Baru Semangat Baru

Peringatan Hari Jadi ke-388 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada hari Selasa 13 Oktober 2020 di tengah pandemi Covid-19 dilakukan secara sederhana di Ruang Rapat Paripurna DPRD KabuptenTangerang dengan di ikuti seluruh OPD, Kecamatan dan Masyarakat melalui Virtual. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Sejarah Baru Semangat Baru Melawan Covid-19 menjadi Tema dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tangerang Ke-388 Tahun.

“Hari ini kita merayakan hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke 388 Tahun secara sederhana, tidak ada agenda perayaan seperti tahun yang lalu, hanya Paripurna DPRD Kabupaten



Tangerang dan Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Penanganan dampak ekonomi bagi Wirausahawan dan Kariyawan yang terkena PHK," kata Bupati Tangerang.

Ia memaparkan, pada tanggal 13 Oktober 1632 adalah hari dimana tiga bangsawan Banten Arya Wangsakara, Arya Jaya Sentika, Arya Yudha Negara Dilantik oleh Kesultanan Banten untuk memimpin wilayah Tangerang, Ketiga nya pertama kali menempati wilayah yang sekarang disebut Tigaraksa, yang menjadi awal mula berdirinya Kabupaten Tangerang.

Bupati Zaki juga mengucapkan, Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat yang sudah bekerjasama dalam pembangunan, tentu ini menjadi semangat dan motivasi bagi kita dalam membangun Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang

" Dengan semangat kita bersama yakni One Team, One Spirit, One Goal, saya merasa yakin Kabupaten Tangerang akan terus mampu untuk membuktikan komitmen nyata, berbagai prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tangerang saat ini patut untuk disyukuri masih bisa kami pertahankan dan berhasil dicapai ditahun ini," katanya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Penghargaan TOP BUMD Strategi Business Continuty BUMD di Era New Normal, kemudian Kabupaten Tangerang juga telah berhasil meraih peringkat Ke-3 Nasional dan Peringkat Ke-1 Tingkat Provinsi Banten sebagai daerah yang siap dalam Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kabupaten Tangerang juga telah berhasil meraih predikat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tertinggi dengan point 7.509 dari Kementerian Keuangan, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih, yang mana ini tentunya berkat kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Eksekutif dan Legislatif, para Stakeholder dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang,

"Saya Berharap Prestasi-prestasi ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, Amin" harap Bupati Zaki.

Gubernur Banten H Wahidin Halim Mengucapkan, Dirgahayu Kab.Tangerang yang ke-388 semoga makin jaya dalam mensejahterakan rakyat Kabupaten Tangerang, Hari jadi Kabupaten Tangerang Kali ini adalah semangat yang di wariskan oleh para Pahlawan kita untuk generasi muda,

Sementara itu Kholid Ismail selaku Ketua DPRD Kab.Tangerang mengatakan, Penetapan tanggal dan tahun hari jadi yang semula diperingati setiap tanggal 27 Desember, berubah menjadi tanggal 13 Oktober, dimana hal tersebut telah dilakukan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD hari Rabu 31 Juli 2019, dan Perubahan Hari Jadi Kabupaten Tangerang telah disetujui oleh Gubernur Banten, yang

disyahkan tanggal 02 Januari 2020 dengan Perda Nomor 02 Tahun 2020.(Diskominfo)

45. Bupati Panen Raya Jagung Hibrida Dan Ikan

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, panen jagung hibrida dan ikan lele di atas lahan tidur, Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (17/10/20).

"Alhamdulilah hari ini saya bekerjasama dengan TNI, Polri untuk panen raya jagung hibrida dan ikan lele, dalam rangka program ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan tidur, guna pemulihan ekonomi masyarakat dampak Covid-19," ucap Zaki.

Dia Menjelaskan, optimalisasi pemanfaatan lahan tidur secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang seluas 19 hektar. Sedangkan di Desa Badak Anom seluas 2 hektar. Memanfaatkan lahan tidur untuk menunjang ekonomi tangguh di Desa Badak Anom.

"Semoga program ini bisa terus berlanjut di Kecamatan maupun di Desa yang lain. Terpenting bisa mengikut sertakan pemuda-pemuda agar lebih bisa produktip lagi kedl depannya," ucap Zaki.

Zaki juga menjelaskan, Pemkab akan terus menyediakan fasilitas.



Baik bibit, pupuk, alat produksi pertanaian. Juga alat perikanan bagi masyarakat yang mau turun Ke perkebunan untuk memproduksi, agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan tidur. (Diskominfo)

46. Sekda Bubarkan Pelaku UMKM Berkerumun Daftar BPUM

Kerumunan pelaku UMKM saat mendaftar program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, Gedung Usaha Daerah (GUD) Kabupaten Tangerang, tak terhindarkan, Selasa (20/10/2020).

Program BPUM ini merupakan dana hibah dan bukan pinjaman ataupun kredit sehingga penerima usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak dipungut biaya apa pun dalam proses penyaluran. Setiap UMKM menerima bantuan Rp2,4 juta sebagai stimulus di masa pandemi.

Melihat kerumunan itu Sekda Kabupaten Tanegrang Rudy Maesyal langsung turun tangan. Rudy membubarkan kerumunan pelaku UMKM.

"Untuk memudahkan pelayanan pendataan BPUM Pemkab Tangerang sudah menyiapkan pelayanan pendaftaran online agar masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Koperasi," jelas Sekda saat membubarkan pelaku UMKM yang berkerumun. Pemkab sudah menyiapkan pendaftaran online melalui Link http://tiny.cc/yl20tz.

"Jadi warga tidak usah repot-repot datang ke dinas," sambungnya.

Di masa pandemi Covid-19, lanjut Sekda, masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. "Untuk itu kami siapkan alternatif yang mudah dan tidak ada lagi kerumunan di kantor Pemkab Tangerang. Kami harapkan masyarakat memahami kondisi saat ini, pandemi belum berakhir. Silahkan mengakses



Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Nurul Hayati menambahkan, saat ini sudah banyak yang mandaftar secara online. Nurul menambahkan untuk mendaftarkan bantuan BPUM di Kabupaten Tangerang cukup mengakses secara online agar tidak terjadi kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19.(Diskominfo)

47. Sebanyak 58.113 Pelaku Umkm Daftar Bantuan Bpum

Sebanyak 58.113 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang mendaftar Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Pertanggal 30 Oktober 2020 kemarin, jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang yang melakukan pendaftaran mencapai 58.113, namun data tersebut belum terverifikasi seluruhnya," ungkap Yeni Yuliawati, Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Senin (2/11/2020).

Jumlah pendaftar yang banyak tersebut, kata dia, belum sepenuhnya terverifikasi karena terpotong oleh libur panjang, dan mulai hari ini atau Senin pihaknya kembali melanjutkan proses verifikasi.



“Data calon penerima BPUM yang sudah diajukan ke kementrian sebanyak 29.389 pendaftar, dan data tersebut akan terus bertambah setiap waktu karena proses verifikasi masih terus berjalan sampai saat ini,” ujarnya.

Yeni mengatakan, pengajuan dilakukan melalui email ke kementerian, lalu akan diverifikasi dan divalidasi oleh kemeterian sebelum akhirnya akan ditetapkan penerimanya. Persyaratan mendaftarkan bantuan BPUM, kata dia, sangat mudah dari pemerintah, karena pemerintah sendiri ingin membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 maka saratnya pun tidak begitu sulit hanya KTP, KK, dan Foto usaha.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Nurul Hayati menegaskan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BPUM di Kabupaten Tangerang cukup mengakses secara online link yang sudah disediakan oleh dinas koperasi agar tidak adanya antrian.

“Silahkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pendaftaran melalui website https://tiny.cc/yl20tz yang sudah disiapkan, harap diperhatikan dan diisi dengan data yang benar dan valid agar tidak ada kesalahan dan mengurangi resiko gagalnya mener-

ima bantuan sebesar Rp2,4 juta," imbuhnya.

Ia berharap, bantuan ini bisa dimaksimalkan oleh masyarakat ditengah situasi pandemi Covid-19 ini untuk bisa membantu menopang kehidupan.(Diskominfo)

48. RAPBD Kabupaten Tangerang Ta 2021 Rp. 5,34 Triliun

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5,34 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan seiring dengan masih terdampaknya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kami ajukan RAPBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5,34 triliun. Penurunan sekitar 4,73 persen. Hal tersebut dikarenakan melemahnya sektor perekonomian dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda saat ini," tutur Zaki, Jumat (6/11/2020).

Rinciannya, dari belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp 5,34 triliun, sebanyak Rp 3,10 triliun untuk belanja operasi, Rp1,57 triliun untuk belanja modal, dan Rp 40 miliar untuk belanja tidak terduga, serta Rp 625,48 miliar untuk belanja transfer.

Pada kelompok belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 3,10 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 1,76 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp 1,19 triliun, dan belanja sosial sebesar Rp 9,84 miliar, serta belanja hibah sebesar Rp 137,08 miliar.

Adapun, pada kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp1,57 triliun dengan rinciannya, belanja modal tanah sebesar Rp346,26 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp549,89 miliar. Lalu, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp47,84 miliar, belanja modal jalan, jaringan irigasi sebesar



Rp605,87 miliar, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp28,97 miliar.

Sementara itu, dari sisi pendapatan ditargetkan sebesar Rp5,02 triliun. Angka itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,26 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,43 triliun dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 327,89 miliar.

Dengan besaran anggaran pendapatan dan belanja sebanyak itu, RAPBD 2021 Kabupaten Tangerang mengalami defisit sebesar Rp 324,99 miliar. "Defisit akan dibiayai dari estimasi perhitungan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) Tahun 2020 sebesar Rp300 miliar dan penarikan kembali dana investasi pada Bank Jabar Banten sebesar Rp 24,99 miliar," kata Zaki.

Zaki menegaskan, anggaran tersebut diharapkan nantinya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas. Dia memandang anggaran itu juga penting pada sektor pembangunan, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber dana yang disebabkan oleh belum pulihnya perekonomian daerah. (Diskominfo)



49. Fakultas Tehnik Unis Terapkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Kontrol Hidroponik

Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang melaksanakan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/11/2020).

Wakil Rektor Unis Suhaya mengatakan, bahwa program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) adalah program mahasiswa fakultas tehnik Unis yang diimplementasikan lewat rumah kasa hidroponik dibuat di balai penyuluh pertanian (BPP) Desa Tegal Kunir Kidul lengkap dengan Aplikasi Sistem Monitoring Dan Kontrol Hidroponik (SIMKRON).

SIMKRON ini bisa di fungsikan jarak jauh melalui handphone android, serta sebagai upaya Pemulihan Dampak Ekonomi (PDE). Ini sebagai wujud mendukung program ketahan pangan yang canangkan Pemkab Tangerang mekalui program unggulan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Azis Gunawan menyampaikan, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat perlu dilakukan guna menunjang

program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tangerang yakni Gerakan Membangun Masyarakat Pantai (GERBANG MAPAN), Kelompok Pemuda Tani, Kelompok Wanita Tani yang di sinkronkan dengan program dari universitas yang berbasis tenologi. (DISKOMINFO)

50. Bupati Zaki Berharap Baznas Memiliki Program Bersama

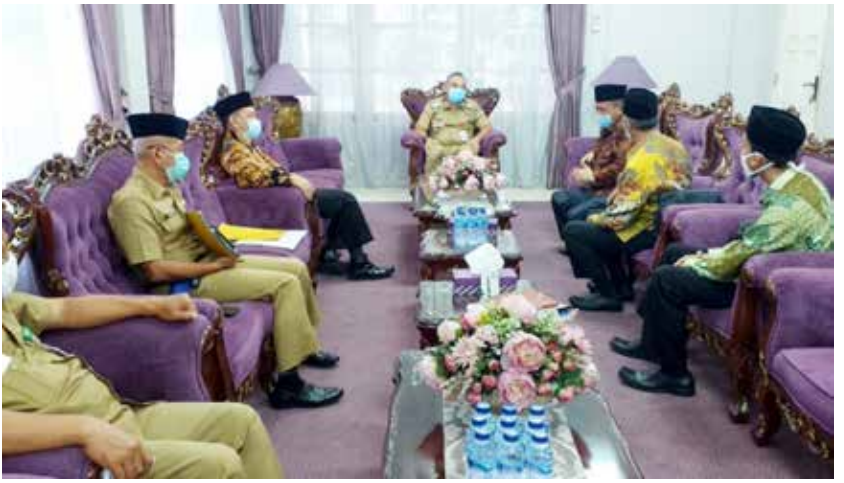
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten tidak hanya fokus di bidang sosial, kesehatan, dan dakwah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berharap Baznas ikut mensejahterakan masyrakat. Selain itu, juga terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemrintah.

Hal tersebut diungkap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, saat menerima Audensi Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tangerang, di Pendopo Bupati Tangerang Jln. Kisamaun No.1, Kota Tangerang, Senin (9/11/20).

Bupati Zaki sangat berharap Baznas kedepannya dapat lebih profesional, amanah dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana umat. Ia juga meminta Baznas, agar kedepanya memiliki sebuah program bersama sehingga program Pemkab Tangerang untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tangerang dapat bersinergi dan berkualitas.

Ketua Baznas Kabupaten Tangerang Achmad Nawawi mengungkapkan, kedatangan Baznas kali ini dalam rangka bersilaturahmi setelah dilantiknya Komisioner Baznas Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu sekaligus menyampaikan program-program di masa akhir tahun 2020 hingga 2021.

“Salah satu program yang akan segera dijalankan yaitu bedah rumah yang akan dilaksanakan pada 28 Kecamatan di Kabupaten Tangerang” ujar A. Nawawi. (IKP Diskominfo Kab. Tangerang)



51. Pemprov Banten Anggarkan Rp 7 Miliar Perbaiki Jalan Tigaraksa-Citeras

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menganggarkan Rp7 miliar untuk perbaikan jalan lintas ruas Citeras – Tigaraksa – Malang Nengah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang sekarang sedang berlangsung.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan perusahaan CV. Mitra Perkasa Mandiri dengan anggaran melalui APBD Perubahan dan APBD Murni Tahun Anggaran 2020 untuk waktu pengerjaan mulai Oktober 2020 dan direncanakan selesai dalam 150 hari kalender.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budhi mengungkapkan bahwa jalan tersebut adalah jalan milik Provinsi Banten dan kewenangan perbaikan ada di Banten dan Kabupaten Tangerang hanya mengusulkan perbaikan.

Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada PUPR Provinsi Banten Perbaikan Jalan Raya Citeras-Tigaraksa, kita juga mendorong pihak Komisi IV DPRD Provinsi Banten.



"Perbaikan Jalan Raya Citeras-Tigaraksa yang sedang dilaksanakan merupakan hasil pengajuan perbaikan yang kami ajukan kepada PUPR Provinsi dan Komisi IV DPRD Provinsi Banten. Kenapa kami mengusulkan ke Provinsi Banten, karena ada aduan dari masyarakat dan jalan itu ada kerusakan jalan yang berlubang dan rusak," terang dia. (Diskominfo)

52. DPRD dan Wabup Tangerang Tetapkan Propemperda Tahun 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang Bersama Wakil Bupati menetapkan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021, rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (01/12/20).

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli Mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas segala dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini di dalam proses menetapkan Program Peraturan Daerah Tahun 2021.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Ilham Choir menyampaikan materi pokok rancangan penetapan pro-



gram pembentukan peraturan daerah tahun 2021.

Berikut program pembentukan peraturan daerah tahun 2021:

a) Usul Eksekutif tentang Raperda:

- Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang.
- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
- Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika.
- Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman.
- Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kepemudaan.

b) Propemperda Daftar Kumulatif Terbuka:

- Raperda tentang Pertanggungjawaban Plaksanaan APBD Tahun 2020.
- Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021.
- Raperda tentang APBD Tahun 2022.

c) Usul Inisiatif DPRD tentang Raperda:

- Kabupaten Layak Anak.
- Pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Perlindungan lahahn pertanian pangan berkelanjutan.
- Penyelenggaraan kewirausahaan.
- Penyelenggaraan Badan Usaha Desa di Lingkungan Kabupaten Tangerang.
- Perlindungan produk lokal.
- Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- Ritel.
- Perlindungan Hukum bagi pemilik tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan swasta.(Diskominfo)

53. Masyarakat Sekitar Satuan Radar 211 Menerima 1500 Paket Sembako

Masyarakat yang terdampak Covid-19 sekitar Satuan Radar 211 Tanjung Kait menerima1500 paket sembako dari TNI AU TANJUNG KAIT. Pembagian Sembako dilakukan secara Simbolis pada acara Bakti Sosial TNI AU, Bertempat Lapangan Bola Satrada 211 Mauk Kabupaten Tangerang, Jumat (4/12/2020).



Wakil Asisten Potensi Dirgantara (Waspotdirga) Kasau, Marsekal Pertama (Marma) TNI Tyas Nurhadi, memimpin pembagian Sembako secara simbolis yang diterima beberapa kepala desa yang beredar di Kecamatan Mauk.

Kepala Desa tersebut, yaitu Desa Tanjung Anom, Desa Marga Mulya, Desa Ketapang, Desa Karang Serang, Desa Banyu Asih, Desa Mauk Timur, Desa Tegal Kunir Lor, dan perwakilan Panti Asuhan Ridha.

Bakti sosial kali ini sekaligus memperingati Hari Nusantara 2020 yang jatuh pada tanggal 13 Desember.

Dansatrad 211 Mayor Lek Erzy Widiantara S.T.M,Tr.Opsla menyampaikan terima kasih kepada TNI AU yg telah peduli dengan kesulitan masyarakat sekitar Satrad 211 Tanjung Kait.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Mauk Khalid M yang ikut hadir mengucapkan terima kasih kepada TNI AU yang telah membantu warga yang terdampak COVID-19 di wilayah Kecamatan Mauk. (Diskominfo)



54. Sekda Tinjau Pembangunan Drainase Dan Pedestrian Kawasan Puspem

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Maesyal Rasyid, meninjau pelaksanaan pembangunan drainase air dan pedestrian di Jalan Somawinata kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Jumat (4/12/2020).

Pada kesempatan tersebut, Maesyal ditemani langsung Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, beserta jajarannya.

Maesyal mengatakan dalam pembangunan drainase dan pedestrian di lingkungan Pemkab Tangerang merupakan upaya memperindah kawasan wisata dan mengantisipasi genangan banjir.

Sekertatis Daerah Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid tinjau langsung pelaksanaan pembangunan drainase air dan pedestrian di Jalan Somawinata kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kamis (4/12/2020).

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, menambahkan jajaranya sudah

melakukan banyak normalisasi saluran pembuang maupun sungai sampai akhir Desember 2020 di beberapa titik.

"Targetnya mengurangi banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. Hampir di setiap Kecamatan sudah normalisasi baik sungai maupun saluran-saluran," kata Budhi.

Dirinya mengklaim terus berupaya menormalisasi sungai atau saluran buang yang menjadi kewenangan Lemkab Tangerang maupun pusat. Pihaknya juga terus berupaya berkoordinasi agar masyarakat tidak mengalami banjir yang merugikan semua. (Diskominfo)

55. Bupati Tebar 3 Ribu Benih Nila Dan 1 Ton Lele Di Kronjo

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menebar benih ikan Nila sebanyak tiga ribu, dan Benih Ikan Lele saru ton di Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Senin (7/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tangerang Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya melakukan tebar benih ikan nila dan ikan lele di keramba yang dibangun di irigasi. Ini merupakan suatu produk inovasi terobosan dimana pembudidayaan ikan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Bupati Zaki berharap semoga penebaran benih ikan nila dan ikan lele serta pembagian ikan segar kepada warga Desa Cirumpak bisa bermanfaat dan bisa mengangkat derajat kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menghimbau kepada masyarakat Desa Cirumpak dan Kecamatan Kronjo untuk bisa menerapkan pola hidup 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan hal tersebut agar terus diingatkan kepada masyarakat.



Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Jainudin menuturkan, pihaknya berharap program bantuan sektor perikanan ini akan membantu dan memotivasi para pelaku usaha perikanan atau pembudidaya ikan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. "Dengan produktivitas meningkat maka akan mendongkrak margin yang diperoleh para pelaku usaha perikanan," ungkapnya (Diskominfo)

B. PRESTASI 2020

Meski dalam situasi menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus menorehkan prestasi. Selama Tahun 2020, sedikitnya ada penghargaan bergengsi yang diraih Pemkab Tangerang dari pemerintah pusat terkait pelayan kepada masyarakat. Berikut ini penghargaan yang berhasil diraih di tahun 2020.

1. Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Pemerintah mendapat penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori kategori pengawasan kearsipan dengan predikat AA (sangat memuaskan).



Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala ANRI M. Taufik kepada Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tangerang Yani Sutisna yang hadir menerima langsung mewakili Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, di Hotel Sunan, Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengucapkan rasa syukur atas diraihnya penghargaan kearsipan ini. Bahkan predikat yang ditorehkan Kabupaten Tangerang sangat memuaskan, dengan nilai yang sangat tinggi yakni 92,00 (AA).

Prestasi membanggakan ini kata Zaki, tidak lepas dari kerja keras tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang

yang berupaya dan berinovasi, sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan.

Bupati juga berpesan, bahwa apa yang diraih ini akan jadi kebanggaan warga bersama. Menurutnya, prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Tangerang.. Masyarakat juga harus turut serta menjaga dan memelihara apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

2. Penghargaan SAKIP dari KemenPAN-RB

Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dari MenPAN-RB Tjahyo Kumolo. Acara penyerahan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang bertajuk SAKIP Award 2019 Making Changes Making History itu berlangsung di Radisson Golf Convention Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2).

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil meraih predikat BB dengan nilai 70.13 Nilai ini meningkat dibandingkan nilai SAKIP tahun lalu, yakni predikat B.

Menteri Tjahyo Kumolo mengatakan, dalam rangka mendorong percepatan implementasi SAKIP, deputi RB Kunwas terus melakukan bimbingan teknis dan asistensi terhadap 84 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 organisasi perangkat daerah (OPD), dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD pada tahun 2019.

Usai menerima penghargaan, Bupati Zaki menekankan agar Pemerintah Kabupaten Tangerang berbudaya kerja yang baik



dan menggunakan hati. Saat ini kata Bupati, akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah baik, dan ke depan harus ditingkatkan.

Bupati menambahkan, penghargaan tahun 2020 ini hasil evaluasi kinerja tahun 2019 predikat kinerja untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan predikat BB. Ke depan kata dia, harus bisa ditingkatkan menjadi A.

3. Penghargaan TOP BUMD Awards 2020

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tangerang yakni Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) meraih prestasi dengan menyabet empat penghargaan. Empat penghargaan itu yakni Top Pembina BUMD, Top of the Top BUMD, Top BUMD Bintang 5 dan Top CEO BUMD.

Penghargaan tersebut berasal dari penilaian 30 juri yang



terdiri dari 9 profesor, kalangan doktor dan ahli ekonomi. Penghargaan diselenggarakan majalah Top Business dimana jumlah perusahaan daerah yang dinilai mencapai 1.149 perusahaan seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati tangerang H Mad Romli di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengatakan, penghargaan yang diperoleh menjadi motivasi bagi perusahaan daerah lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan bukan akhir dari tujuan keberadaan perusahaan daerah untuk terlibat dalam pembangunan.

Proses penilaian yang dilakukan dewan juri di mulai sejak 9 bulan lalu dengan beberapa metode. Yakni, survey, pengisian

kuisioner dan wawancara. Seperti yang dikatakan, Ketua Dewan Juri, Profesor Djoharmansyah Djohan, pada tahap survey didasarkan pada data yang diperoleh dari asosiasi bisnis dan pemerintahan dimana terseleksi menjadi 210 BUMD dari 1.149 usaha daerah yang dinilai.

Kriteria yang dinilai yakni pencapaian kinerja, peningkatan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada aspek pencapaian kinerja difokuskan penilaian pada mutu sumber daya manusia, keuangan, layanan dan manajerial. Adapun, kata Djohan, pada perbaikan, penilaian ditekankan sisi inovasi bisnis dan penggunaan teknologi baik untuk produksi maupun pelayanan terhadap masyarakat.

4. Penghargaan WTP ke 12 Kali dari Kemenkeu

Pemkab Tangerang kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang, atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut.

Penghargaan ini berupa plakat yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Tangerang, I Wayan Supatra Kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wareng Lantai 3, Gedung Setda Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (21/10).

Kepala KPPN Tangerang, I Wayan Supatra menjelaskan, sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2020 secara daring, Menteri Keuangan RI telah memberikan penghargaan berupa plakat kepada Pemkab/Pemkot yang berhasil meraih opini WTP, minimal 10 kali berturut-turut sejak ta-



hun 2010 sampai dengan 2019.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih. Dia juga memberikan apresiasi yang tinggi atas penghargaan dari Kemenkeu melalui KPPN Tangerang, karena telah mempercayakan Pemkab Tangerang terhadap kinerja pengelolaan keuangan dengan predikat WTP ke-12 kali secara berturut-turut.

Menurut Zaki, pihaknya patut bersyukur bahwa soliditas kinerja para aparatur Pemerintah Kabupaten Tangerang ini terus terjaga dan terus bekerja sama, serta koordinasi untuk terus memberikan layanan inovasi hingga terobosan-terobosan dalam rangka pelayanan publik. Selain itu juga di sektor pengelolaan keuangan daerah yang menjadi faktor penting, dalam keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini.



5. Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Badan Publik Informatif

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih kategori Informatif, pada Penganugerahan Badan Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten. Acara ini bertempat di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (10/12).

Acara tersebut dihadiri langsung Gubernur Banten Wahudin Halim, Ketua DPRD Provinsi Banten, Anggota Komisi Informasi Pusat, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Ketua Komisi Informasi Banten dan perwakilan Pemkab/ Kota se-Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengucapkan selamat, kepada para penerima penghargaan dari komisi informasi agar semua badan publik di Provinsi Banten. "Setelah Banten mendapatkan penghargaan kategori informatif, saya mengapresiasi kerja keras PPID utama di kabupaten/kota yang terus memberikan keterbukaan informasi," kata WH.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyied turut mengucapkan rasa syukur, karena penghargaan ini bisa draih dalam upaya menjawab tantangan publik yang terus mendorong komunikasi dengan Pemerintah Daerah.

"Alhamdulillah, pada tahun ini kita memperoleh peringkat ke-2 kategori badan publik pemerintah Kabupaten/ Kota Kualifikasi Informatif," ungkap Sekda usai menerima penghargaan.

6. Pemkab Tangerang Raih Penghargaan Peduli HAM Tahun 2019

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli Menerima Penghargaan Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019.





Penghargaan ini di Serahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Banten,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Andika Dwi Prasetya di Ex Pendopo Lama, Kota Serang dan dihadiri secara Virtual oleh Gubernur Banten H Wahidin Halim, Senin (14/12/20) pagi

Gubernur Banten H Wahidin Halim, mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Bupati dan Walikota serta jajarannya yang telah bekerja keras meskipun dimasa Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) akibat pandemi yang masih mewabah sampai dengan hari ini

"Alhamdulillah pada tahun 2020 ini, seluruh Kabupaten dan Kota di Banten mendapatkan penghargaan dengan predikat Peduli HAM dengan rentang nilai 84-97. Prestasi yang diraih ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang sangat baik dan dukungan penuh Kantor Kementrian Hukum dan HAM Banten," kata Gubernur.

Sementara itu Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli Menyampaikan Alhamdulillah Kabupaten Tangerang mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019

"Semoga dengan Penghargaan ini mndapat Semangat baru dalam Kepedulian Terhadap Hak Asasi Manusia di Kabupaten Tangerang" ucap Wakil Bupati. (*)